

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

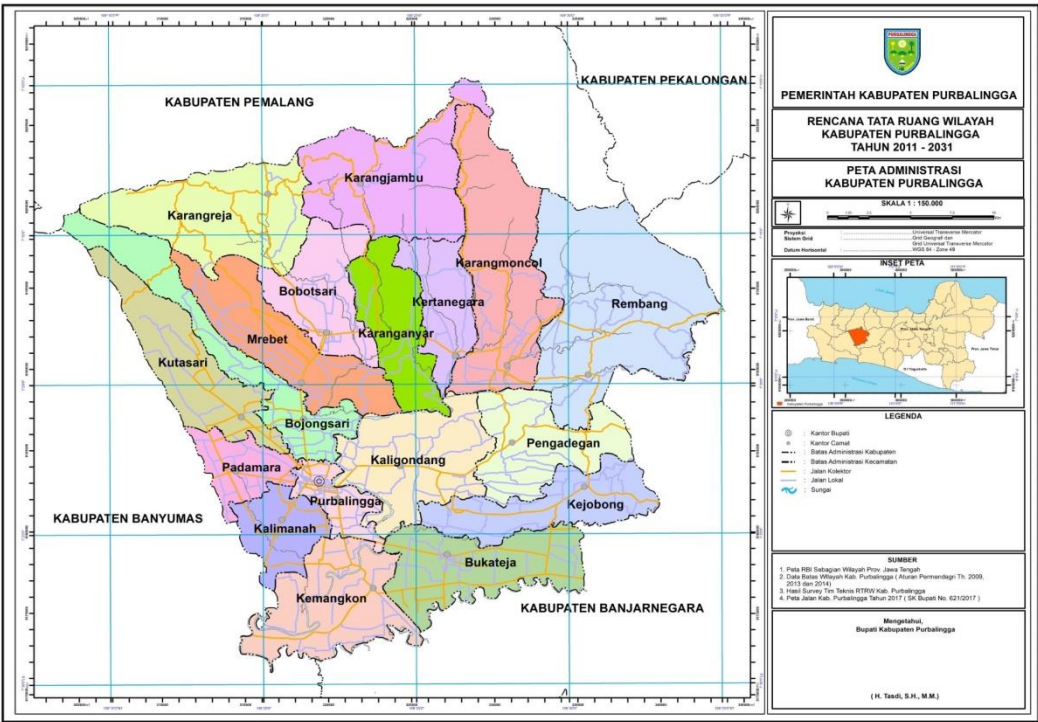
2.1. Gambaran Kondisi Umum

2.1.1. Aspek Geografi

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas 77.764,122 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (\pm 3.254 ribu Ha). Secara administrasi Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa dan 15 kelurahan, 996 dusun, 1.546 RW dan 5.069 RT. Rata-rata setiap Desa/Kelurahan memiliki enam rukun warga dan 21 rukun tetangga.

Wilayah Kabupaten Purbalingga berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan di sebelah Utara; Kabupaten Banjarnegara di sebelah Timur dan Selatan; Kabupaten Banyumas di sebelah Barat. Pada bagian Selatan merupakan bagian dari DAS Kali Serayu dengan sungai-sungai anakan seperti Kali Pekacangan, Klawing, Gintung dan sebagainya. Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu wilayah di kawasan andalan Jawa Tengah Selatan (Hal. 13, Lampiran IX, PP No. 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah).



Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Purbalingga

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Purbalingga terletak di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak pada posisi 109°11'-109°35' Bujur Timur dan 7°10'-7°29' Lintang Selatan. Kabupaten Purbalingga di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara. Jarak ibu kota Kabupaten Purbalingga dengan ibu kota Provinsi sejauh 191 km.

C. Kondisi Topografi dan Geomorfologi

Fisiografi Kabupaten Purbalingga terletak pada daerah perbatasan antara zona Serayu Utara dan zona Vulkanik Kwarter. Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 23 meter – 3.432 meter dari permukaan laut, dengan klasifikasi ketinggian Kabupaten Purbalingga termasuk dalam klasifikasi antara 0 – 1.500 meter dari permukaan laut. Menurut klasifikasi ketinggian wilayah Kabupaten Purbalingga tersebut masing-masing mempunyai sifat-sifat khusus seperti diuraikan sebagai berikut :

- a. Daerah Ketinggian 7 – 25 meter dpl merupakan daerah potensi persawahan dengan pengairan yang memadai.
- b. Daerah Ketinggian 25 – 100 meter dpl merupakan daerah dengan sebagian wilayah masih berpotensi untuk tanah persawahan dan sebagian wilayah pada ketinggiannya antara 50 – 100 meter dpl berpotensi untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi yang lebih besar.
- c. Daerah Ketinggian 100 – 500 meter dpl merupakan daerah berpotensi utama untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi wilayah bergelombang dan berbukit-bukit.
- d. Daerah Ketinggian 500 – 1.000 meter dpl merupakan daerah berpotensi untuk wilayah perkebunan dan baik untuk dikembangkan budidaya tanaman sayur-sayuran, mengingat wilayah tersebut cukup dingin.
- e. Daerah Ketinggian diatas 1.000 meter dpl merupakan daerah yang terbatas untuk usaha pertanian karena topografi wilayah bergelombang. Daerah dengan topografi demikian berpotensi sebagai wilayah non budidaya atau kawasan hutan lindung.

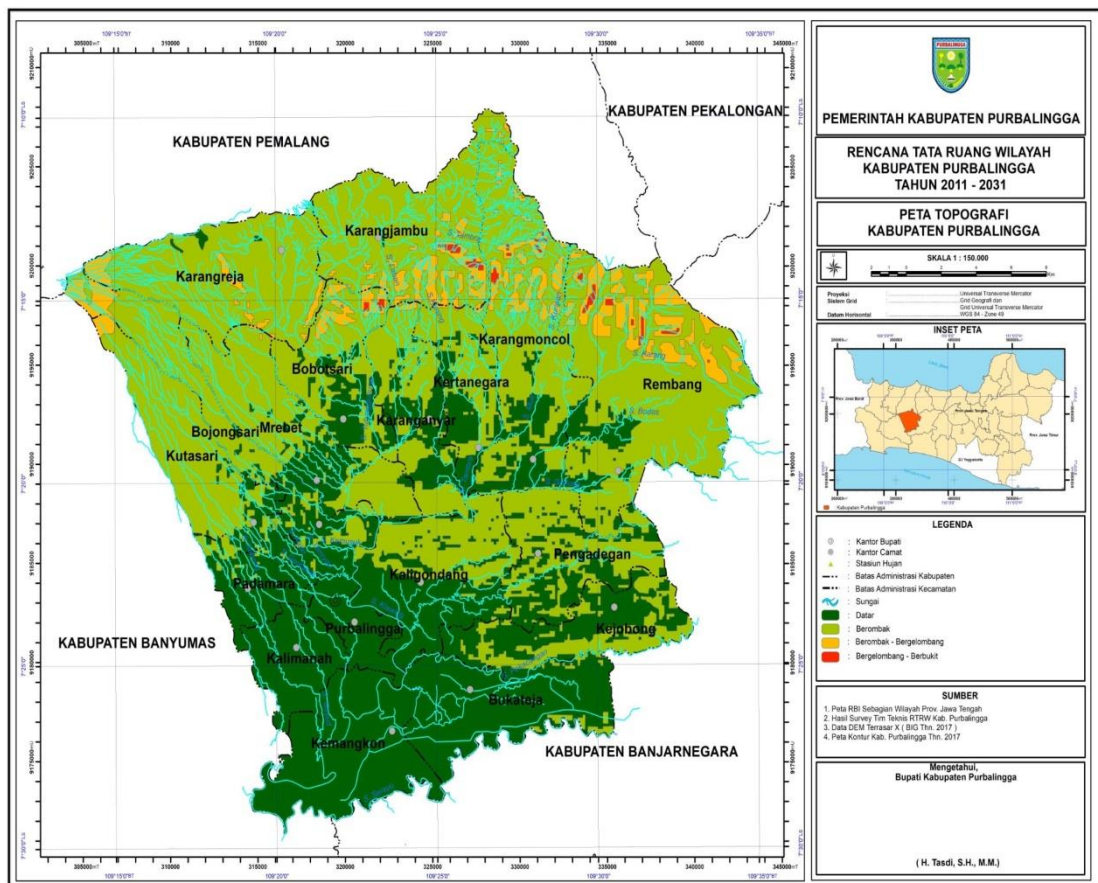
Dataran tinggi di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Rembang, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kertanegara dan sebagian Kecamatan Kutasari, sebagian Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Bobotsari.

Sedangkan dataran rendah di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, sebagian Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kejobong, sebagian Kecamatan Kutasari, Kecamatan Padamara dan Kecamatan Kemangkon.

Kabupaten Purbalingga memiliki karakter topografi yang beragam, dari dataran rendah, daerah perbukitan hingga daerah pegunungan. Karakteristik wilayah berdasarkan kondisi permukaan tanah menunjukkan sebaran sebagai berikut :

- a. Bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan kelerengan >40%. Daerah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.
- b. Bagian tengah merupakan daerah dengan kelerengan 25%-40%. Daerah ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karangreja dan Bojongsari.
- c. Bagian selatan merupakan daerah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0 - 25%. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

Gambaran kondisi topografi Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta berikut ini:



Gambar 2.2.
Peta Topografi Kabupaten Purbalingga

D. Kondisi Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri dari batuan sedimen klasik berupa batuan andesit, sirtu, batu pasir darat, batu lempung, dan trass dengan persebaran sebagai berikut:

Komposisi litologi batuan yang terdapat di Kabupaten Purbalingga terdiri atas:

- Alluvium endapan rawa dan danau, terutama tersusun oleh lempung, umumnya bersifat kedap air.
- Endapan alluvium gunung api, terdiri dari bahan-bahan tak mengeras, mengandung bongkah-bongkah batuan gunung api, tersusun oleh andesit sampai basalt dengan kelulusan terhadap air rendah sampai tinggi.
- Lava andesit berongga asal Gunung Slamet dengan kelulusan terhadap air tinggi sampai sedang.
- Endapan vulkanik tua yang terdiri dari aliran lava yang bersifat andesit sampai basalt dan breksi. Kelulusan terhadap air rendah sampai sedang.

Tabel 2.1
Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga

NO	Jenis Tanah	Luas Wilayah	
		Ha	%
1	Latosol coklat dan Regosol coklat	14.943,750	19,22
2	Aluvial Coklat tua	13.837,500	17,79
3	Latosol coklat dari bahan induk Vulkanik	8.490,625	10,92
4	Latosol merah kuning	4.498,375	5,78
5	Latosol coklat tua	6.237,500	8,02
6	Andosol coklat	5.662,500	7,28
7	Litosol	568,750	0,73
8	Padmolik merah kuning	10.050,000	12,92
9	Gromosol kelabu	13.475,122	17,33
Jumlah		77.764,122	100

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga

- Tanah Latosol

Di Kabupaten Purbalingga tanah latosol dirinci menjadi: Tanah Latosol coklat yang berasosiasi dengan regosol coklat; Tanah Latosol coklat dari bahan induk vulkanik; Tanah latosol merah kuning; dan Tanah Latosol coklat tua

- Tanah alluvial

Tanah ini biasanya berwarna kelabu, coklat, dan hitam, bersifat peka terhadap erosi, karena merupakan endapan tanah liat dan pasir, maka terdapat di sepanjang sungai yang cukup besar, seperti Sungai Gintung bagian tengah dan hilir, Sungai Klawing, Sungai Pekacangan dan Sungai Serayu bagian tengah dan hilir.

- Tanah Andosol

Jenis tanah ini berbentuk dari batuan bekuan dan intermedior, mempunyai sifat peka terhadap erosi, berwarna coklat atau hitam kelabu. Jenis tanah ini banyak terdapat di sekitar puncak Gunung Slamet.

- Tanah litosol

Tanah ini berbentuk dari batuan endapan dan bekuan, sangat peka terhadap erosi, kurang baik untuk pertanian. Jenis tanah ini banyak terdapat di Kecamatan Rembang bagian timur.

- Tanah ini berbentuk dari endapan liat dan bekuan. Berwarna kelabu sampai hitam, bersifat peka terhadap erosi, dapat dijadikan tanah pertanian dan perkebunan. Jeni tanah ini banyak terdapat di Kecamatan Karangreja, Bobotsari, Karanganyar, Karangmoncol dan Rembang.

KABUPATEN PEMALANG

KABUPATEN PEKALONGAN

KABUPATEN BANYUMAS

KABUPATEN BANJARNEGARA

Karangjambu

Karangreja

Bobotsari

Karangmuncol

Kertanegara

Rembang

Kawanyar

Bojongsari

Mrebet

Kutasari

Padamara

Purbalingga

Kaligondang

Pengadegan

Kejombang

Kalimanah

Bukateja

Kemangkön

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2011 - 2031**

**PETA JENIS TANAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

SKALA 1 : 100.000

INSET PETA

LEGENDA

SUMBER

1. Peta RIR Setengah Wilayah Prov. Jawa Tengah
2. Hasil Survei Tan. Daerah ITTRW Kab. Purbalingga
3. Peta Jenis Tanah Skala 1 : 250.000 (Batas Persepsi Tanah, Kementerian Pertahanan, Thn. 2003)

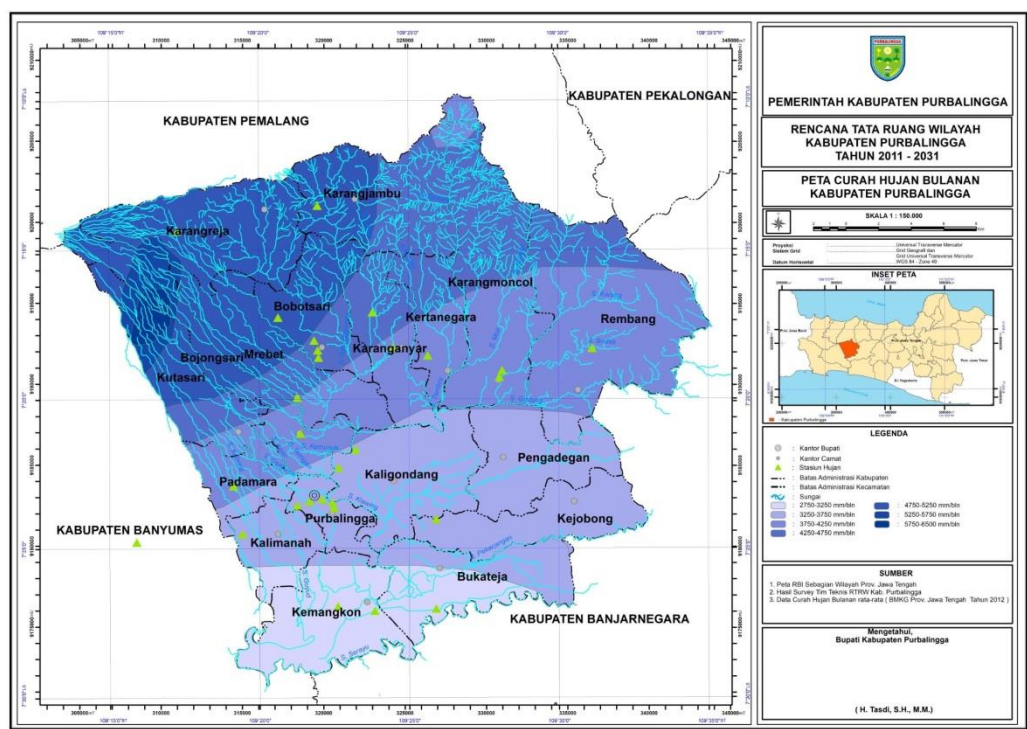
**Mengetahui,
Bupati Kabupaten Purbalingga**

(H. Taadi, S.H., M.M.)

F. Kondisi Klimatologi

Curah hujan sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan letak tempat itu sendiri. Tidak terkecuali untuk wilayah Kabupaten Purbalingga yang memiliki ketinggian 23 m – 3.432 m dari permukaan laut, dengan puncak gunung Slamet sebagai titik tertingginya. Purbalingga yang memiliki iklim tropis yang relatif basah dengan kelembaban relatif antara 74,6 % sampai 87,6 %, suhu udara 26°C – 31°C, dan curah hujan rata-rata 3.938 mm, dengan bulan basah (curah hujan > 200 mm) mencapai 10 bulan, bulan lembab (CH antara 100 – 200) 2 bulan dan bulan kering (CH 0-100 mm) 0 bulan. Dengan demikian menurut typologi Zona Agroklimat dapat

diklasifikasikan pada kelas A1 menurut Oldeman atau klas A menurut Schmit-Fergusson.



Gambar 2.5.
Peta Curah Hujan Bulanan Kabupaten Purbalingga

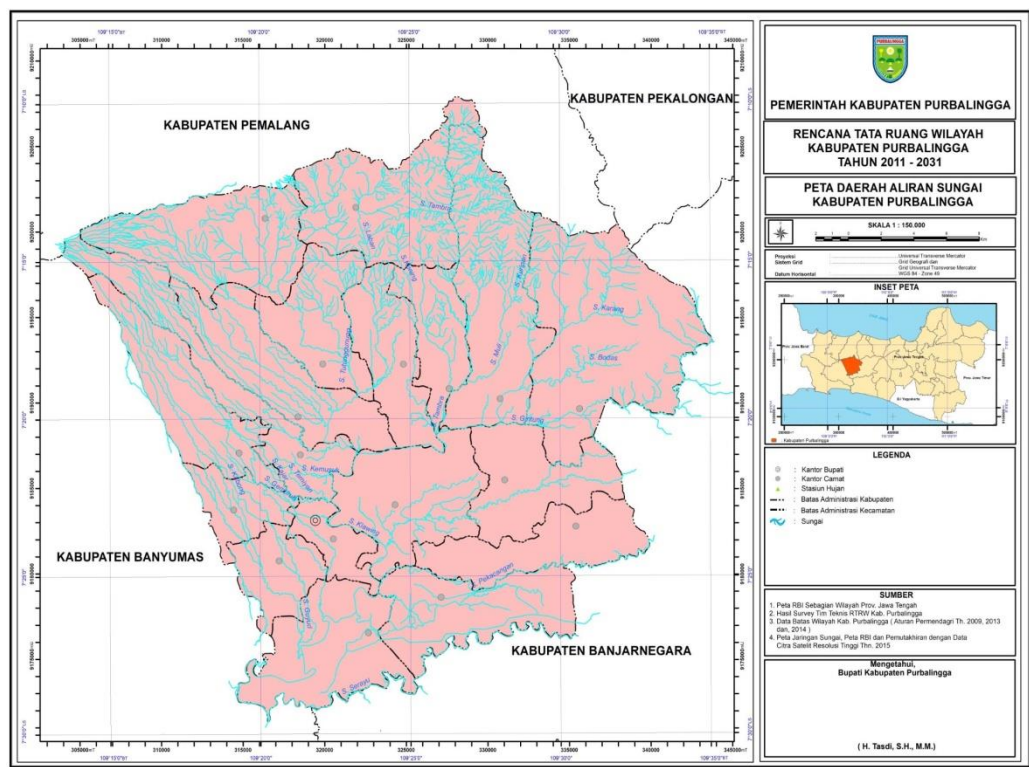
G. Kondisi Hidrologi

Pada umumnya, sungai-sungai di Kabupaten Purbalingga belum dimanfaatkan secara optimal, baik untuk pengairan tanah pertanian maupun untuk kebutuhan lainnya. Tetapi sungai yang memungkinkan untuk dibuat bendungan, dam dan waduk-waduk kecil lainnya yang tidak banyak mengeluarkan dana, telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk pengairan sawah, perikanan dan sebagainya.

Debit air sungai itu sendiri dalam setahunnya tidak tetap, karena debit air sungai dipengaruhi oleh curah hujan di daerah hulu. Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari 2 (dua) macam aliran, yaitu sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya serta sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga saja. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, yaitu sungai Pekacangan, sungai Serayu dan sungai Klawing.

Sedangkan sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga dan berpotensi untuk pengairan yaitu :

- Sungai Ponggawa
- Sungai Tungtung Gunung
- Sungai Gemuruh
- Sungai Laban
- Sungai Kajar
- Sungai Kuning
- Sungai Lembereng
- Sungai Wotan
- Sungai Tlahap
- Sungai Gintung
- Sungai Soso
- Sungai Tambra
- Sungai Lebak
- Sungai Muli



Gambar 2.6.
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Purbalingga

H. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dapat diketahui dari potensi kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2031. Kawasan budidaya terdiri atas: (1) kawasan peruntukan hutan produksi; (2) kawasan peruntukan pertanian (3); kawasan peruntukan perkebunan; (4) kawasan peruntukan perikanan; (5) kawasan peruntukan pertambangan; (6) kawasan peruntukan industri; (6) kawasan peruntukan pariwisata; (8) kawasan peruntukan permukiman; dan (9) kawasan peruntukan lainnya.

(1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi yang terdapat di Kabupaten Purbalingga adalah kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam. Kawasan ini merupakan areal hutan yang dikuasai oleh Perhutani BKPH Gunung Slamet Timur yang terdiri dari 4 RPH, yaitu RPH Serang, RPH Picung, RPH Karangreja, dan RPH Tunjungmulih. Kawasan hutan produksi diperuntukkan bagi areal hutan yang diproduksi baik melalui tebangan maupun pengambilan produksi bentuk lainnya. Oleh karena itu jika terdapat areal dengan hak atas tanah dan masyarakat atau badan hukum, wajib diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria:

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 683/KPTS/Um8/1990 dan nomor 837/KPTS/UM11/1980, kriteria hutan produksi ialah kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai skor 125-174, di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konservasi lainnya.

Sesuai hasil analisis luasan berdasarkan interpretasi citra satelit tahun 2015 dan data *.shp hutan yang diberikan Kementrian LHK, luas hutan produksi di Kabupaten Purbalingga kurang lebih 3.854,91 (tiga ribu delapan ratus lima puluh empat koma sembilan satu) hektar, meliputi :

1. Hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 592.51 (lima ratus sembilan puluh dua koma lima satu) hektar yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 70,49 (tujuh puluh koma empat sembilan) hektar;
 - b. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) hektar;
 - c. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 243,39 (dua ratus empat puluh tiga koma tiga sembilan) hektar;
 - d. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 135,45 (seratus tiga puluh lima koma empat lima) hektar;
 - e. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 20,57 (dua puluh koma lima tujuh) hektar;

- f. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 45,14 (empat puluh lima koma satu empat) hektar;
 - g. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 9,53 (sembilan koma lima tiga) hektar; dan
 - h. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.
2. Hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 3.262,39 (tiga ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga sembilan) hektar yang meliputi wilayah :
- a. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 526,11 (lima ratus dua puluh enam koma satu satu) hektar;
 - b. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 7,73 (tujuh koma tujuh tiga) hektar;
 - c. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 501,10 (lima ratus satu koma satu nol) hektar;
 - d. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 709,93 (tujuh ratus sembilan koma sembilan tiga) hektar;
 - e. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 639,42 (enam ratus tiga puluh sembilan koma empat dua) hektar;
 - f. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 80,40 (delapan puluh koma empat nol) hektar;
 - g. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 67,67 (enam puluh tujuh koma enam tujuh) hektar;
 - h. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 147,25 (seratus empat puluh tujuh koma dua lima) hektar; dan
 - i. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 582,78 (lima ratus delapan puluh tujuh koma tujuh delapan) hektar.

Hutan produksi di luar kawasan hutan pada tanah negara yang dikelola oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan hak pinjam pakai atau hak milik sesuai dengan syarat subjek sebagai pemegang hak. Kawasan hutan produksi yang ada dan fisiknya masih berupa hutan, tetap dipertahankan untuk hutan produksi. Sedangkan apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi hutan lindung pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi misalnya paling tidak menjadi kawasan hutan produksi dengan tebang pilih.

Diadakan penertiban penguasaan, pemeliharaan batas hutan dan pemilikan tanah serta pernbinaan dan pemanfaataannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan atau penggunaan non hutan lainnya dan sudah menjadi garapan rakyat. Bentuk penertiban dapat melalui kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ataupun bentuk-bentuk lain yang sesuai.

(2)Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di wilayah Kabupaten Purbalingga seluas kurang lebih 26.983,45 (dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma empat lima) hektar yang terdiri atas kawasan pertanian tanaman lahan basah dan kawasan pertanian tanaman lahan kering. Kawasan budidaya pertanian ini mempunyai kriteria sebagai unit lahan yang mempunyai tingkat kesesuaian bagi peruntukan pola usaha pertanian dan tidak dialokasikan untuk kawasan lindung.

a. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah

Kawasan peruntukan pertanian lahan basah adalah kawasan yang berupa sawah beririgasi (baik teknis, setengah teknis maupun sederhana) dan lahan sawah tadah hujan. Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 17.533,54 (tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh tiga koma lima empat) hektar yang meliputi seluruh wilayah kecamatan.

Dalam pengelolaannya, perlu pengaturan debit air irigasi, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air, perlu pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi serta mengendalikan permukiman dan budi daya lainnya. Pada lereng >8 % perlu memperhatikan pengelolaan teknis budi daya padi sawah sesuai SK Menteri Pertanian No. 175/KPTS/-RC-200/54/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di Daerah Aliran Sungai.

Kawasanini hanya diperuntukkan bagi tanaman padi sesuai dengan penetapan bupati. Penggunaan jenis tanaman lainnya selain padi diperkenankan apabila air tidak mencukupi atau adanya pertimbangan pencapaian target produksi optimal seperti palawija. Untuk mengoptimalkan produksi tersebut wajib berpedoman pada pola tanam yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Usaha pertanian berupa tegalan atau kebun campur, kebun sayur atau hutan rakyat pada areal yang potensial untuk

memperoleh irigasi dan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah mampu menjangkau tanah yang dimilikinya, maka pemilik wajib mengembangkan untuk diubah menjadi sawah. Pembangunan gedung, perumahan dan pabrik atau bangunan fisik di kawasan ini tidak diperkenankan kecuali bangunan fisik pendukung prasarana irigasi.

Untuk perkampungan atau bangunan fisik yang ada tidak diperkenankan melebar atau meluas ke areal sawah yang saat ini dan dinyatakan sebagai kawasan pertanian lahan basah atau bukan sawah tetapi berpotensi untuk berkembang menjadi sawah. Perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan tanah.

Pembangunan yang bersifat non pertanian diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian yang subur, beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana, serta berfungsi utama melindungi sumber daya alam dan warisan budaya. Pelaksanaan konservasi tanah atas dasar status irigasi, produktivitas, sifat penggunaan tanah (perkotaan atau perdesaan) dan letak serta luas tanah dilakukan secara bertahap. Kegiatan yang diizinkan adalah pengolahan lahan dan penelitian. Jenis bangunan yang diizinkan yaitu prasarana irigasi.

Penyediaan bibit unggul oleh petani secara mandiri perlu dikembangkan untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap bibit unggul produksi daerah lain. Sehingga sektor pertanian di Kabupaten Purbalingga akan menjadi kuat yang pada akhirnya akan menghambat berkembangnya sektor industri yang tidak berbasis potensi lokal.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering

Kawasan peruntukan pertanian lahan kering adalah kawasan yang berupa ladang dan tegalan. Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 9.449,90 (sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan koma sembilan nol) hektar yang meliputi seluruh wilayah kecamatan.

Kawasan pertanian lahan kering merupakan kawasan yang boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lainnya, dikecualikan untuk kegiatan industri skala menengah dan besar, dengan syarat di luar lahan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan memberi nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi serta tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.

Alih fungsi lahan agar disesuaikan dengan rencana rinci tata ruang dan rencana detail tata ruang.

Berdasarkan hasil identifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Purbalingga dan rencana perubahan pemanfaatan lahan bahwa luas KP2B seluas 23.000,00 (dua puluh tiga ribu) hektar, yang terbagi menjadi pertanian lahan basah seluas 17.546,52 Ha yang merupakan sawah beririgasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis dan irigasi sederhana) dan sawah tadah hujan, serta pertanian lahan kering seluas 5.453,48 Ha yang terdiri dari ladang dan tegalan.

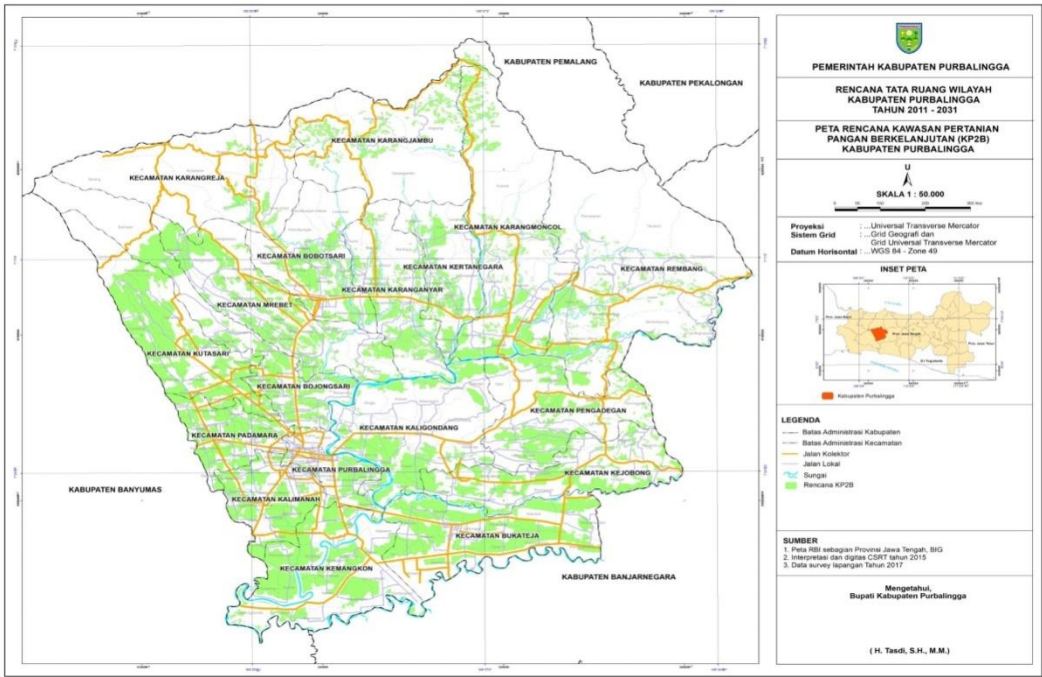
Tabel 2.2.
Luas Areal Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
Kabupaten Purbalingga

No.	Kecamatan	Kawasan Peruntukan Pertanian			KP2B		
		Lahan Basah	Lahan Kering	Total Luasan	Lahan Basah	Lahan Kering	Total Luasan
1	Bobotsari	903,49	179,89	1.083,39	869,20	23,24	892,44
2	Bojongsari	1.031,28	494,87	1.526,15	955,12	385,68	1.340,80
3	Bukateja	2.117,82	37,37	2.155,20	1.884,68	7,09	1.891,77
4	Kaligondang	1.172,68	468,83	1.641,51	1.145,00	397,14	1.542,15
5	Kalimanah	1.096,15	0,00	1.096,15	1.022,32	0,00	1.022,32
6	Karanganyar	1.037,17	323,08	1.360,25	966,11	154,69	1.120,80
7	Karangjambu	737,22	554,63	1.291,85	697,91	245,97	943,88
8	Karangmoncol	1.311,57	684,73	1.996,29	1.196,48	244,56	1.441,04
9	Karangreja	300,31	1.937,58	2.237,89	271,26	1.751,41	2.022,67
10	Kejobong	254,79	520,71	775,50	230,92	391,75	622,67
11	Kemangkon	2.009,20	11,61	2.020,80	1.863,24	8,31	1.871,55
12	Kertanegara	781,13	229,06	1.010,20	730,12	82,07	812,19
13	Kutasari	862,19	1.222,49	2.084,68	790,36	1.110,51	1.900,88
14	Mrebet	1.262,60	757,01	2.019,62	1.194,76	462,41	1.657,18
15	Padamara	1.055,60	2,00	1.057,59	960,96	0,00	960,96
16	Pengadegan	70,05	627,47	697,51	60,67	462,02	522,69
17	Purbalingga	448,72	6,49	455,21	407,25	5,56	412,80
18	Rembang	1.081,59	1.392,07	2.473,66	927,64	1.093,59	2.021,23
	Jumlah	17.533,54	9.449,90	26.983,45	16.174,02	6.826,00	23.000,02

Sumber : Hasil Digitasi Peta Citra Satelit dan Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW, 2017

Berdasarkan pada kriteria tersebut, maka pengaturannya dengan melihat sebaran potensi sumber daya lahan yang memenuhi syarat untuk dijadikan kawasan budidaya pertanian. Dengan kondisi tersebut, maka perlu dikembangkan melalui program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.

Pada kawasan pertanian, untuk perluasan perkampungan bagi permukiman yang telah ada dan industri diizinkan tetapi hanya terbatas pada kawasan pertanian lahan kering.



Gambar 2.7
Peta Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
Kabupaten Purbalingga

(3) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan berupa kebun campur (agroforestri) yaitu sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan. Kebun campur menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk kawasan perkebunan adalah ketinggian <2000 m, kelerengn <40 %, dan kedalaman efektif lapisan tanah >30 cm. Disamping itu perlu peningkatan budiaya tanaman keras yang sudah ada dan perlu melakukan tindakan konservasi tanah dan air. Budidaya lain yang sudah ada diperbolehkan dengan syarat memperhatikan azas konservasi.

Kawasan dengan peruntukan perkebunan di Kabupaten Purbalingga direncanakan seluas 14.683,40 (empat belas ribu enam ratus delapan puluh tiga koma empat nol) hektar yang meliputi seluruh wilayah kecamatan :

1. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 482,18 (empat ratus delapan puluh dua koma satu delapan) hektar;
2. Kecamatan Bojongsari seluas kurang lebih 251,19 (dua ratus lima puluh satu koma satu sembilan) hektar;
3. Kecamatan Bukateja seluas kurang lebih 164,24 (seratus enam puluh empat koma dua empat) hektar;
4. Kecamatan Kaligondang seluas kurang lebih 1.358,87 (seribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan tujuh) hektar;
5. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 785,03 (tujuh ratus delapan puluh lima koma nol tiga) hektar;
6. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 1.646,71 (seribu enam ratus empat puluh enam koma tujuh satu) hektar;
7. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 1.226,39 (seribu dua ratus dua puluh enam koma tiga sembilan) hektar;
8. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 679,57 (enam ratus tujuh puluh sembilan koma lima tujuh) hektar;
9. Kecamatan Kejobong seluas kurang lebih 1.293,65 (seribu dua ratus sembilan puluh tiga koma enam lima) hektar;
10. Kecamatan Kemangkon seluas kurang lebih 34,32 (tiga puluh empat koma tiga dua) hektar;
11. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 605,41 (enam ratus lima koma empat satu) hektar;
12. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 433,16 (empat ratus tiga puluh tiga koma satu enam) hektar;
13. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 695,81 (enam ratus sembilan puluh lima koma delapan satu) hektar;
14. Kecamatan Padamara seluas kurang lebih 1,36 (satu koma tiga enam) hektar;
15. Kecamatan Pengadegan seluas kurang lebih 2.191,81 (dua ribu seratus sembilan puluh satu koma delapan satu) hektar;
16. Kecamatan Purbalingga seluas kurang lebih 15,89 (lima belas koma delapan sembilan) hektar; dan
17. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 2.817,81 (dua ribu delapan ratus tujuh belas koma delapan satu) hektar.

(4) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha perikanan darat, baik berupa kegiatan budidaya perikanan secara khusus maupun kegiatan budidaya perikanan secara tumpang sari dengan pertanian lahan basah beririgasi. Jenis ikan yang dikembangkan di Kabupaten Purbalingga antara lain nila merah, lele, patin, mas, gurami, bawal, tawes dan melem. Ikan-ikan tersebut selain dibudidayakan juga berkembang di perairan umum.

Kawasan yang sesuai untuk perikanan ditentukan dengan mempertimbangkan faktor kelerengan <8 % dan persediaan air cukup, luas genangan dan kedalaman air. Perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan tersebut. Perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.

Kawasan budidaya perikanan darat meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, dan pemasaran yang tersebar di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumberdaya air untuk kegiatan budidaya perikanan.

Kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan perikanan berupa budidaya kolam yang dalam pelaksanaannya perlu dipertimbangkan keamanan dan kelestarian kolam. Kegiatan yang diizinkan di sekitar kegiatan perikanan adalah pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan. Kegiatan yang sudah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan perikanan tetap dipertahankan dengan syarat tidak melakukan perluasan atau pengembangan. Untuk mengembangkan kegiatan perikanan, Pemerintah Daerah mendorong dan/atau memfasilitasi pengembangan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan yang berbasis sistem kewilayahan melalui pendekatan minapolitan.

(5) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan. Kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki potensi bahan tambang yang bernilai ekonomis, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, yang pemanfaatannya perlu dikendalikan agar terjaga kelestariannya sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Penetapan kawasan pertambangan merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Kawasan peruntukan

pertambangan meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan kawasan peruntukan panas bumi.

a. Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral

Kawasan peruntukan pertambangan mineral adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud mineral. Kawasan ini berupa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Di Kabupaten Purbalingga hanya terdapat WUP Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi seluruh wilayah kecamatan, dengan potensi bahan galian mineral bukan logam dan batuan berupa : batu gamping, andesit, diorit, pasir dan batu (sirtu), tanah liat, tanah urug dan tras. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi seluruh wilayah kecamatan.

Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan yang memungkinkan untuk dilakukan kegiatan pertambangan mineral non bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut :

- Bahan galian terletak di daerah dataran, perbukitan yang bergelombang atau landai kemiringan lereng antara (0% - 17%), curam (17% - 36%) hingga sangat curam
- (>36%)}, pada alur sungai dan cara pencapaian
- Lokasi tidak berada di kawasan hutan lindung;
- Lokasi tidak terletak pada bagian hulu dari alur-alur sungai (yang umumnya bergradien dasar sungai yang tinggi);
- Lokasi penggalian di dalam sungai harus seimbang dengan kecepatan sedimentasi;
- Jenis dan besarnya cadangan/deposit bahan tambang secara ekonomis menguntungkan untuk dieksplorasi;
- Lokasi penggalian tidak terletak di daerah rawan bencana alam seperti gerakan tanah, banjir dan sebagainya.
- Pengelolaan :
- Kegiatan penambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;

- Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
- Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat;
- Pelaku kegiatan pertambangan dapat membangun prasarana jalan khusus untuk mendukung kegiatan penambangannya setelah memperoleh izin Pemerintah Daerah;
- Untuk menghasilkan asas manfaat bagi masyarakat, serta mendorong proses pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu ditetapkan kawasan potensial utama sebagai lokasi bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Diperlukan adanya kontrol berupa peraturan, sanksi dan arahan dari pemerintah Kabupaten khususnya dalam mengatur aktivitas pertambangan dan pemanfaatannya.
- Kegiatan yang diizinkan adalah penelitian, penambangan, pengangkutan, pengolahan serta pemantauan dan pengawasan kawasan. Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan pengolahan dan penunjangnya, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.

b. Kawasan Peruntukan Panas Bumi

Kawasan peruntukan panas bumi berupa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturraden, dimana sebagian wilayah Kabupaten Purbalingga masuk dalam WKP tersebut.

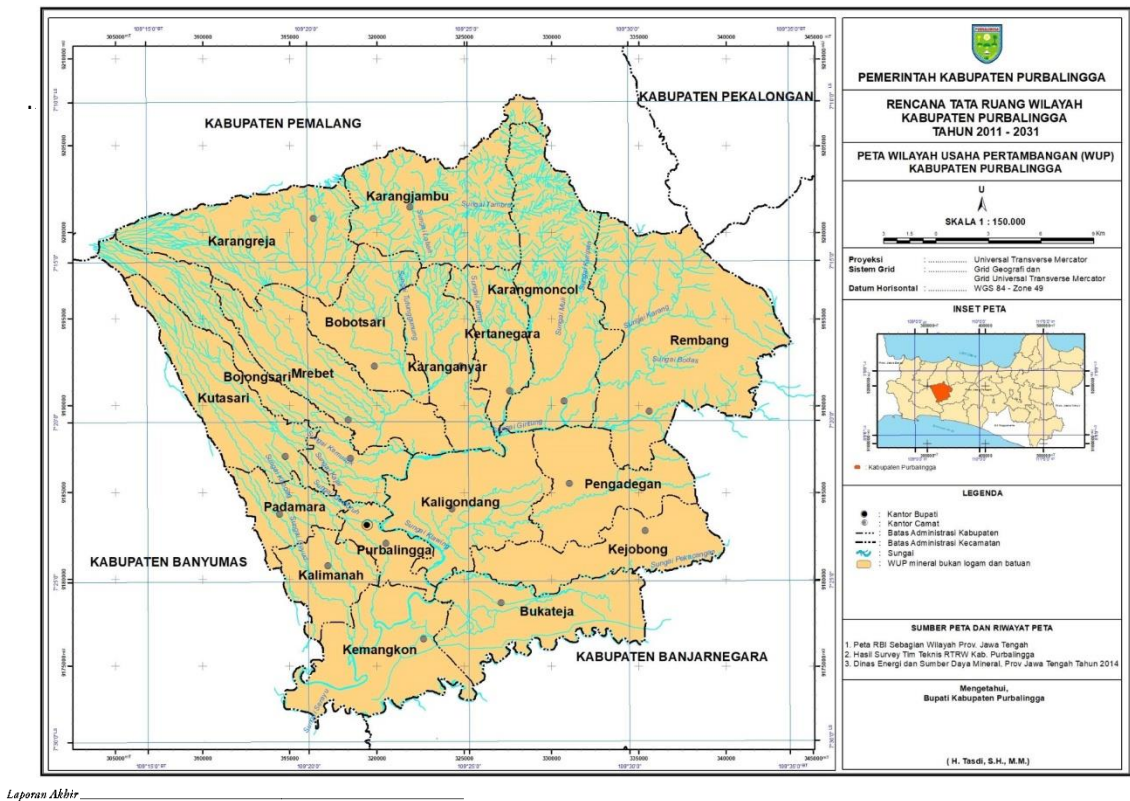
Kawasan peruntukan panas bumi merupakan kawasan yang masuk dalam sistem panas bumi yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi. Lokasinya adalah wilayah Kabupaten Purbalingga yang masuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturraden meliputi :

- sebagian wilayah Kecamatan Bojongsari;
- sebagian wilayah Kecamatan Karangreja; dan
- sebagian wilayah Kecamatan Kutasari.

Kegiatan pemanfaatan sumber energi dari panas bumi dilakukan dengan mempertimbangkan potensi panas bumi, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan; Kegiatan pemanfaatan sumber energi dari panas bumi dilakukan dengan prinsip konservasi dan keberlanjutan; Meminimalisir bukaan lahan, terutama kawasan lindung dan menggantinya

dengan lahan yang lain; Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan pemanfaatan potensi panas bumi, sekaligus disertai pengendalian yang ketat.

Pelaku kegiatan pemanfaatan potensi panas bumi dapat membangun prasarana jalan khusus untuk mendukung kegiatan pemanfaatan potensi panas bumi setelah memperoleh izin Pemerintah Daerah. Kegiatan yang diizinkan adalah penelitian, pemanfaatan potensi panas bumi serta pemantauan dan pengawasan kawasan. Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan pemanfaatan potensi panas bumi berupa power plant pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTB) dan bangunan penunjangnya; sumur eksplorasi, sumur eksploitasi dan penunjangnya; jaringan pipa dan penunjangnya; pos pengawasan; serta kantor pengelola.



Gambar 2.8
Peta Wilayah Usaha Pertambangan Kabupaten Purbalingga

(6)Kawasan Peruntukan Industri

Penentuan lokasi industri di Kabupaten Purbalingga diarahkan pada pengembangan lokasi industri yang dapat menampung industri kecil, menengah dan besar. Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah diarahkan untuk menunjang industri kerajinan dan industri rumah tangga terutama yang

berbasis pada potensi setempat. Sedangkan industri besar diarahkan pada kawasan-kawasan tertentu.

Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain:

- 1) Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
- 2) Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
- 3) Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan; dan
- 4) Mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Tabel 2.3.
Kriteria Pemilihan Lokasi Industri

No	Kriteria Pemilihan Lokasi	Faktor Pertimbangan
1	Jarak ke Pusat Kota	Maksimal 15 – 20 Km
2	Jarak terhadap permukiman	Minimal 2 (dua) km
3	Jaringan jalan yang melayani	Arteri primer
4	Sistem jaringan yang melayani	Jaringan listrik Jaringan telekomunikasi
5	Prasarana angkutan	Tersedia pelabuhan laut / outlet (export /import)
6	Topografi / kemiringan tanah	Maks 0 - 15 derajat
7	Jarak terhadap sungai	Maks 5 (lima) km dan terlayani sungai tipe C dan D atau kelas III dan IV
8	Daya dukung lahan	Sigma tanah : 0,7 – 1,0 kg/cm ²
9	Kesuburan tanah	Relatif tidak subur (non irigasi teknis)
10	Peruntukan lahan	Non Pertanian Non Permukiman Non Konservasi
11	Ketersediaan lahan	Minimal 25 Ha
12	Harga lahan	Relatif (bukan merupakan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut)
13	Orientasi lokasi	Aksessibilitas tinggi Dekat dengan potensi Tenaga kerja
14	<i>Multiplier Effects</i>	Bangkitan lalu lintas= 5,5 smp/ha/hari. Kebutuhan lahan industri dan multipliernya = 2 x luas perencanaan KI. Kebutuhan rumah .(1,5 TK ~ 1 KK) <input type="checkbox"/> Kebutuhan Fasum – Fasos.

Sumber: Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 50/M/SK/1997 tentang Standar Teknis Kawasan Industri

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka untuk industri rumah tangga maupun industri kecil dan menengah memerlukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan kualitas usaha. Untuk industri rumah tangga/kecil dan menengah, lokasinya dapat tersebar di seluruh wilayah seperti industri kerajinan, pengolahan hasil pertanian dan makanan lainnya. Selain itu, dari industri rumah tangga/kecil tersebut diharapkan akan muncul keterkaitan ekonomi yang luas agar timbul dampak lanjutan yang positif, sehingga dapat menunjang perkembangan industri yang lebih besar. Sedangkan untuk industri besar perlu ditempatkan pada kawasan yang potensial bagi perkembangan dalam skala luas.

Pengaturan bagi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga sebaiknya disesuaikan dengan kriteria-kriteria di atas. Rujukan yang dapat dipakai dalam menentukan klasifikasi lokasi industri di antaranya Keputusan Kepala Bapedal No. 56 tahun 1994 tentang Pedoman mengenai ukuran Dampak Penting, serta Keputusan Meneg Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Dalam pengembangan aktivitas industri di Kabupaten Purbalingga perlu ada spesifikasi. Spesifikasi ini secara makro dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan terhadap teknologi, sumberdaya dan modal seperti :

1. Lokasi di kota besar (*citylocation*) untuk kota inti adalah industri yang membutuhkan :
 - Diperlukan tenaga kerja terampil dalam jumlah yang besar;
 - Proses produksi sangat tergantung pada fasilitas-fasilitas yang umumnya hanya terdapat di kota besar saja seperti listrik, gas, dll.;
 - Kontak dengan supplier dekat dan cepat; dan - Sarana transportasi dan komunikasi mudah didapatkan.
2. Lokasi di pinggir kota :
 - Semi-skilled atau female labor mudah diperoleh.
 - Menghindari pajak yang berat seperti halnya kalau lokasi yang terletak di kota besar;
 - Tenaga kerja dapat tinggal berdekatan dengan lokasi pabrik;
 - Rencana ekspansi pabrik dapat dengan mudah dibuat; dan
 - Populasi tidak begitu besar sehingga masalah lingkungan tidak banyak timbul.

Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 889,61 (delapan ratus delapan puluh sembilan koma enam satu) hektar meliputi :

1. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 18,69 (delapan belas koma enam sembilan) hektar;
2. Kecamatan Bojongsari seluas kurang lebih 8,75 (delapan koma tujuh lima) hektar;
3. Kecamatan Bukateja seluas kurang lebih 138,93 (seratus tiga puluh delapan koma sembilan tiga) hektar;
4. Kecamatan Kaligondang seluas kurang lebih 67,60 (enam puluh tujuh koma enam nol) hektar;
5. Kecamatan Kalimanah seluas kurang lebih 73,51 (tujuh puluh tiga koma lima satu) hektar;
6. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar;
7. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) hektar;
8. Kecamatan Kejobong seluas kurang lebih 4,78 (empat koma tujuh delapan) hektar;
9. Kecamatan Kemangkon seluas kurang lebih 485,03 (empat ratus delapan puluh lima koma nol tiga) hektar;
10. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 6,72 (enam koma tujuh dua) hektar;
11. Kecamatan Padamara seluas kurang lebih 32,42 (tiga puluh dua koma empat dua) hektar; dan
12. Kecamatan Purbalingga seluas kurang lebih 27,45 (dua puluh tujuh koma empat lima) hektar.

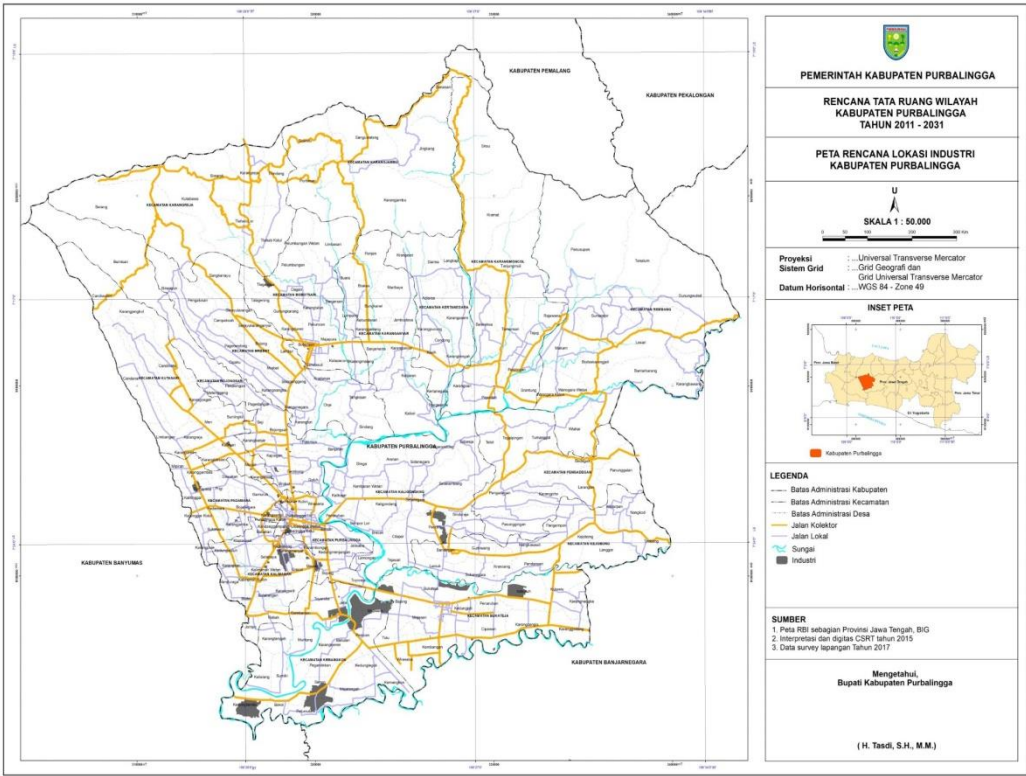
Selain pada kawasan peruntukan industri, untuk kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga dapat dilaksanakan pada kawasan peruntukan lain yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengelolaan kawasan peruntukan industri tergantung oleh jenis pengelompokkan industri yang akan dikelola. Selain itu, perlu juga disediakan sarana dan prasarana ke dan di kawasan yang akan dijadikan kawasan bagi peruntukkan industri, seperti prasarana jalan, listrik dan telepon, fasilitas air bersih untuk kegiatan industri, fasilitas pengolahan dan pembuangan limbah.

Pengelolaan limbah buangan hasil kegiatan industri (baik limbah cair atau limbah padat), yang bersifat B3 (berbahan bahaya dan beracun) harus diolah terlebih dahulu, sehingga kapasitas bahan B3 yang terkandung pada limbah berada di bawah ambang batas yang telah diperkenankan sebelum dibuang ke perairan umum.

Kegiatan industri, terutama yang menggunakan fasilitas penanaman modal (industri besar) yang berpotensi menimbulkan pencemaran tidak diperkenankan membangun industri di luar wilayah kawasan yang diperuntukkan bagi industri. Kegiatan industri menengah yang mengandung polusi dan industri besar diarahkan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri.

Pengembangan industri rumah tangga, kecil, menengah, dan pergudangan yang tidak menimbulkan polusi dan/atau limbah berbahaya dapat bercampur dengan kawasan permukiman dengan memperhatikan keserasian kawasan dan dukungan infrastruktur kawasan. Pengembangan industri melalui plasma industri yang tidak menimbulkan polusi dan/atau limbah berbahaya dapat bercampur dengan kawasan permukiman dengan memperhatikan keserasian kawasan dan dukungan infrastruktur kawasan. Pengembangan industri rumah tangga, kecil, dan pergudangan yang berpotensi mencemari lingkungan disatukan di kawasan peruntukan industri dan dilengkapi dengan dengan IPAL serta kawasan sabuk hijau.



Laporan Akhir

Gambar 2.9.
Peta Rencana Lokasi Industri Kabupaten Purbalingga

(7) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi (baik alam, ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya) yang dapat dikembangkan sebagai kawasan yang dapat dikunjungi. Kegiatan berwisata sebagai kebutuhan manusia bertujuan untuk mendapatkan ketenangan, rasa puas dan kesegaran kembali melalui suatu aktivitas dalam ruang dan waktu tertentu. Dengan konsep ini, maka kegiatan wisata harus memberikan pengalaman/experience baru bagi seseorang, sehingga kejenuhan yang dialami dalam keseharian akan bergeser ke kondisi yang segar/fresh baik secara fisik maupun psikis. Mengingat kegiatan wisata erat kaitannya dengan keberadaan tempat (*place*) dan ruang (*space*), maka untuk mendapatkan kesegaran dan kenikmatan dalam berwisata, seseorang seringkali harus melakukan perjalanan dalam rangka mencapai tujuan berwisata.

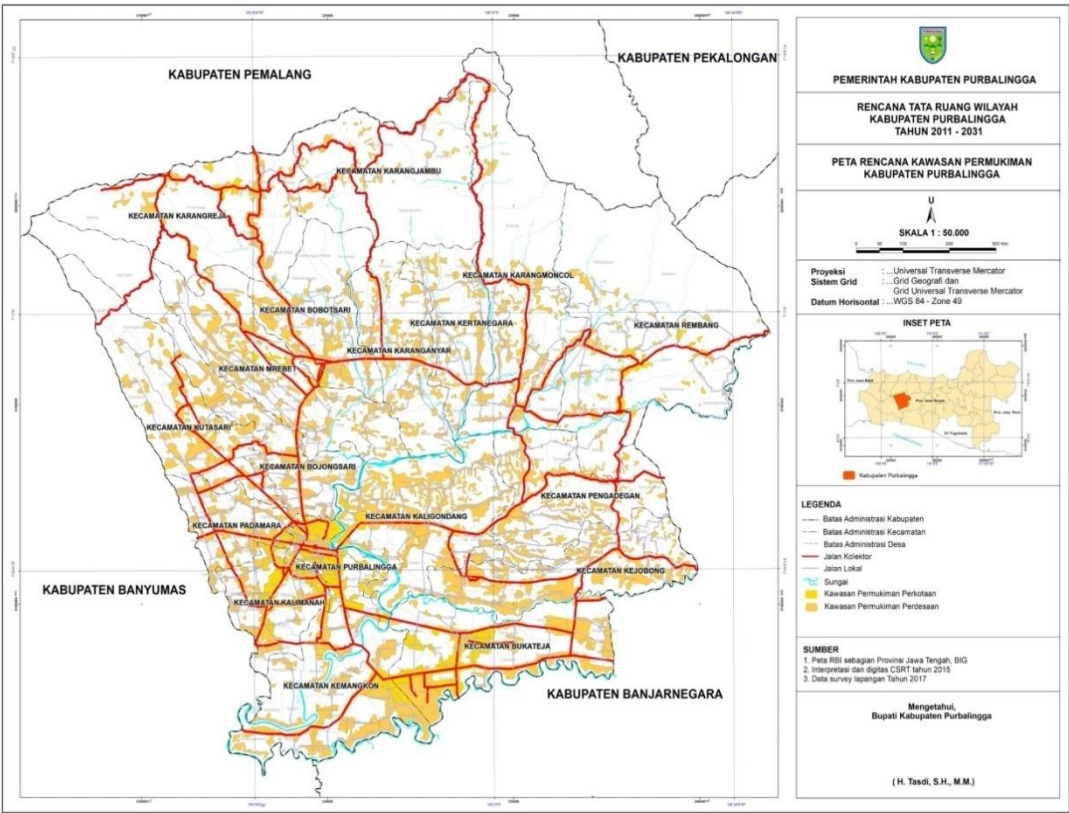
Sesuai dengan SK Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM. 98/PW. 1 02/MPPT.87, SK Dirjen Pariwisata KEP 18/4/11/88 tentang Kawasan Pariwisata ditetapkan dengan kriteria : keindahan alam dan panorama; masyarakat dan kebudayaan tinggi dan diminati oleh wisatawan; bangunan peninggalan budaya dan/atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi.

Lokasi pariwisata:

1. Pariwisata alam meliputi :
 - a. Pendakian Gunung Slamet;
 - b. Goa Lawa;
 - c. Agrowisata Serang; dan
 - d. Pariwisata alam lainnya.
2. Pariwisata budaya meliputi :
 - a. Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman yang berada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang;
 - b. Museum Profesor Soegardha Poerbakawatja yang berada di Kecamatan Purbalingga ;
 - c. Masjid Agung Darussalam yang berada di Kecamatan Purbalingga;
 - d. Situs cagar budaya yang berada di seluruh wilayah kabupaten;
 - e. Desa Wisata yang berbasis budaya; dan
 - f. Pariwisata budaya lainnya.
3. Pariwisata buatan meliputi :
 - a. Kolam Renang Tirto Asri Walik yang berada di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari;
 - b. Obyek Wisata Air Bojongsari (OWABONG) yang berada di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari;
 - c. Akuarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas yang berada di Desa Purbayasa Kecamatan Padamara; dan
 - d. Sanggaluri Park yang berada di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari.
 - e. Bumi Perkemahan Munjul Luhur di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari;
 - f. Pancuran Ciblon yang berada di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari; dan
 - g. Pariwisata buatan lainnya.

Kawasan pariwisata di Kabupaten Purbalingga dikelola oleh Pemerintah (Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata) bekerjasama dengan investor serta melibatkan masyarakat setempat. Dalam hal ini pemerintah berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana memadai guna memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke satu objek wisata serta melakukan promosi objek wisata yang terdapat di Kabupaten Purbalingga jika ada event pariwisata dan kebudayaan tingkat nasional.

Kegiatan yang diizinkan adalah kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, perniagaan dan pengawasan, dan pengelolaan kawasan. Jenis bangunan yang diizinkan adalah gardu pemandangan, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi dan olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi pariwisata.



Gambar 2.10.
Peta Rencana Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga

(8)Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan permukiman yaitu kawasan selain kawasan lindung sebagai tempat aktivitas manusia, sedangkan perumahan yaitu kawasan yang terdiri dari rumah-rumah dan merupakan permukiman yang sudah mempunyai fasilitas. Kawasan permukiman dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

a. Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah ruang yang diperuntukkan bagi pengelompokan permukiman penduduk dengan dominasi kegiatan non pertanian

(pemerintahan, perdagangan dan jasa dan lain lain) untuk menampung penduduk pada saat sekarang maupun perkembangannya di masa yang akan datang. Kawasan permukiman perkotaan berupa rumah individu dan real estate.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 6.914,70 (enam ribu sembilan ratus empat belas koma tujuh nol) hektar, tersebar di seluruh pusat pelayanan yang terkonsentrasi di PKWp, PKL, PKLp, dan PPK.

b. Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan adalah ruang yang diperuntukkan bagi pengelompokkan permukiman penduduk yang terikat dengan pola lingkungan pedesaan, yang dominasi usahanya adalah di bidang pertanian dan sarana prasarana pertanian.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 13.538,80 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh delapan koma delapan nol) hektar, tersebar di seluruh kabupaten di luar PKWp, PKL, PKLp, dan PPK.

Kawasan Peruntukan Permukiman ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan;
- Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.
- Menghindari pemakaian tanah pertanian subur atau beririgasi teknis.

Perencanaan luas tiap kawasan permukiman harus sesuai kebutuhan dan seoptimal mungkin sehingga tidak ada lahan yang terbuang yang mengakibatkan pengurangan bagi peruntukan lahan yang lain terutama pertanian.

Penempatan kawasan sebaiknya membentuk kelompok dan tidak berhubungan langsung dengan jalan utama untuk menghindari terbentuknya lorong pada jalan utama yang berdinding bangunan di kiri-kanannya, namun kemudahan mencapai sarana angkutan umum terdekat tetap perlu diperhitungkan. Pertimbangan ini juga bertujuan menambah faktor kenyamanan dan keamanan bagi pelaku aktivitas dan pemakai jalan.

Penetapan lokasi harus mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung, untuk kawasan perlindungan setempat, sekitar mata air harus memperhatikan faktor fisik litologi, bila kesarangan dan kelulusan air tinggi diusahakan potensi air tanah yang ada tidak terganggu yang pada akhirnya kondisi sumber air yang seharusnya dilindungi tetap terjaga walaupun kawasan permukiman dikembangkan di dekatnya.

Sumur resapan sampai saat ini dianggap salah satu solusi pelestarian sumber daya air tanah yang efektif, sebab mampu menjaga kedalaman muka air tanah dangkal dan memperkecil fluktuasi di musim penghujan - musim kemarau. Selain itu adanya sumur resapan akan mengurangi limpasan air permukaan (*runoff*) ke areal yang tidak diinginkan seperti pekarangan dan jalan. Sosialisasi dan perencanaan konstruksi sumur resapan perlu di lakukan pada kawasan permukiman.

Lahan kawasan terbuka hijau perlu di siapkan dan direalisasikan untuk tujuan estetika dan kenyamanan selain sebagai paru-paru dan areal resapan. Perencanaan dan pembangunan instalasi pengolah limbah air perlu dipertimbangkan pada suatu kawasan permukiman, akan lebih baik lagi bila mampu melakukan proses daur ulang sehingga air limbah dapat dipergunakan kembali, walaupun mengalami degradasi mutu dan kegunaan langkah tersebut merupakan upaya pelestarian sumber daya air yang sangat berarti.

Kebutuhan prasarana suatu kawasan permukiman (jalan, listrik, air, telepon, sistem sanitasi dan drainase dll.) perlu dipersiapkan dengan baik dan seoptimal mungkin sehingga kawasan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan mempermudah manusia yang beraktivitas di dalamnya dan tetap mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.

Perencanaan fasilitas sektor kegiatan yang akan di sediakan perlu memperhatikan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi atau potensi lokal tiap kota kecamatan, agar penyediaan fasilitas tidak menjadi optimal.

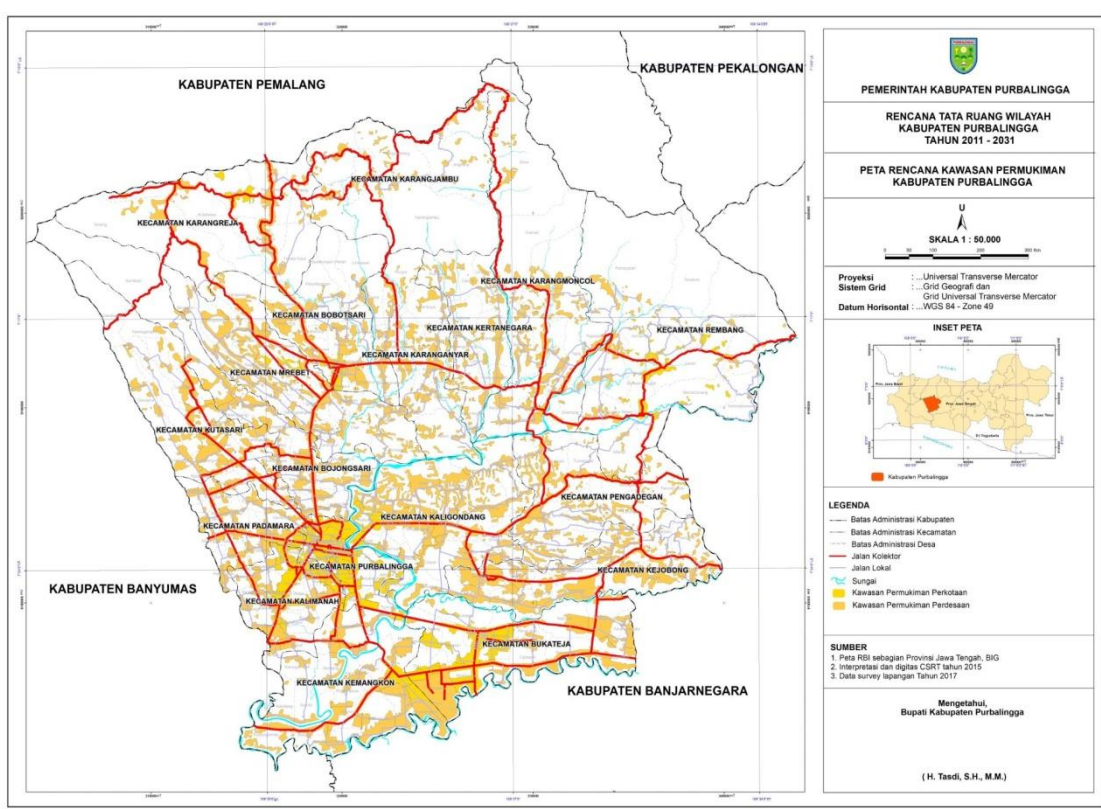
Penataan ruang tiap sektor kegiatan perlu memperhatikan tata letak dan aspek geometris sirkulasi sehingga teratur, efisien dan nyaman, pemberian izin mendirikan bangunan perlu memperhatikan keselarasan fungsi, desain, dan kebutuhan lahan.

Sistem permukiman Kabupaten Purbalingga diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Permukiman perdesaan akan menjadi penyeimbang pertumbuhan perkotaan, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara perdesaan dan perkotaan.
- 2) Permukiman perdesaan diarahkan menjadi tempat transformasi fungsi perkotaan kepada kawasan perdesaan dan menjadi pusat distribusi dan koleksi sumber daya yang diperlukan bagi pengembangan wilayah perdesaan.

3) Peningkatan penyediaan prasarana dan fasilitas pelayanan untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian dan pelayanan, memperkuat keterkaitan (linkage) sehingga terwujud pemerataan pembangunan.

Sedangkan pembangunan perumahan diarahkan agar lebih dapat berbentuk pola-pola kawasan terbangun yang menyebar, tidak terkonsentrasi di sepanjang jalur jalan. Pola permukiman intensif (bangunan bertingkat) perlu dikembangkan untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif. Dengan membentuk pola permukiman dan membentuk kantung-kantung unit lingkungan, akan mempermudah pengembangan struktur pelayanan fasilitas. Dengan demikian pemakaian, perawatan dan pemeliharaan prasarana yang ada dapat lebih efektif dan efisien.



Gambar 2.11.
Peta Rencana Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga

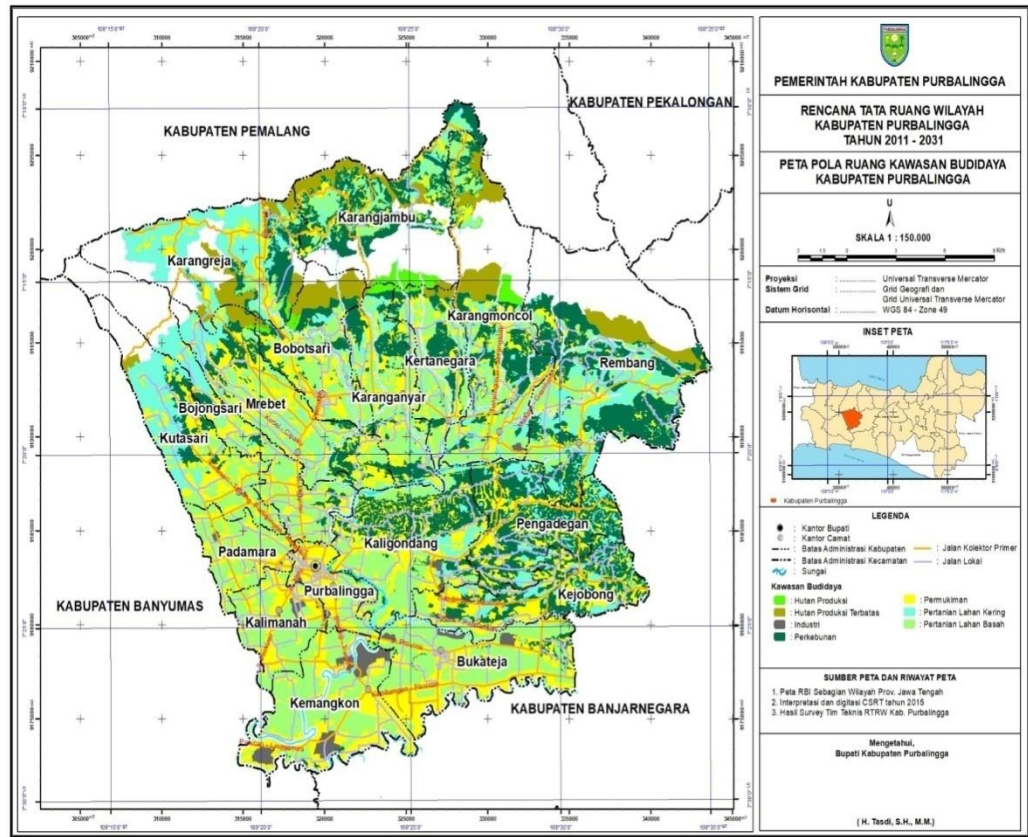
(9) Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan negara dan keamanan.

Lokasi :

- a. Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba Purbalingga yang meliputi Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Kemangkon;
- b. Bataliyon Infantri 406 Candrakusuma yang berada di Kecamatan Purbalingga;
- c. Instalasi militer yang berada di Kecamatan Bojongsari; dan
- d. Medan Latih Militer yang berada di Kecamatan Kutasari.

Perencanaan luas tiap kawasan khusus harus sesuai kebutuhan dan seoptimal mungkin mampu melayani dinamika masyarakat yang terus berkembang. Penempatan kawasan sebaiknya disesuaikan dengan jangkauan pelayanan yang akan ditangani. Hal ini untuk memenuhi kriteria jarak dan kemudahan informasi yang berkembang antara fasilitas dengan permukiman masyarakat.



Gambar 2.12.
Peta Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Purbalingga

I. Wilayah Rawan Bencana

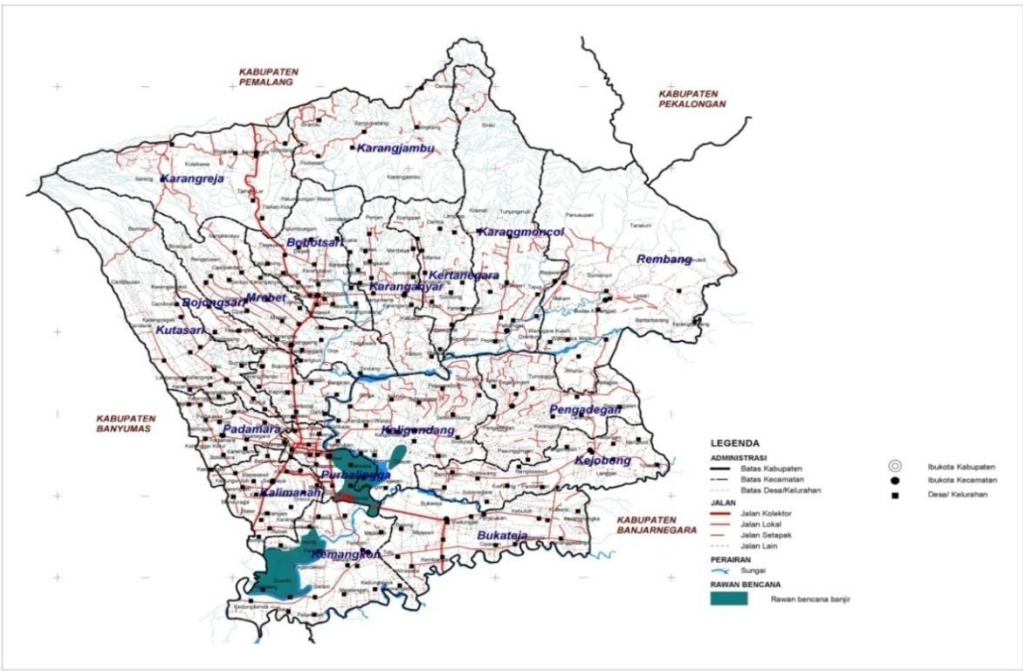
Di Kabupaten Purbalingga terdapat 5 (lima) lokasi kawasan rawan bencana alam, meliputi kawasan rawan bencana banjir; kawasan rawan bencana

tanah longsor; kawasan rawan bencana kekeringan; kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet; dan kawasan rawan bencana angin topan.

Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 12.245 hektar meliputi:

1. Desa Kalialang, Desa Muntang, Desa Sumilir, dan Desa Jetis yang berada di Kecamatan Kemangkon;
2. Desa Toyareja, Desa Jatisaba, dan Kelurahan Bancar yang berada di Kecamatan Purbalingga;
3. Desa Lamongan, Desa Penaruban, Desa Tejasari, dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
4. Desa Galuh dan Desa Banjaran yang berada di Kecamatan Bojongsari;
5. Desa Kaliori, Desa Margasana, dan Desa Kalijaran yang berada di Kecamatan Karanganyar;
6. Desa Bajong dan Desa Bukateja yang berada di Kecamatan Bukateja.

Wilayah rawan bencana banjir di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta di bawah ini.

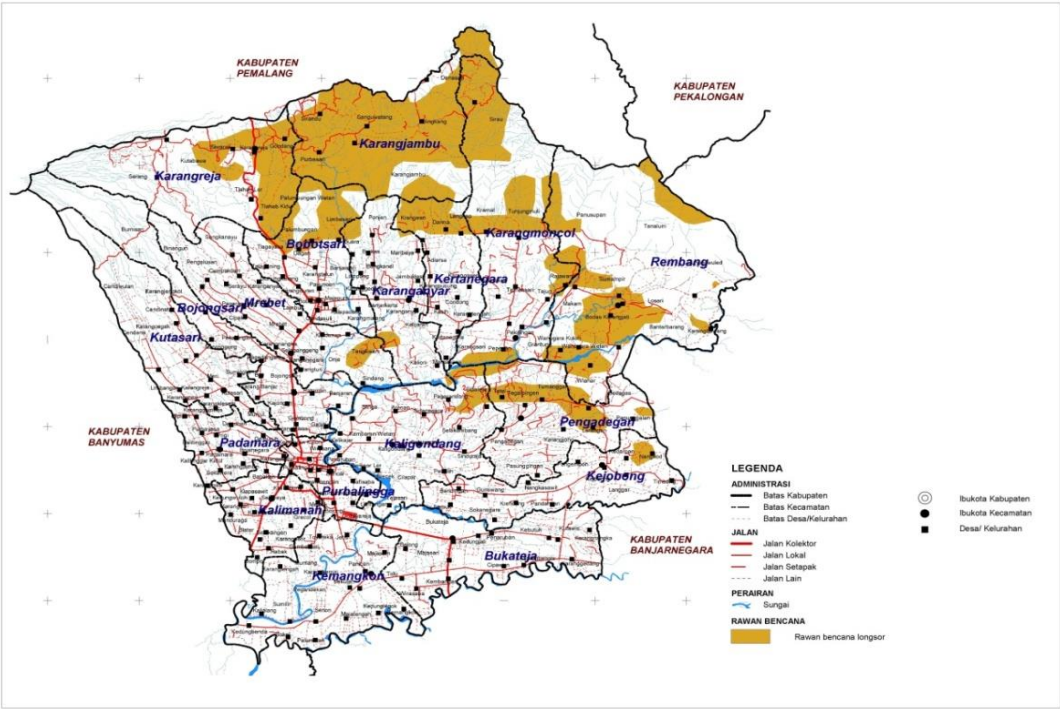


Gambar 2.13.
Peta Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana tanah longsor seluas 16.510 hektar, meliputi:

1. Desa Jetis, Desa Kedungbenda, dan Desa Pegandekan yang berada di Kecamatan Kemangkon;
2. Desa Sidareja dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
3. Desa Karangjambu, Desa Sirandu, Desa Sanguwatang, Desa Purbasari, Desa Jingkang, dan Desa Danasari yang berada di Kecamatan Karangjambu;
4. Desa Kaliori, Desa Kalijaran, Desa Maribaya, Desa Brakas, Desa Margasana, dan Desa Banjarkerta yang berada di Kecamatan Karanganyar;
5. Desa Kertanegara, Desa Adiarsa, Desa Darma, Desa Langkap, dan Desa Karangasem yang berada di Kecamatan Kertanegara;
6. Desa Banjaran yang berada di Kecamatan Bojongsari;
7. Desa Banjarsari dan Desa Karangmalang yang berada di Kecamatan Bobotsari;
8. Desa Sindang dan Desa Tangkisan yang berada di Kecamatan Mrebet;
9. Desa Wlahar, Desa Tanalum, Desa Bodaskarangjati, Desa Bantarbarang, Desa Wanogara Wetan, Desa Panusupan, Desa Gunungwuled, Desa Sumampir, Desa Makam, dan Desa Karangbawang yang berada di Kecamatan Rembang; dan
10. Desa Sirau, Desa Tajug, Desa Kramat, Desa Karangsari, dan Desa Pepedan berada di Kecamatan Karangmoncol.

Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta di bawah ini.



Gambar 2.14.
Peta Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana kekeringan seluas kurang lebih 29.044 hektar meliputi:

1. Desa Pengadegan, Desa Karangjoho, Desa Larangan, Desa Panunggalan, Desa Bedagas, Desa Tumanggal, Desa Tegalpingen, Desa Tetel, dan Desa Pasunggingan yang berada di Kecamatan Pengadegan;
2. Desa Langgar, Desa Timbang, Desa Nangkasawit, Desa Pandansari, Desa Pangempon, Desa Kejobong, Desa Gumiwang, Desa Krenceng, dan Desa Lamuk yang berada di Kecamatan Kejobong;
3. Desa Kalialang, Desa Muntang, Desa Sumilir, Desa Kedungbenda, Desa Bokol, Desa Pelumutan, Desa Majatengah, dan Desa Kedunglegok yang berada di Kecamatan Kemangkon;
4. Desa Slinga, Desa Arenan, Desa Sidanegara, Desa Pagerandong, Desa Sidareja, Desa Selakambang, Desa Sinduraja, dan Desa Kaligondang yang berada di Kecamatan Kaligondang;
5. Desa Sangkanayu, Desa Sindang, Desa Campakoah, Desa Pengalusan, dan Desa Binangun yang berada di Kecamatan Mrebet;
6. Desa Kalapacung, Desa Gunungkarang, dan Desa Banjarsari yang berada di Kecamatan Bobotsari;

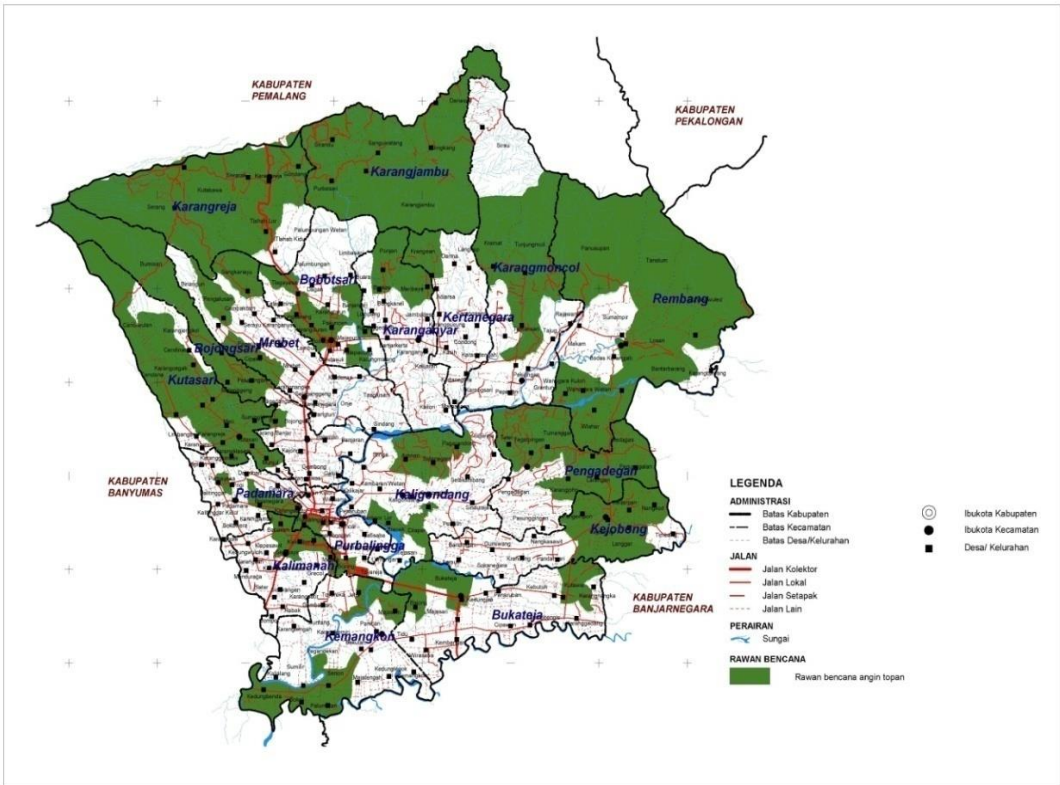
7. Desa Kutabawa, Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Karangreja, Desa Tlahab Lor, dan Desa Tlahab Kidul yang berada di Kecamatan Karangreja;
8. Desa Kaliori, Desa Banjarkerta, Desa Karanganyar, Desa Kalijaran, Desa Karanggedang, dan Desa Maribaya yang berada di Kecamatan Karanganyar;
9. Desa Langkap yang berada di Kecamatan Kertanegara;
10. Desa Bumisari, Desa Pekalongan, Desa Banjaran, Desa Metenggeng, dan Desa Pagedangan yang berada di Kecamatan Bojongsari;
11. Desa Wlahar dan Desa Bantarbarang yang berada di Kecamatan Rembang;
12. Desa Karangsari, Desa Pepedan, Desa Rajawana, Desa Tajug, Desa Pekiringan, dan Desa Tamansari yang berada di Kecamatan Karangmoncol.

Kawasan rawan bencana angin topan seluas kurang lebih 41.532 hektar meliputi:

1. Desa Kedungbenda, Desa Bokol, Desa Majasem, Desa Senon, Desa Pelumutan, dan Desa Jetis yang berada di Kecamatan Kemangkon;
2. Desa Pagerandong, Desa Sidanegara, Desa Arenan, Desa Sempor Lor, Desa Brecek, dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
3. Desa Karangreja, Desa Candinata, Desa Karangklesem, Desa Karangcegak, Desa Sumingkir, Desa Meri, Desa Kutasari, dan Desa Munjul yang berada di Kecamatan Kutasari;
4. Desa Pekalongan, Desa Beji, Desa Metenggeng, dan Desa Bumisari yang berada di Kecamatan Bojongsari;
5. Desa Banjarsari, Desa Tlagayasa, Desa Majapura, Desa Karangduren, Desa Kalapacung, Desa Pakuncen, dan Desa Gunungkarang yang berada di Kecamatan Bobotsari;
6. Desa Serang, Desa Kutabawa, Desa Karangreja, Desa Siwarak, Desa Tlahab Lor, dan Desa Gondang yang berada di Kecamatan Karangreja;
7. Desa Sanguwatang, Desa Purbasari, Desa Sirandu, Desa Karangjambu, Desa Jinkang, dan Desa Danasari yang berada di Kecamatan Karangjambu;
8. Desa Ponjen, Desa Krangean, Desa Langkap, Desa Kalijaran, Desa Brakas, dan Desa Maribaya yang berada di Kecamatan Karanganyar;
9. Desa Sangkanayu, Desa Pengalusan, dan Desa Cipaku yang berada di Kecamatan Mrebet;
10. Desa Kejobong, Desa Pangempon, Desa Langgar, Desa Nangkod, dan Desa Kedarpan yang berada di Kecamatan Kejobong;

- 11. Desa Tetel, Desa Tumanggal, Desa Bedagas, Desa Larangan, dan Desa Karangjoho yang berada di Kecamatan Pengadegan;
- 12. Desa Gunungwuled, Desa Losari, Desa Bantarbarang, Desa Wanogara Wetan, Desa Wlahar, Desa Tanalum, Desa Panusupan, dan Desa Wanogara Kulon yang berada di Kecamatan Rembang;
- 13. Desa Kramat, Desa Tunjungmuli, dan Desa Tamansari yang berada di Kecamatan Karangmoncol;
- 14. Desa Purbayasa, Desa Bojanegara, dan Kelurahan Karangsantul yang berada di Kecamatan Padamara;
- 15. Desa Bukateja, Desa Bajong, dan Desa Kutawis yang berada di Kecamatan Bukateja; dan
- 16. Kelurahan Kalikabong, Kelurahan Karangmanyar, Kelurahan Mewek, Desa Selabaya, dan Desa Babakan yang berada di Kecamatan Kalimanah.

Kawasan rawan bencana angin topan di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta diberikut ini.



Gambar 2.15.
Peta Rawan Bencana Angin Topan

Kawasan rawan bencana letusan Gunung Berapi Slamet seluas kurang lebih 8.015 hektar meliputi:

- d. Jalan Bumisari – Pekalongan – Pagedangan – Bojongsari;
- e. Jalan Binangun – Cipaku – Karangnangka – Mangunegara – Selaganggeng;
- f. Jalan Pengalusan – Campakoah – Pagerandong – Mrebet – Selaganggeng;
- g. Jalan Pengalusan – Campakoah – Serayu Larangan;
- h. Jalan Kutabawa – Serang – Sangkanayu – Serayu Larangan;
- i. Jalan Serayu Larangan – Bojong – Selaganggeng; dan
- j. Jalan Kutabawa – Karangreja – Bobotsari – Selaganggeng.

Sedangkan ruang evakuasi bencana alam sebagai tempat untuk penanganan tanggap darurat atas kejadian bencana diarahkan pada daerah aman sekitar kawasan rawan bencana meliputi :

- a. Titik kumpul, yang meliputi :
 - 1. Balai Desa Cendana Kecamatan Kutasari;
 - 2. Balai Desa Candinata Kecamatan Kutasari;
 - 3. Balai Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari;
 - 4. Balai Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari;
 - 5. Balai Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari;
 - 6. Balai Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari;
 - 7. Balai Desa Binangun Kecamatan Mrebet;
 - 8. Balai Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet;
 - 9. Balai Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet;
 - 10. Balai Desa Serang Kecamatan Karangreja; dan
 - 11. Balai Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja;
- b. Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang meliputi :
 - 1. Lapangan Desa Meri Kecamatan Kutasari; dan
 - 2. Lapangan Desa Serayu Larangan Kecamatan Mrebet.
- c. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang meliputi :
 - 1. Bumi Perkemahan Munjulluhur Desa Kutasari Kecamatan Kutasari
 - 2. Lapangan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari
 - 3. Lapangan Kecamatan Mrebet di Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet; dan
 - 4. Lapangan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari.

2.1.2. Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Purbalingga pada akhir tahun 2017 sebanyak 916.427 jiwa, terdiri dari 452.723 laki-laki dan 463.704 perempuan. Dengan proporsi tersebut maka rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Purbalingga

sebesar 98 persen. Sedangkan banyaknya rumah tangga mencapai 228.973 atau rata- rata anggota per rumah tangga 4,00 orang.

Apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, setiap km² lahan di Purbalingga rata-rata dihuni sekitar 295 rumahtangga. Dengan rata-rata setiap rumah tangga terdiri atas empat orang anggota rumahtangga, maka dalam setiap km² wilayah Purbalingga memiliki kepadatan penduduk sekitar 1.178 jiwa.

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin pada Tahun 2017 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Penduduk Kabupaten Purbalingga menurut Kecamatan dan
Jenis KelaminTahun 2016 - 2017

No	Kecamatan	2016			2017		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Kemangkon	27.282	28.388	55.670	27.543	28.671	56.214
2.	Bukateja	34.531	35.228	69.759	34.862	35.571	70.433
3.	Kejobong	21.884	23.193	45.077	22.096	23.427	45.523
4.	Pengadegan	18.447	19.050	37.497	18.631	19.244	37.875
5.	Kaligondang	28.446	30.672	59.118	28.714	30.973	59.687
6.	Purbalingga	28.861	30.483	59.344	29.119	30.768	59.887
7.	Kalimanah	26.469	27.174	53.643	26.701	27.415	54.116
8.	Padamara	20.858	21.867	42.725	21.034	22.060	43.094
9.	Kutasari	29.270	29.562	58.832	29.516	29.818	59.334
10.	Bojongsari	29.896	29.567	59.463	30.150	29.825	59.975
11.	Mrebet	34.569	35.259	69.828	34.907	35.616	70.523
12.	Bobotsari	24.670	25.063	49.733	24.889	25.295	50.184
13.	Karangreja	20.884	20.969	41.853	21.092	21.186	42.278
14.	Karangjambu	12.613	12.390	25.003	12.740	12.529	25.269
15.	Karanganyar	17.968	18.606	36.574	18.165	18.260	36.425
16.	Kertanegara	15.636	16.016	31.652	15.809	16.217	32.026
17.	Karangmoncol	26.014	26.168	52.182	26.312	26.505	52.817
18.	Rembang	30.121	29.979	60.100	30.443	30.324	60.767
	Jumlah	448.419	459.088	907.507	452.723	463.704	916.427

Sumber: Purbalingga Dalam Angka 2018, BPS Kabupaten Purbalingga

Selama kurun waktu 5 tahun, meski kecil laju pertambahan penduduk Purbalingga mengalami peningkatan, dari 0,32 persen pada tahun 2013 menjadi 0,98 persen pada tahun 2017. Namun demikian, pertumbuhan penduduk tersebut masih cukup tinggi. Bila dilihat dari Angka kelahiran dan kematian (CBR dan CDR) dari tahun ke tahun mengalami pergerakan yang sulit untuk diterka, sepanjang tahun 2015 s/d 2017 angka kelahiran (CBR) berada pada posisi yang seragam yaitu 15,09, hal ini menjelaskan bahwa dalam 1000 penduduk ada sekitar 15 kelahiran. Sedangkan untuk angka kematian (CDR) selama tahun 2013 s/d 2017 juga stagnan di angka 6 yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa dari 1000 penduduk terjadi 6 peristiwa kematian.

Dari tahun 2014 hingga 2016, ketergantungan penduduk yang tidak/ belum produktif sedikit menurun. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan penduduk yang berusia produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak produktif. Pada tahun 2016, dari setiap seratus penduduk berusia produktif, harus menanggung sekitar 52 penduduk yang tidak produktif.

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, pada saat ini menggunakan tahun dasar 2010.

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga sedikit demi sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Walaupun demikian kategori Pertanian masih memegang peranan yang cukup besar di Kabupaten Purbalingga, tercatat hingga 2017 peranannya masih bertengger di 27,27 persen. Peranan terbesar selanjutnya di isi oleh kategori C, Industri Pengolahan yang berada pada kisaran 26,85 persen. Peranan terendah terjadi pada kategori D, Pengadaan Listrik dan Gas hingga 2017 hanya memberikan peran sebesar 0,05 persen.

Tabel 2.5.
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha harga berlaku
Kabupaten Purbalingga (persen) Tahun 2013 - 2017

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.83	29.45	29.28	29.53	27,27
B.	Pertambangan dan Penggalian	4.63	4.80	5.04	4.86	4,62
C.	Industri Pengolahan	24.81	25.60	25.86	26.33	26,85
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0.05	0,05
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.12	0.11	0.11	0.10	0,10
F.	Konstruksi	5.72	5.72	5.72	5.76	5,94
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.27	12.70	12.41	12.41	12,65
H.	Transportasi dan Pergudangan	2.98	3.06	3.19	3.15	3,32
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.21	2.24	2.25	2.36	2,33
J.	Informasi dan Komunikasi	1.64	1.58	1.52	1.53	1,65
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.25	2.17	2.19	2.29	2,30
L.	Real Estate	1.04	1.04	1.05	1.06	1,06
M,N.	Jasa Perusahaan	0.16	0.16	0.16	0.17	0,18
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.98	2.87	2.84	2.84	2,79
P.	Jasa Pendidikan	5.57	5.60	5.52	5.67	5,89
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.97	1.02	1.02	1.05	1,08
R,S,T,U.	Jasa lainnya	1.78	1.84	1.77	1.86	1,90
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : PDRB menurut Lapangan Usaha Kab. Kabupaten Purbalingga 2013-2017

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2017 mencapai 5,12 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 dengan pertumbuhan 4,78 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 12,39 persen. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014, sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016. Secara lebih jelas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana dalam table berikut ini.

Tabel 2.6.
Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Purbalingga Tahun 2013- 2017

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016 ^(*)	2017 ^(**)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.54	1.03	5.03	2.53	2.53
B.	Pertambangan dan Penggalian	6.02	1.58	0.55	0.22	0.22
C.	Industri Pengolahan	7.46	7.80	6.01	5.64	5.64
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	8.26	6.39	2.35	6.75	6.75
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.25	3.44	1.62	2.10	6.25

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
F.	Konstruksi	4.86	4.41	6.01	7.63	8.43
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.89	4.73	4.19	4.91	6.18
H.	Transportasi dan Pergudangan	8.94	8.45	8.37	5.56	6.31
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.19	7.59	6.46	5.79	6.46
J.	Informasi dan Komunikasi	5.98	12.69	8.77	8.35	12.39
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.98	3.68	7.50	8.97	4.84
L.	Real Estate	9.59	7.09	7.52	6.73	6.08
M,N.	Jasa Perusahaan	12.88	7.60	8.34	10.42	8.74
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.29	0.75	5.30	2.39	1.97
P.	Jasa Pendidikan	9.36	9.16	7.56	7.70	8.06
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.59	11.28	6.53	9.70	8.75
R,S,T,U.	Jasa lainnya	9.23	8.53	3.23	8.53	8.70
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Catatan : *) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Sumber : PDRB menurut Lapangan Usaha Kab. Kabupaten Purbalingga 2013-2017

Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu kategori usaha jasa kesehatan dan kegiatan social sebesar 8,75 persen, diikuti kategori jasa perusahaan tumbuh sebesar 8,74 persen, jasa lainnya tumbuh sebesar 8,70 Persen, konstruksi tumbuh sebesar 8,43 persen, jasa pendidikan tumbuh sebesar 8,06 persen, pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 6,75 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 6,46 persen, transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 6,31 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 6,25 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami pertumbuhan sebesar 6,18 persen, real estate tumbuh sebesar 6,08 persen, industri pengolahan tumbuh sebesar 5,64 persen, diikuti lapangan usaha yang lain yang mengalami pertumbuhan dibawah 5 persen.

B. PDRB Perkapita

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.7.
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Rp.) 2012– 2016

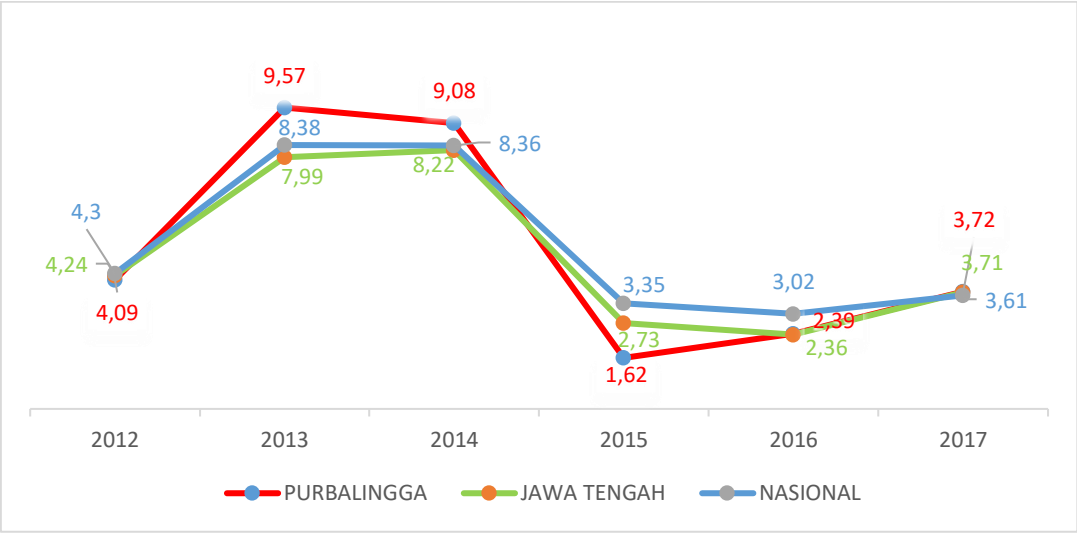
TAHUN	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	Pertahun	Perbulan	Pertahun	Perbulan
2012	15.124.204	1.260.350	13.650.758	1.137.563
2013	16.463.493	1.371.958	14.222.935	1.185.245
2014	18.325.478	1.527.123	14.763.255	1.230.271
2015	20.103.882	1.675.323	15.414.074	1.284.506
2016	21.532.057	1.794.338	15.991.385	1.332.615

Sumber : PDRB menurut Lapangan Usaha Kab. Kabupaten Purbalingga 2012-2016

Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 21.532.057 rupiah atau sebesar 1.794.338 rupiah dalam satu bulan, dengan pertumbuhan sebesar 7,1 persen. Selama kurun waktu lima tahun pertumbuhan PDRB perkapita terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 11,31 persen, dan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2016 sebesar 7,10 persen. Jika diperhitungkan dengan harga konstan dari tahun 2012 - 2016, pertumbuhan pendapatan perkapita berada pada kisaran 3 hingga 5 persen setiap tahunnya. Hal ini berarti pada kenyataannya masyarakat Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatannya meningkat rata-rata kurang dari 5 persen setiap tahun. Berbeda padaperhitungan atas dasar harga berlaku yang memperhatikan adanya perubahan harga (inflasi), rata-rata setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pendapatan perkapitabertambah siktar 10 persen.

C. Laju Inflasi

Perkembangan inflasi tahun kalender setiap tahunnya, tren perubahan yang terjadi di Purbalingga, Jawa Tengah serta nasional menunjukkan pola yang hampir sama. Pada tahun 2017 inflasi Kabupaten Purbalingga berada pada 3,72 persen diatas inflasiprovinsi dan nasional yang masing-masing sebesar 3,61 dan 3,71 persen.

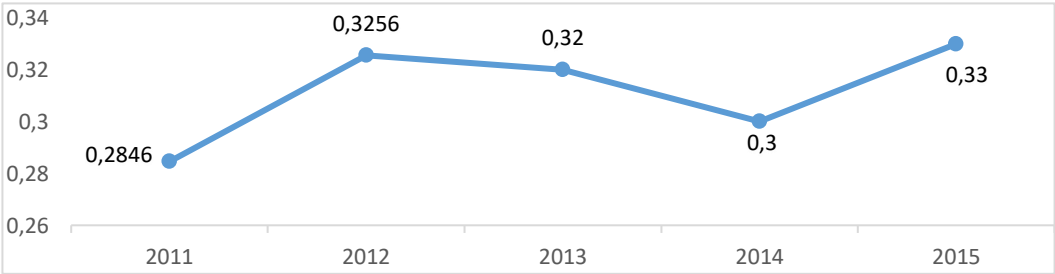


Sumber: BPS, 2018

Gambar 2.17.
Laju Inflasi Tahun Kalender Kabupaten Pubalingga Tahun 2012-2017

D. Indeks Gini

Pada tahun 2015 Gini Ratio Kabupaten Purbalingga adalah 0,33 yang artinya ketimpangan cukup rendah atau pemerataan cukup tinggi karena masih dibawah 0,35. Sementara itu gini ratio untuk Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 0,365 pada tahun 2015. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2011-2015

Gambar 2.18.
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2015

E. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Pada tahun 2015, distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Purbalingga tergolong merata pada ketimpangan rendah. Hal tersebut ditunjukkan sebesar 20,01 persen pendapatan dinikmati oleh 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah, sebesar 35,74 persen oleh 40 persen masyarakat berpenghasilan menengah dan sebesar 44,24 persen oleh 20 persen masyarakat berpenghasilan tinggi. Data dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.8.
Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Purbalingga
Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2013 – 2015

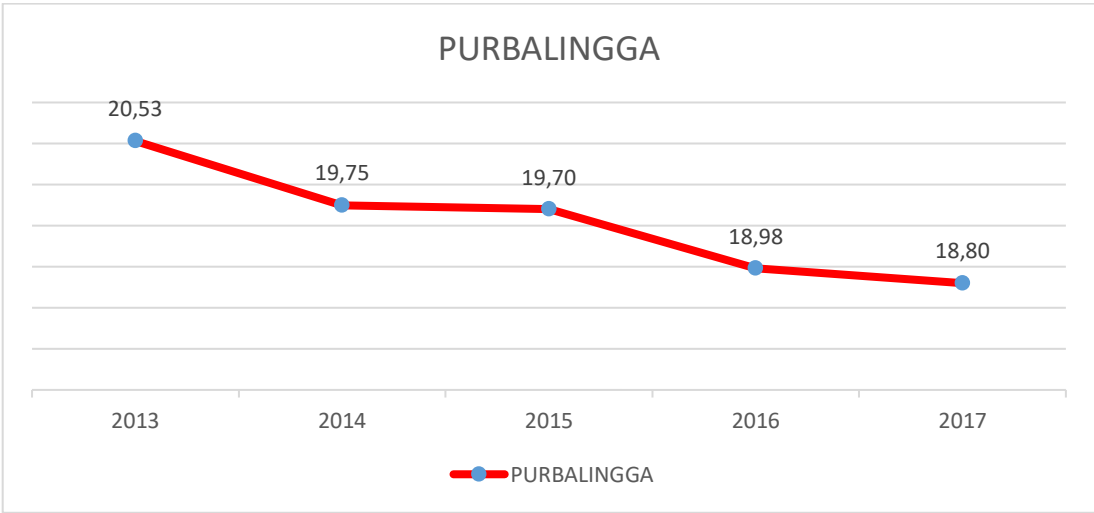
Kriteria Bank Dunia	2013	2014	2015
- 40 % rendah	21,02	22,57	20,01
- 40 % sedang	37,44	37,11	35,74
- 20 % tinggi	41,54	40,32	44,24

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, 2013-2015

F. Penduduk Miskin dan IPM

1. Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 sebesar 18,80 persen, menurun dari tahun 2015 sebesar 19.70 persen dan 2016 sebesar 18.98 persen. Kinerja penurunan persentase penduduk miskin tahun 2013 sampai dengan 2017 di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam tabel di bawah ini.



Gambar 2.19.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga
Tahun 2013-2017

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 sebesar 171.880 jiwa (18,80 persen), dengan garis kemiskinan sebesar Rp 313.343,- perkapita perbulan. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 176.490 jiwa (19,70 persen) maka jumlah penduduk miskin telah menurun sekitar 0,9 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten

Purbalingga masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar 13,01 persen (Maret 2017) dan Nasional sebesar 10,12 persen (September 2017). Kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.9.
Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga, 2013-2017

Karakteristik Kemiskinan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penduduk miskin (ribu)	181,1	176,04	176,49	171,78	171,88
Persentase penduduk miskin (%)	20,53	19,75	19,70	18,98	18,80
Garis kemiskinan (Rp/kp/bln)	265.262	275.022	283.366	301.862	313.343

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2013-2017)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga walaupun semakinmenurun namun masih tergolong cukup besar. Upaya penanggulangan kemiskinan tentunya perlu ditingkatkan melalui berbagai program yang mengarah pada pemenuhan hak dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi serta pangan; perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Diharapkan dengan adanya program-program yang *pro poor* dapat mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin secara signifikan.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. IPM Purbalingga pada rentang 60 hingga 70, yang artinya berada pada klasifikasi sedang. Meskipun begitu, IPM Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2012-2016. Pada tahun 2012, IPM Kabupaten Purbalingga mencapai 64,94 meningkat menjadi 65,53 pada tahun 2013. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2014 dan 2015 dimana masing-masing capaian IPM mencapai 66,23 dan 67,03 serta pada tahun 2016 mencapai 67,48 dan tahun 2017 mencapai 67,72. Perkembangan IPM Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini :

Tabel 2.10.
Nilai IPM Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya Tahun 2015-2017

Kabupaten	Nilai IPM		
	2015	2016	2017
Cilacap	67,77	68,60	68,90
Banyumas	69,89	70,49	70,75
Purbalingga	67,03	67,48	67,72
Banjarnegara	64,73	65,52	65,86
Kebumen	66,87	67,41	68,29
Jawa Tengah	69,49	69,98	70,52

Sumber: Purbalingga Dalam Angka 2016-2018, BPS Kabupaten Purbalingga

Nilai IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2017 tercatat 67,72. Walaupun nilai ini masih dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 70,52 bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IPM Kabupaten Purbalingga masih berada di atas Kabupaten Banjarnegara tetapi masih dibawah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.

Kualitas kesehatan masyarakat Purbalingga secara bertahap terus mengalami peningkatan. Berdasarkan capaian usia harapan hidup Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 72.81 pada tahun 2015 meningkatn menjadi 72.86 pada tahun 2016 dan di tahun 2017 menjadi 72,91.

Mutu pendidikan penduduk Kabupaten Purbalingga juga mengalami peningkatan apabila dilihat berdasarkan meningkatnya capaian kinerja RLS dari 6,85 tahun menjadi 6,86 tahun. Secara rata-rata penduduk Purbalingga telah dapat mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP/ sederajat. Meskipun RLS hanya sampai SLTP namun anak-anak pada awal masa pendidikan yaitu usia 7 tahun memiliki harapan bersekolah lebih lama. Hal ini ditunjukkan dengan capaian HLS Kabupaten Ppurbalingga pada tahun 2016 sebesar 11,93 tahun dan tahun 2017 sebesar 11,94.

Aspek ekonomi pada IPM diukur dengan menggunakan indikator pengeluaran perkapita penduduk, yang pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar Rp 8,938 juta menjadi Rp 9,159 juta rupiah per kapita per tahun pada tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi 9,340 juta.

Perkembangan indikator komposit IPM Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini:

Tabel 2.11.
Komponen IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2017

Komponen IPM	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,81	72,86	72,91
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,78	11,93	11,94
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,85	6,86	6,87
Pengeluaran perkapita disesuaikan : 96 komoditas (ribu rupiah PPP)	8.938	9.159	9.340

Sumber : Statistik Daerah Kab. Purbalingga, BPS Kabupaten Purbalingga.2016-2018

G. Angka Melek Huruf

Melek Huruf adalah kondisi dimana orang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab/hijaiyah atau huruf lainnya (contoh huruf jawa, kanji). Yang dimaksud kalimat sederhana adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan setidaknya mengandung subyek dan predikat.

Angka Melek Huruf menunjukkan persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis. Kondisi ini berkebalikan dengan angka buta huruf. Semakin tinggi angka melek huruf maka semakin rendah angka buta hurufnya.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa angka melek huruf penduduk berumur 15 tahun ke atas Kabupaten Purbalingga tahun 2017.

Tabel 2.12.
Persentase Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

Angka Melek Huruf	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Buta Huruf
Laki-laki	94,84	50,14	16,87	4,69
Perempuan	90,76	49,79	16,62	8,58

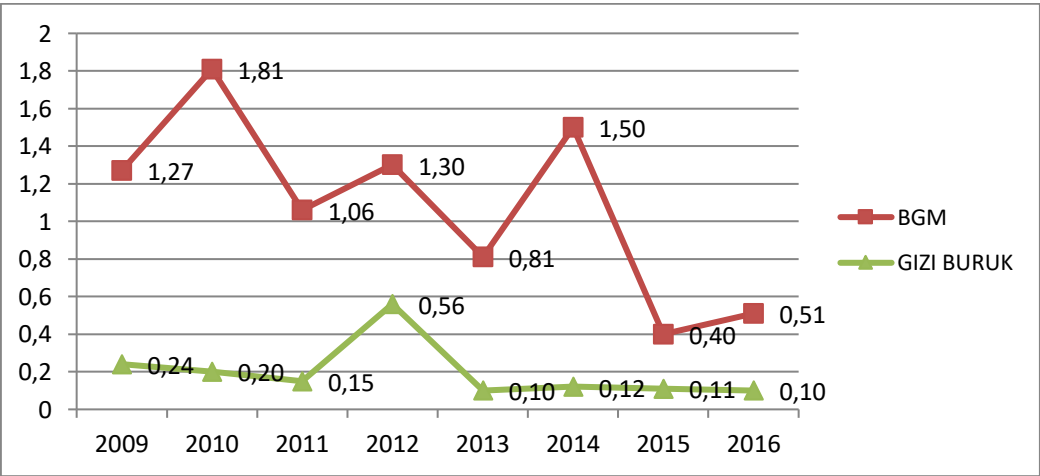
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Purbalingga 2017,
Badan Pusat Statistik Kab. Purbalingga

Kemampuan membaca huruf Latin penduduk Kabupaten Purbalingga untuk laki-laki sebesar 94,84 persen dan perempuan 90,76 dengan persentase buta huruf untuk laki-laki sebesar 4,69 persen dan perempuan 8,58 persen. Di samping itu, berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa angka melek huruf

penduduk perempuan lebih rendah dari angka melek huruf penduduk laki-laki. Hal ini sejalan dengan tingkat pendidikan laki-laki yang secara umum lebih baik dari perempuan yaitu persentase penduduk laki-laki yang menamatkan pendidikannya di jenjang SD ke atas yang lebih banyak dari penduduk perempuan.

H. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah dengan pengukuran *antropometri* yang menggunakan indeks Berat Badan dan Tinggi Badan (BB/TB).Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2012-2017 cenderung fluktuatif, dari 0,11 % pada Tahun 2012, naik lagi menjadi 0,81 % pada tahun 2013, dan mengalami penurunan menjadi 0,13 % pada Tahun 2014, serta 0,11 % pada tahun 2015. Pada tahun 2016 sebesar 0,10 % (58 kasus) dan pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 0,08 % (58 kasus) dan semuanya telah mendapatkan penanganan. Penurunan tersebut terjadi karena berbagai upaya telah dilakukan diantaranya melalui pemberian makanan tambahan dan perawatan kepada balita gizi buruk. Tren BGM (BB/U) dan Gizi Buruk (BB/TB) Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana dalam gambar grafik berikut ini.

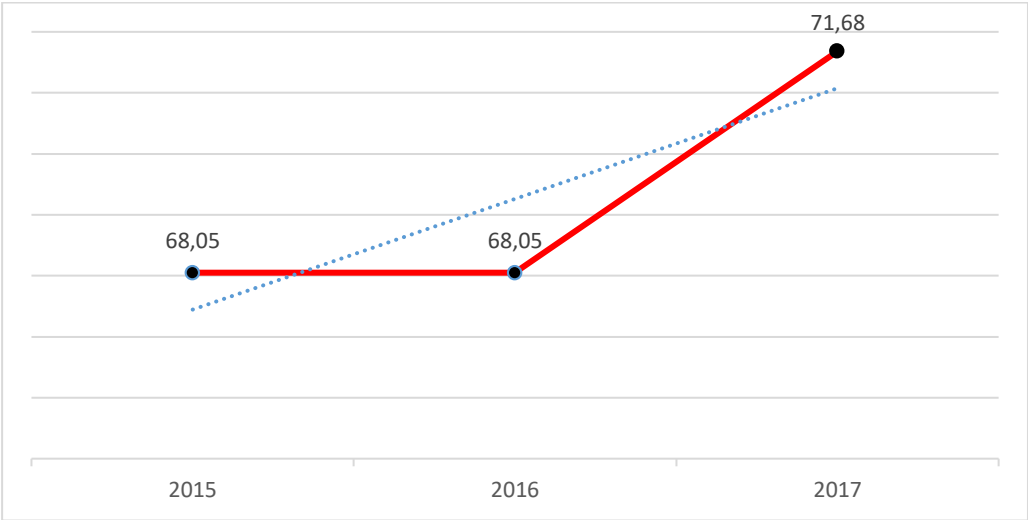


Gambar 2.20.
Tren BGM dan Gizi Buruk Tahun 2009-2016

I. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purbalingga dari tahun 2015 s/d 2017 selalu cenderung mengalami kenaikan. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour*

supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian, begitu pula sebaliknya. Pada tahun 2017 TPAK Purbalingga sebesar 71,68 ini berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas tersedia 71 orang yang siap bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 s/d 2017 sebagaimana dalam grafik berikut ini.



Gambar 2.21.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Purbalingga, 2015 -2017

J. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran secara tidak langsung dapat memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kesehatan ekonomi suatu negara, karena tingkat pengangguran merupakan persentase individu yang ingin bekerja dan belum memiliki pekerjaan. Capaian tingkat pengangguran terbuka kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sebesar 4,84 persen dan pada tahun 2017 sebesar 5,33 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Oleh karena itu, indikator TPT selalu diumumkan setiap tahun pada Pidato Presiden tanggal 16 Agustus sebagai bukti kinerja Pemerintah Indonesia. Purbalingga sendiri pada tahun 2017 memiliki TPT sebesar 5,33 persen yang berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas (angkatan kerja) ada sekitar 5 orang yang menganggur.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah penduduk adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka ini dihitung berdasarkan perbandingan antara anak yang sekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibagi dengan penduduk umur yang seharusnya anak duduk pada tingkat pendidikan tertentu. APK Kabupaten Purbalingga menurut tingkat pendidikan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2017

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2015	2016	2017
SD/MI	118,77	112,87	104,69
SMP/MTs	85,08	90,74	92,69

Sumber : Purbalingga Dalam Angka2018, BPS Kab. Purbalingga

Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, APK SD mengalami penurunan dari 118,77 pada tahun 201 5menurun menjadi 112,87 pada tahun 2016 dan 104,69 pada tahun 2017. APK SD berada diatas 100 persen yang artinya jumlah penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SD lebih besar dibandingkan jumlah penduduk kelompok umur 7-12 tahun. Hal ini disebabkan adanya siswa yang berumur diatas 12 tahun tetapi saat ini masih bersekolah di tingkat SD dikarenakan kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Selain itu, juga adanya siswa yang lebih muda dibanding umur standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah diumur yang lebih muda (kurang dari 7 tahun).

Untuk APK SMP selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan yaitu dari 85,08 pada tahun 2015 menjadi 90,74 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 92,69.

Jika dilihat menurut jenis kelamin pada tahun 2016, APK SD, SMP, dan SMA untuk laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah di seluruh jenjang pendidikan bagi kaum laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.

Tabel 2.14.
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
SD	101,18	108,26	104,69
SMP	98,43	87,16	92,69

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Purbalingga 2017, Badan Pusat Statistik Kab. Purbalingga

b. Angka Partisipasi Murni

Ukuran lainyang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah penduduk adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan proporsi anak sekolah di suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka ini dihitung dengan perbandingan antara jumlah murid umur tertentu pada pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok umur pendidikan yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Purbalingga dari tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.15.
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Purbalingga, 2015-2017

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	2015	2016	2017
SD	98,06	97,01	95,51
SMP	79,50	75,80	78,91

Sumber : Purbalingga Dalam Angka 2018, BPS Kebudayaan Kab. Purbalingga, 2018

Pada tabel di atas terlihat bahwa APM Kabupaten Purbalingga tahun 2017 untuk tingkat Sekolah Dasar adalah 95,51; untuk SMP adalah 78,91. Dari

data ini dapat disimpulkan bahwa untuk APM SD 95,34 menunjukkan bahwa sebanyak 95,51 persen penduduk usia 7-12 tahun yang saat ini sedang bersekolah di SD. Hal ini menandakan bahwa penduduk Kabupaten Purbalingga sudah tepat waktu dalam menyekolahkan anak-anaknya ke SD setelah anak berumur 7 tahun. APK SMP 78,91 artinya ada sebanyak 78,91 persen penduduk usia 13-15 tahun yang saat ini sedang sekolah di SMP. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.16.
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
SD	95,23	95,80	95,51
SMP	80,74	77,14	78,91

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Purbalingga 2017, Badan Pusat Statistik Kab. Purbalingga

Untuk kondisi tahun 2017 pada tingkat pendidikan SD dan SMP, APM SD perempuan 95,80 menunjukkan bahwa dari seluruh perempuan 7-12 tahun, yang sedang bersekolah di tingkat SD sebanyak 95,80 persen. Sedangkan laki-laki yang berumur 7-12 tahun sebanyak 95,23 persen sedang bersekolah di tingkat SD. APM SMP perempuan 77,14 menunjukkan bahwa 77,14 persen dari perempuan umur 13-15 tahun sedang bersekolah di SMP, sementara 80,74 persen laki-laki umur 13-15 tahun yang sedang bersekolah di SMP.

c. Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu indikator lain untuk mengetahui tingkat pendidikan adalah angka partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara penduduk yang bersekolah pada kelompok umur tertentu tanpa memperhatikan jenjang pendidikannya. APS untuk kelompok umur 7–12 tahun diperoleh dari persentase jumlah penduduk umur 7–12 tahun yang masih bersekolah dibagi dengan jumlah penduduk umur 7–12 tahun. Demikian juga untuk kelompok umur sekolah berikutnya.

APS Kabupaten Purbalingga tahun 2017 untuk kelompok umur sekolah 7–12 tahun tercatat 98,81. Ini artinya bahwa pada jenjang sekolah dasar (umur 7-12 tahun) terdapat sebanyak 93,48 persen penduduknya sedang bersekolah atau dengan kata lain masih terdapat 5,41 persen penduduk umur 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Untuk kelompok umur sekolah 13-15 tahun terdapat 93,48 persen penduduknya yang statusnya masih atau sedang bersekolah, sedangkan pada kelompok umur sekolah 16-18 tahun ada sebanyak 39,03 persen penduduknya yang tidak sedang bersekolah. Ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu belum pernah bersekolah atau sudah tidak bersekolah lagi. Semakin tinggi kelompok umur sekolah maka partisipasi sekolahnya makin kecil.

Tabel 2.17.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2017

Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7-12 tahun	99,30	98,74	99,13	98,87	99,22	98,81
13-15 tahun	91,62	91,80	93,91	95,10	92,82	93,48
16-18 tahun	75,61	60,91	58,10	61,04	67,51	60,97

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Purbalingga 2017, Badan Pusat Statistik Kab. Purbalingga

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum pada kelompok umur sekolah 7-12 tahun dan 16-18 tahun, APS tahun 2017 sedikit lebih tinggi dari APS tahun 2016 atau tingkat partisipasi sekolahnya mengalami kenaikan. Sementara itu pada kelompok umur sekolah 13-15 tahun, APS 2017 mengalami penurunan dibandingkan APS 2016 pada kelompok umur sekolah yang bersesuaian.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, pola yang digambarkan antara penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah penduduk perempuan pada tahun 2017 lebih rendah dari penduduk laki-laki di kelompok umur sekolah 7-12 tahun dan 16-18 tahun. Sedangkan pada kelompok umur 13-15 tahun, partisipasi sekolah perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

Pada tabel di atas tercatat, di kelompok umur 7-12 tahun partisipasi sekolah laki-laki 98,74 dan partisipasi sekolah perempuan 98,87. Partisipasi sekolah untuk laki-laki di kelompok umur 13-15 tahun sebesar 91,80, sedangkan partisipasi sekolah untuk perempuan sebesar 95,10. Sementara itu, di kelompok umur 16-18 tahun partisipasi sekolah laki-laki sebesar 60,91 dan partisipasi sekolah perempuan sebesar 61,04.

d. Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah.

Sejalannya dengan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA mengalami perubahan. Pada jenjang SD/MI pada tahun 2012 tersedia SD / MI sebanyak 648 unit dan pada tahun 2016tetap berjumlah 646 unit. Sedangkan pada jenjang SMP / MTs pada tahun 2012 terdapat 111 unit sekolah pada tahun 2016 menjadi 114 unit sekolah karena terdapat pendirian beberapa sekolah baru.

Tabel 2.18.
Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga
Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah SD/MI	646	647	647	644	647
2	Jumlah SMP/MTs	112	114	114	115	114
3	Jumlah SMA/ SMK/ MA	49	53	53	55	56
3	Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 th	98.306	91.069	91.990	91.247	91.247
4	Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 th	48.406	45.027	45.473	44.510	44.510
5	Jumlah penduduk usia 16 s.d 18 th	43.081	43.267	44.328	44.783	44.511

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah SD/MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun, pada kurun waktu tahun 2012-2016, rasio tersebut mengalami peningkatan dari 66.09 menjadi 70.91. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa rasio ketersediaan SD/MI di Kabupaten Purbalingga cukup memadai. Untuk SMP/MTs, dalam kurun waktu 2012-2016 mengalami peningkatan dari 23.23 menjadi 25,61 per 10.000 siswa. Data rasio ketersediaan sekolah selengkapnya tertuang dalam Tabelberikut ini.

Tabel 2.19
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk
Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Purbalingga
Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio SD/MI per 10.000 penduduk Usia 7-12 tahun	66,10	65,81	70,72	70,23	70,91
2	Rasio SMP/MTs per 10.000 penduduk Usia 13-15 tahun	23,23	23,34	24,87	25,29	25,61
3	Rasio SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun	11,37	12,25	11,96	12,28	12,58

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

e. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah pendidik dan jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai proses pembelajaran yang berkualitas.

Pada periode waktu tahun 2012-2017, rasio guru terhadap murid SD/MI di Kabupaten Purbalingga meningkat dari 18,09 menjadi 18,77, yang menggambarkan ketersediaan guru belum memenuhi kondisi ideal. Kondisi berbeda pada jenjang SMP/MTs, yaitu rasio menurun dari 16,51 pada tahun 2012 menjadi 19,66 pada tahun 2017.

Pada tahun 2012 rasio guru SMA/SMK/MA terhadap siswa naik dari 15,40 menjadi 46,9 pada tahun 2017. Meskipun demikian rasio tersebut tetap menunjukkan kondisi ketersediaan guru terhadap siswa cukup memadai. Permasalahannya adalah belum terwujudnya distribusi guru khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Perkembangan rasio guru dan murid di Kabupaten Purbalingga selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20.
Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2017

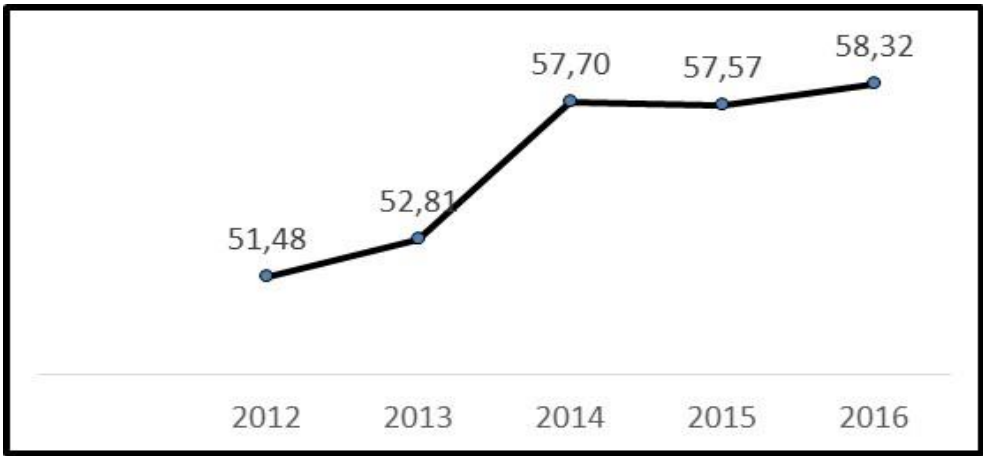
No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	SD/MI						
	Jumlah guru	5.412	6.317	6.883	5.868	5.839	5.291
	Jumlah murid	97,888	98,306	91,069	91,990	91,247	99.292
	Rasio	18,09	15,56	13,23	15,68	15,63	18,77
II	SMP/MTs						
	Jumlah guru	2.630	2.343	2.407	2.436	2.416	2.263
	Jumlah murid	43.412	45.818	45.333	45.381	44.672	44.487
	Rasio	16,51	19,56	18,83	18,63	18,49	19,66
III	SMA/SMK/MA						
	Jumlah guru	1.561	1.423	1.681	1.769	1.827	680
	Jumlah murid	24.045	26.720	27.998	29.869	33.029	31.896
	Rasio	15,40	18,782	16,66	16,88	18,08	46,9

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017 dan Purbalingga Dalam Angka. 2018

f. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam mempersiapkan anak-anak Indonesia, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. PAUD mempersiapkan pendidikan anak sejak dini sehingga tumbuh kembang anak dan perkembangan emosional dan juga psikomotorik anak menjadi tarpantau dan terbina. PAUD mendidik anak menjadi insan yang berkualitas di kemudian hari.

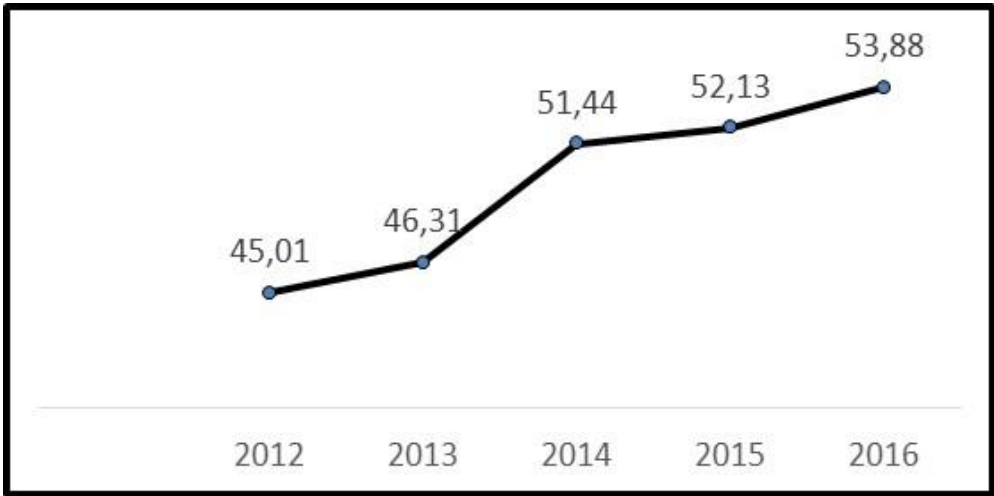
Keberhasilan kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar. Capaian APK dan APM PAUD APK Kabupaten Purbalingga tahun 2012 – 2016 fluktuatif, namun cenderung meningkat. Pada tahun 2012 capaian APK PAUD sebesar 51,48 persen, dan meningkat menjadi 58,32 persen pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja lembaga PAUD dan juga tingkat kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD. Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Prubalingga dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

Gambar 2.22.
Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Purbalingga
Tahun 2012-2016

APM Kabupaten Purbalingga tahun 2012 – 2016 terus meningkat. Pada tahun 2012 capaian APM PAUD sebesar 45,01 persen, dan meningkat menjadi 53,88 persen pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja lembaga PAUD dan juga tingkat kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD. Hal tersebut sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

Gambar 2.23.
Angka Partisipasi Murni PAUD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

g. **Angka Putus Sekolah**

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB) dan menengah (SMA/SMK/MA) pada tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi. Pada jenjang SD/MI, tahun 2012 sebesar 0,65 persen (681 anak) dan menurun menjadi 0,32 persen (325 anak). Selanjutnya untuk jenjang SMP/MTs, angka putus sekolah pada tahun 2012 sebesar 0,29 persen (129 anak) dan menjadi 0,44 persen (199 anak) pada tahun 2016. Selanjutnya untuk jenjang SMA sederajat, angka putus sekolah tahun 2012 sebesar 0,29 persen (68 anak) dan pada tahun 2016 menjadi 0,79 persen (236 anak). Angka putus sekolah di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.21.
Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Jenjang	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI/SDLB	0,65	0,24	0,22	0,24	0,32
2	SMP/MTs/SMPLB	0,29	0,70	0,91	0,61	0,44
3	SMA/SMK/MA	0,29	0,96	0,80	0,77	0,79

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

h. **Angka Kelulusan**

Angka kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian Angka Kelulusan pada tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi. Angka kelulusan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2012-2016 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.22.
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

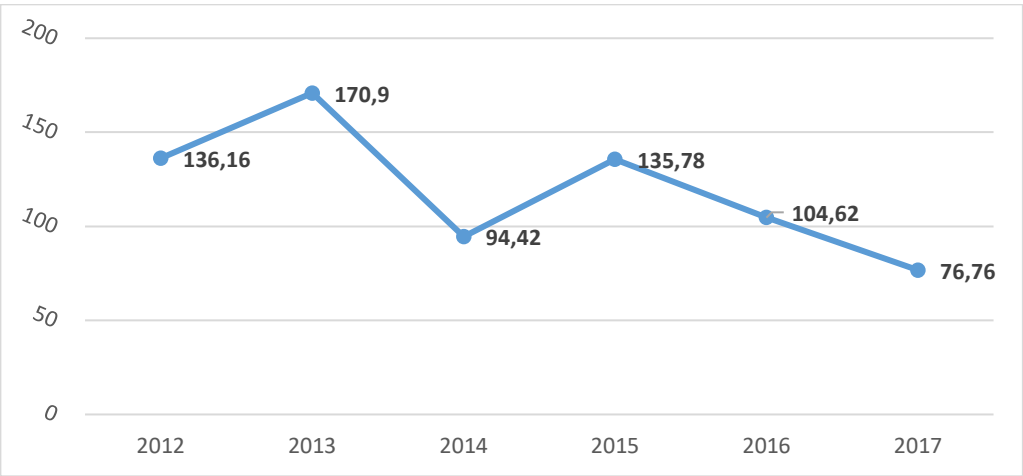
No	Jenjang	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI/SDLB	99,61	99,91	99,97	99,99	99,70
2	SMP/MTs/SMPLB	99,48	99,96	99,99	99,75	99,45
3	SMA/SMK/MA	99,52	99,90	99,97	99,96	99,96

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, 2017

2. Kesehatan

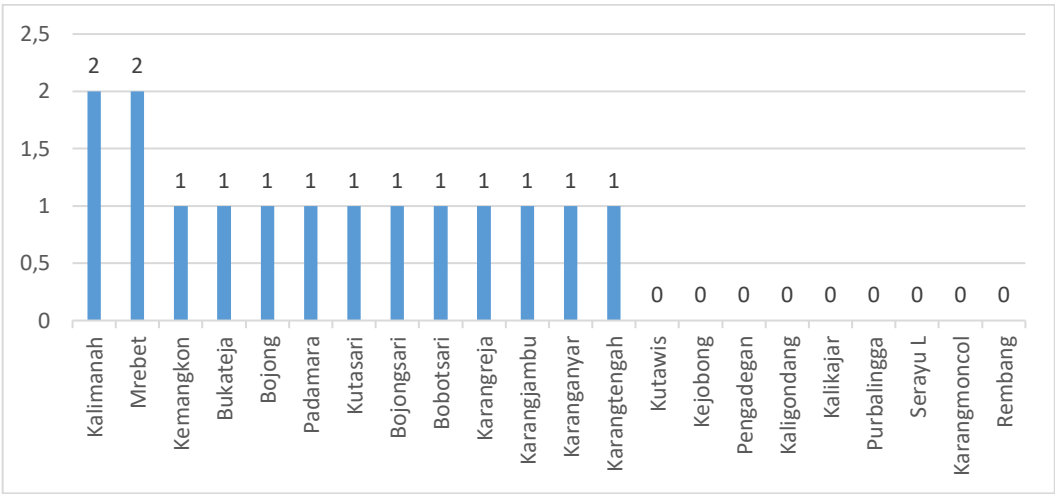
a. Kasus/ Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian ibu di Kabupaten Purbalingga tahun 2017 sebesar 76,76 per 100.000 kelahiran hidup (11 kasus). Dibanding dengan tahun 2016 dimana Angka Kematian Ibu sebesar 104,62 per 100.000 kelahiran hidup (15 kasus), angka kematian ibu tahun 2017 mengalami penurunan cukup signifikan. Secara lebih jelas grafik angka kematian ibu di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2012 sampai dengan 2017 sebagaimana dalam table berikut ini.



Gambar 2.24.
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Purbalingga
dalam 5 tahun terakhir 2012 – 2017

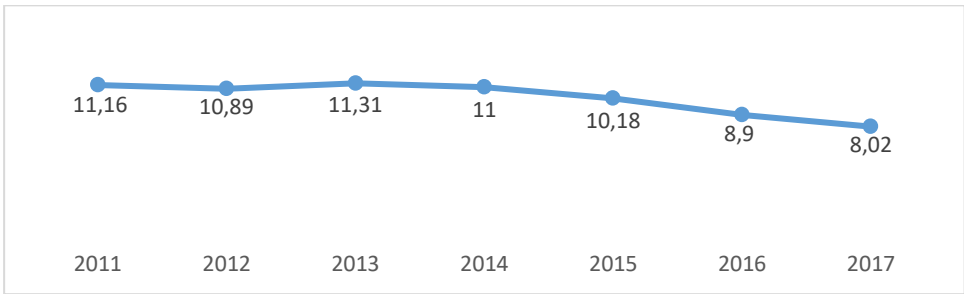
Kasus kematian Ibu tertinggi pada tahun 2016 terdapat di Puskesmas Kalimanah dan Mrebet masing-masing dengan 2 kasus kematian dan terendah di Puskesmas Bukateja, Kutawis, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang, Kalikajar, Purbalingga, Serayu Larangan dan Rembang masing-masing 0 kasus (tidak ada kasus kematian). Sedangkan waktu kejadian kematian ibu maternal terjadi pada saat hamil sejumlah 6 kasus, saat bersalin sejumlah 7 kasus dan saat nifas sejumlah 2 kasus. Grafik kasus kematian ibu di Puskesmas wilayah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam table berikut ini.



Gambar 2.25.
Jumlah Kematian Ibu menurut Puskesmas
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan AKB di Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2012-2017 mengalami perbaikan. AKB di Kabupaten Purbalingga tahun 2012, 2013 dan 2014 secara berturut-turut sebesar 182 kasus, 172 kasus dan 162 kasus. Pada tahun 2015 AKB turun menjadi 149 kasus atau 10,18 per 1.000 KH, tahun 2016 menjadi 129 kasus atau 8,9 per 1.000 kelahiran hidup, dan terakhir kembali menurun pada tahun 2017 menjadi sebanyak 115 kasus atau 8,02 per 1.000 kelahiran hidup. Namun demikian, angka tersebut masih cukup tinggi disebabkan antara lain kehamilan resiko tinggi, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil sehingga menyebabkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), kelainan *konginental* pada bayi dan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tren Angka Kematian Bayi dalam enam tahun terakhir di Kabupaten Purbalingga sebagaimana gambar di bawah ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga. 2017

Gambar 2.26.
Tren Angka Kematian Bayi 2011 – 2017

c. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (AKN) merupakan jumlah kematian bayi umur kurang dari 28 hari (0-28 hari) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKN menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk *antenatal care*, pertolongan persalinan, dan *postnatal* ibu hamil. Semakin tinggi angka kematian neonatal, berarti semakin rendah tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tabel 2.23.
AKN Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya Tahun2016

Kabupaten	Angka Kematian Neonatal
Cilacap	4,43
Banyumas	5,03
Purbalingga	5,86
Banjarnegara	10,04
Kebumen	5,55
Jawa Tengah	6,94

Sumber: Purbalingga Dalam Angka 2017, BPS Kabupaten Purbalingga

Angka Kematian Neonatal Kabupaten Purbalingga tahun 2016 tercatat 5,86. Walaupun nilai ini masih di atas Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Kebumen. Namun bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, AKN Kabupaten Purbalingga berada di bawah AKN Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 6,94.

d. Angka Kesakitan

Keadaan kesehatan penduduk pada suatu saat dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk pada umumnya. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, status kesehatan memberikan pengaruh pada tingkat produktivitas. Untuk mengetahui tingkat kesehatan masyarakat dengan melihat persentase keluhan kesehatan yang dialami pendudukpada satu bulan sebelum pencacahan atau angka kesakitan. Untuk seseorang yang mengalami dua keluhan pada saat yang bersamaan dihitung satu untuk masing-masing keluhan.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa sebanyak 16,71 persen penduduk di Kabupaten Purbalingga telah mengalami keluhan kesehatan mulai dari panas, batuk, pilek, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan lain-lain.Ini berarti bahwa pada satu bulan sebelum pencacahan ada sebanyak 16,71 persen penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami gangguan

kesehatan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Purbalinggapada tahun 2017 sedikit mengalami penurunan. Artinya kondisi kesehatan masyarakat Purbalingga tahun 2017 mengalami peningkatan.

Tabel 2.24
Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga, 2015- 2017

Rincian	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
Angka Kesakitan 2015	19,50	19,03	19,26
Angka Kesakitan 2016	16,52	17,30	16,91
Angka Kesakitan 2017	16,56	16,86	16,71

Sumber : Statistik Kesra Kabupaten Purbalingga, 2017

Jika dilihat menurut jenis kelamin pada tahun 2017, laki-laki dan perempuan yang mengalami keluhan kesehatan tidak terlalu jauh berbeda yaitu laki-laki 16,56 persen dan perempuan 16,86 persen. Perempuan sedikit lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan laki-laki.

Kondisi yang agak berbeda terjadi pada tahun 2015 dimana perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih sedikit dibandingkan laki-laki yaitu perempuan 19,03 persen sementara laki-laki 19,50 persen. Namun secara umum kondisi di tahun 2017 lebih baik dibanding tahun 2015.

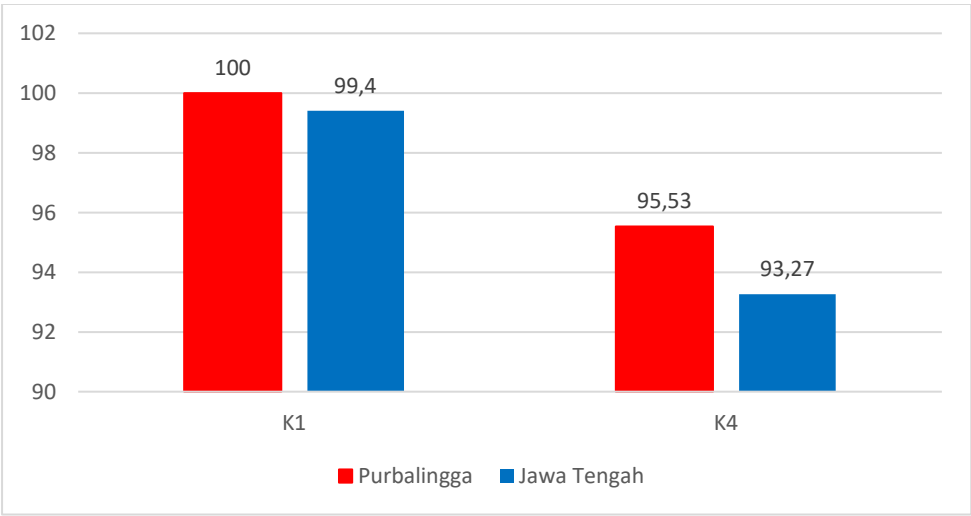
e. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4

Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu) dan minimal 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu-lahir). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor resiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kebidanan.

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan pelayanan antenatal pertama kali

oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang telah dianjurkan, dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Gambaran cakupan K1 dan K4 Kabupaten Purbalingga dengan Jawa Tengah sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Gambar 2.27.
Cakupan K1 dan K4 Kabupaten Purbalingga dan Jawa Tengah Tahun 2016

f. Lamanya Terganggu

Untuk melihat tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk, maka dapat dilihat dari lamanya hari terganggu. Lama terganggu merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai intensitas keluhan kesehatan (penyakit) yang dirasakan oleh masyarakat. Menurunnya angka kesakitan tidak dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan yang lebih baik, jika tidak diikuti dengan menurunnya rata-rata lama terganggu. Semakin lama (hari) terganggu, maka keluhan kesehatan yang dialami masyarakat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas.

Pada tahun 2017, kisaran rata-rata lama terganggu berada di bawah 8 hari dengan persentase terbanyak di bawah 4 hari yaitu sekitar 58,63 persen dan 4 – 7 hari sebesar 27,53 persen dari penduduk yang terganggu kesehatannya. Hal ini dapat mengindikasikan secara umum bahwa penyakit yang banyak diderita penduduk adalah penyakit-penyakit ringan sehingga tidak memakan waktu yang lama dalam proses penyembuhannya.

Tabel di bawah dapat menunjukkan distribusi penduduk yang sakit yaitu yang mempunyai keluhan kesehatan sampai mengakibatkan pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari terganggu di tahun 2016 dan 2017 menurut lamanya hari terganggu.

Tabel 2.25.
Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit
Menurut Lamanya Terganggu dan Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga, 2016-2017

Lamanya Sakit (Hari)	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+ Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 4	49,74	60,22	54,33	57,11	52,12	58,63
4 – 7	34,50	22,51	33,20	32,32	33,82	27,52
8 – 14	5,61	6,43	3,36	4,68	4,44	5,54
15 - 21	3,04	3,84	2,66	0,94	2,85	2,36
22 - 30	7,11	7,00	6,45	4,95	6,77	5,95
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Purbalingga Dalam Angka, BPS Purbalingga 2018

Pada rata-rata lama terganggu di bawah 4 hari, pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan tahun 2016 yaitu di tahun 2017 sebesar 58,63 persen dan di 2016 sebesar 52,12 persen. Sedangkan untuk rata-rata lama terganggu 4-7 hari, tahun 2016 sebesar 33,82 persen lebih banyak dibandingkan di tahun 2017 yang sebesar 27,52 persen.

Pada lama terganggu 8 - 30 hari yang biasanya adalah penyakit berat dan menahun, tahun 2016 lebih sedikit dibandingkan tahun 2017 yaitu di tahun 2016 sebesar 4,44 persen dan di tahun 2017 sebesar 5,54 persen. Begitu pula untuk rata-rata lama terganggu 22-30 hari, di tahun 2016 lebih banyak yaitu sebesar 6,77 persen dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 5,95 persen.

g. **Pemanfaatan Fasilitas dan Sarana Kesehatan**

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan, sehingga penduduk dapat mengaksesnya dengan mudah tanpa mengalami kesulitan.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, serta kualitas pelayanan. Salah satu indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan.

Tabel dibawah ini menyajikan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan. Penduduk yang berobat jalan pada tahun 2016 tercatat 57,85 persen, meningkat dibanding tahun 2015 yang tercatat sebanyak 55,01 persen.

Tabel 2.26.
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Berobat Jalan dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga, 2015 – 2016

Rincian	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+ Perempuan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Berobat Jalan (%)	52,94	57,16	56,98	58,46	55,01	57,85
Tidak berobat jalan (%)	47,06	42,84	43,02	41,54	44,99	42,15

Sumber : *Evaluasi Ekonomi dan Kesra Kabupaten Purbalingga, 2016*

Berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa perempuan memiliki kecenderungan berobat jalan ke fasilitas kesehatan bila mengalami gangguan kesehatan dibandingkan laki-laki. Tercatat 58,46 persen dari kaum perempuan yang berobat jalan sedangkan pada kaum laki-laki hanya 57,16 persen yang berobat jalan pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 masih terdapat 42,15 persen penduduk yang tidak berobat jalan. Kemungkinan yang dilakukan masyarakat adalah mengobati sendiri penyakitnya atau merasa tidak perlu untuk mengobati penyakitnya. Untuk itu perlu diketahui alasan apa saja yang menjadi penyebab masyarakat tidak berobat jalan. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi

berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Dengan semakin membanjirnya obat-obatan yang beredar bebas di pasaran dan semakin gencarnya promosi atau iklan obat di media cetak maupun elektronik serta semakin meningkatnya pendidikan dan pengetahuan, sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengatasi penyakitnya. Masyarakat cenderung mengobati sendiri penyakitnya dengan cara mengkonsumsi obat yang dibeli dari apotik ataupun toko obat terutama untuk penyakit-penyakit ringan.

Dari tabel dibawah terlihat bahwa sebagian besar penduduk yang tidak berobat jalan memilih untuk mengobati sendiri penyakitnya yaitu tercatat 50,13 persen dengan rincian laki-laki 49,69 persen dan perempuan 50,52 persen.

Tabel 2.27.
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan
Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga, 2016

Alasan Tidak Berobat Jalan	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak punya biaya berobat	1,01	0,57	0,78
Tidak ada biaya transport	0,00	0,47	0,24
Waktu tunggu pelayanan lama	0,96	0,73	0,84
Mengobati sendiri	49,69	50,52	50,13
Tidak ada yang mendampingi	0,00	0,91	0,48
Merasa tidak perlu	46,87	45,16	45,97
Lainnya	1,47	1,64	1,56
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Evaluasi Ekonomi dan Kesra Kabupaten Purbalingga, 2016

Selain itu alasan utama lain penduduk sehingga tidak berobat jalan adalah karena merasa tidak perlu untuk diobati penyakitnya sebanyak 45,97 persen dengan rincian laki-laki 46,87 persen dan perempuan 45,16 persen. Walaupun persentasenya cukup rendah, masih ada penduduk yang tidak berobat jalan dengan alasan tidak punya biaya berobat, tidak ada biaya transport, tidak ada sarana transport dan lainnya.

Salah satu indikator lain pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan. Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan (tempat

pengobatan) yang banyak dikunjungi penduduk adalah tenaga kesehatan medis seperti praktek dokter/bidan/ klinik/praktek dokter bersama/ UKBM (58,39 persen), puskesmas/pustu (36,62 persen), rumah sakit pemerintah (3,31 persen), dan rumah sakit swasta (3,87 persen). Untuk pengobatan non medis seperti praktek pengobatan tradisional/alternatif dan lainnya persentasenya sangat kecil.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran penduduk akan pengobatan pada tenaga medis sudah cukup baik. Selain itu fenomena ini juga dapat menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan sudah banyak dijumpai di hampir seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga baik di pedesaan maupun perkotaan sehingga akses masyarakat cukup mudah dan murah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan medis. Untuk tempat rawat jalan seperti rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, persentasenya tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Kabupaten Purbalingga sudah mempunyai asuransi kesehatan baik Askes ataupun Jamkesmas sehingga untuk berobat yang pertama adalah di dokter keluarga atau puskesmas sebagai pelayanan pertama. Penyakit yang diderita sebagian besar juga masih penyakit ringan.

Tabel 2.28.
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan
Menurut Tempat Berobat Jalan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga, 2016

Tempat/Cara Berobat	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
Rumah Sakit Pemerintah	4,63	2,17	3,31
Rumah Sakit Swasta	3,41	4,27	3,87
Praktek Dokter/Bidan/ Klinik/ Praktek Dokter Bersama/ UKBM	57,27	59,35	58,39
Puskesmas/Pustu	36,15	37,02	36,62
Praktek Batra/Alternatif	1,20	0,00	0,56
Lainnya	1,54	0,51	0,99

Sumber : Evaluasi Ekonomi dan Kesra Kabupaten Purbalingga, 2016

Derajat kesehatan masyarakat diharapkan semakin membaik dengan adanya fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat, sehingga dapat secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perubahan pola pikir tentang pola hidup sehat. Selain itu, akses masyarakat juga semakin mudah, murah dan merata terhadap pelayanan kesehatan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menggalakkan program jaminan kesehatan nasional. Dengan adanya jaminan kesehatan maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka akan memperoleh manfaatnya. Pemerintah juga berupaya menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Semua rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) akan ditanggung kesehatannya oleh pemerintah. Dari sini maka tidak ada alasan lagi bagi rakyat miskin untuk memeriksa penyakitnya ke fasilitas kesehatan. Dengan adanya jaminan kesehatan tersebut, diharapkan kebutuhan untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang optimal dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.29.
Persentase Penduduk Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga, 2016

Jaminan	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
BPJS Kesehatan	11,08	11,30	11,19
BPJS Ketenagakerjaan	1,40	1,50	1,45
Askes/Asabri/Jamsostek	2,03	2,28	2,16
Jamkesmas/PBI	46,28	45,13	45,70
Jamkesda	6,23	7,72	6,99
Asuransi Swasta	0,06	0,00	0,03
Perusahaan/Kantor	0,07	0,18	0,13
Tidak Memiliki	33,79	32,91	33,34

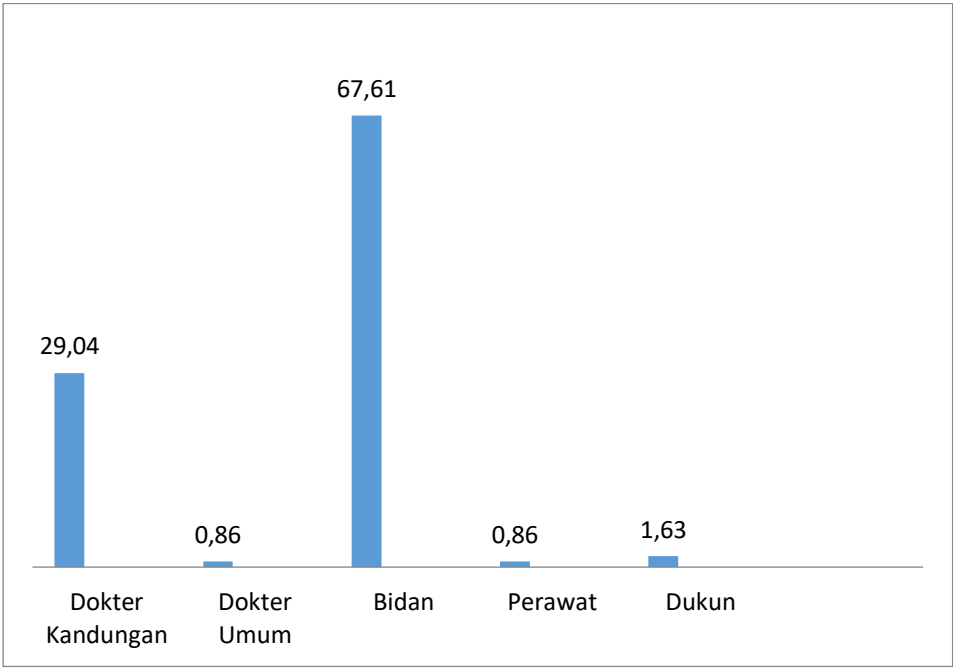
Sumber : Evaluasi Ekonomi dan Kesra Kabupaten Purbalingga, 2016

Tabel diatas memperlihatkan bahwa jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga tahun 2016 adalah jamkesmas/PBI sebesar 45,70 persen. Sementara itu masyarakat yang memiliki jamkesda hanya 6,99 persen yang notabene jamkesda adalah jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Untuk BPJS Kesehatan persentasenya masih relatif kecil 11,19 persen.

Secara umum kepemilikan jaminan kesehatan lebih banyak dimiliki oleh perempuan. Terlihat bahwa 32,91 persen perempuan yang tidak memiliki jaminan kesehatan sementara laki-laki yang tidak memiliki jaminan kesehatan mencapai 33,79 persen.

h. **Penolong Kelahiran Terakhir**

Selain ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan, data mengenai penolong proses kelahiran dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Jenis tenaga penolong proses kelahiran menentukan keberhasilan kelahiran dan akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi yang ditolong pasca kelahiran yaitu mengurangi kematian bayi dan kematian ibu (kematian maternal). Pelayanan yang aman dilakukan oleh dokter atau bidan pada saat proses kelahiran bayi.



Gambar 2.28.
Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut
Penolong Kelahiran Anak Terakhir Kabupaten Purbalingga, 2017

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin di Kabupaten Purbalingga dalam proses kelahiran anaknya ditolong oleh tenaga bidan yaitu sebesar 67,61 persen. Mudahnya akses yang didapat masyarakat serta biaya yang terjangkau, maka sebagian besar masyarakat cenderung lebih untuk melahirkan di bidan. Sementara itu perempuan yang persalinannya ditolong oleh tenaga dokter kandungan sebesar 29,04 persen.

Masih ada 1,63 persen perempuan 15-49 tahun di Kabupaten Purbalingga yang menggunakan tenaga non medis yaitu dukun bersalin. Ini berarti bahwa tidak sedikit masyarakat Kabupaten Purbalingga yang masih mempercayakan proses kelahirannya kepada dukun bersalin. Hal ini kemungkinan terjadi di wilayah pedesaan yaitu masalah biaya dan jarak ke akses fasilitas kesehatan di daerah tersebut yang cukup jauh serta tingkat pemahaman kesehatan yang masih rendah.

Namun secara umum masyarakat lebih cenderung memilih tenaga medis dalam proses penolong kelahiran. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa tingkat kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2017 sudah cukup baik.

i. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Selain penolong kelahiran, pemberian air susu ibu (ASI) sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak. Pola dan lama pemberian ASI memberikan pengaruh yang sangat positif pada kondisi kesehatan dan proses tumbuh kembang anak balita secara optimal.

Pemberian ASI di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik. Menurut data Susenas, persentase bayi di bawah usia 2 tahun (baduta 0-23 bulan) yang pernah diberi ASI sebanyak 97,84 persen atau dengan kata lain sebanyak 2,16 persen dari seluruh baduta di Kabupaten Purbalingga tidak disusui pada tahun 2016. Dibandingkan tahun tahun 2017 terjadi peningkatan karena pada tahun ini semua baduta telah disusui. Persentase baduta menurut lamanya menyusui Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 dan tahun 2017 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.30.
Persentase Baduta (0-23 bulan) Menurut Lamanya Disusui
Kabupaten Purbalingga, 2016-2017

Lamanya Disusui (bulan)	2016	2017
Tidak disusui	2,16	0,00
0 - 5	33,63	25,53
6 - 11	34,06	31,48
12 – 17	19,12	21,54
18 – 23	11,03	21,45
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Purbalingga Dalam Angka, 2018

Pemberian ASI dianjurkan oleh para ahli kesehatan karena dipercaya mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi ibu maupun untuk kesehatan bayi. Pada tahun 2017, Bayi 0-23 bulan yang diberi ASI selama 0-5 bulan sebanyak 25,53 persen, pemberian ASI 6-11 bulan 31,48 persen. Sementara itu untuk pemberian ASI dalam kurun waktu 12-17 bulan, tercatat 21,54 persen dan pemberian ASI 18-23 bulan 21,45 persen.

j. Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016 mengalami kenaikan dengan demikian beban pelayanan puskesmas semakin berat dan berpengaruh pada kualitas pelayanan. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk setiap tahunnya belum memenuhi standar Kementerian Kesehatan RI yaitu satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Data selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.31.
Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Puskesmas (unit)	Jumlah Penduduk (orang)	Rasio
2012	22	875.096	1 : 39.777
2013	22	884.683	1 : 40.213
2014	22	894.062	1 : 40.639
2015	22	903.181	1 : 41.054
2016	22	907.507	1 : 42.250

Sumber: Purbalingga Dalam Angka, 2017

k. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dalam kurun waktu tahun 2012-2016 rasio dokter gigi per 100.000 penduduk di Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif. Namun demikian secara umum, berdasarkan standar rasio ideal kebutuhan tenaga medis tersebut masih membutuhkan penambahan jumlah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32.
Perkembangan Rasio Dokter
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 – 2016

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi	
	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio
2012	61	6,97	27	3,09	24	2,74
2013	88	9,95	31	3,50	17	1,92
2014	48	5,37	43	4,81	15	1,68
2015	94	10,41	21	2,33	17	1,88
2016	88	9,41	21	2,25	17	1,82

Sumber: Purbalingga Dalam Angka, 2016

1. Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2012 -2016 cenderung meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.33.
Perkembangan Rasio Tenaga Paramedis
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 – 2016

Tahun	Perawat		Bidan		Ahli Gizi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2012	415	47,42	354	40,45	38	4,34
2013	415	46,91	354	40,01	38	4,30
2014	455	50,89	345	38,59	33	3,69
2015	455	50,38	218	24,14	33	3,65
2016	455	48,67	218	23,32	33	3,53

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2016 (diolah)

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum merupakan salah satu urusan yang menangani pemenuhan infrastruktur dasar pada suatu daerah. Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan Jalan dan Jembatan, Drainase, Persampahan.

1). **Jalan dan Jembatan**

Jalan merupakan infrastruktur/prasarana dasar yang mempunyai fungsi strategis dalam mendukung aksesibilitas masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Purbalingga tiap tahun mengalami peningkatan, Kondisi panjang jalan di Kabupaten Purbalinggaakhir tahun 2017 sudah mencapai 888,087 km. Persentase jalan kondisi baik menunjukkan peningkatan dari sebesar 80,70% pada tahun 2013 menjadi sebesar 84,06% pada tahun 2017.Kerusakan jalan antara lain disebabkan karena kondisi tanah yang cenderung labil (daya dukung tanah/DDT yang mudah mengalami penurunan) sehingga tidak mampu memikul beban lalu-lintas sesuai umur rencana, dan kerusakan akibat aliran permukaan (run off) yang tidak tertampung drainase atau tidak terbuang sebagaimana mestinya, namun melimpas diatas badan jalan, serta kerusakan yang disebabkan oleh beban/tonase kendaraan yang seringkali melebihi tonase jalan yang diijinkan.

Tabel 2.34.
Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Panjang jalan	Km	704.358	710,204	783.633	783,933	888,087
2.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	80,70	86,57	85,27	86,44	84,06

Sumber : DPU-PR Kabupaten Purbalingga

2). **Drainase**

Drainase adalah saluran pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan tanah. Saluran drainase merupakan prasarana yang melekat dengan lingkungan permukiman, yang dirancang bangun untuk menata lingkungan hidup yang aman, nyaman, bersih, dan sehat serta keberlanjutan.

Tabel 2.35.
Kondisi Jaringan Drainase di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%	20	45,45	45,45	45,45	45,45
2	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	2,10	10,02	10,56	10,87	9,56

Sumber : DPU-PR Kabupaten Purbalingga

Drainase di Kabupaten Purbalingga perlu direncanakan secara sistematis dalam lingkup kewilayahan yang terintegrasi dengan infrastruktur jalan, bangunan gedung dan permukiman sesuai karakteristik lingkungannya. Pada tahun 2012 drainase dalam kondisi baikbaru mencapai 20% dan meningkat menjadi 45,45% pada tahun 2016, namun masih dibawah target yang diharapkan. Kondisi ini menunjukan masih banyak saluran drainase dalam kondisi rusak, bahkan terdapat drainase yang tidak berfungsi. Kerusakan maupun penurunan fungsi drainase perlu segera mendapat penanganan secara teknis dan terintegrasi. Penurunan fungsi drainase sangat berpengaruh terhadap daya angkut air/pengaliran air permukaan yang dapat menyebabkan genangan, banjir maupun berimbas pada kerusakan infrastruktur jalan, bangunan, drainase itu sendiri, lingkungan sekitar, maupun infrastruktur drainase itu sendiri.

3). Sumber Daya Air

Kabupaten Purbalingga mempunyai potensi sumber daya air yang cukup berlimpah, sebagai sumber air baku layanan penyediaan air bersih dan air irigasi pertanian. Namun potensi sumber daya air yang ada tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya secara optimal. Pemanfaatan potensi sumber daya air untuk irigasi pertanian berdasar capaian kinerja pada indikator rasio jaringan irigasi selama 5 tahun terakhir 2013-2017 tidak mengalami

perubahan/peningkatan yaitu 17,2 m/ha, sedangkan luas jaringan irigasi dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami perbaikan dari 32,89 % pada tahun 2013 menjadi 45 persen pada tahun 2017.

Tabel 2.36.
Perkembangan Jaringan Irigasi dan Ketersediaan Air Irigasi
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Rasio Jaringan Irigasi	m/ha	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
2.	Luas irigasi dalam kondisi baik	m2	6.302	6.900	7.388	8.643	8.085
3.	Luas Irigasi	m2	19.159	19.159	19.159	19.207	19.207
4.	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	%	32,89	36,01	38,56	45,0	42,2

Sumber data : DPU-PR Kabupaten Purbalingga

b. Penataan Ruang

Hasil Evaluasi dan Review RTRW menunjukkan tingkat rata-rata penyimpangan pemanfaatan tata ruang yang dilihat dari berbagai kriteria pembobotan masih dibawah 20 persen atau sebesar sebesar 13,22% . Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik yang disarankan yaitu sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, sedangkan untuk Kabupaten Purbalingga persentase ruang terbuka hijau publiknya pada tahun 2017 baru sebesar 19,13 persen. Perencanaan kembali Tata Ruang Wilayah dalam konteks regulasi yaitu peninjauan dalam 1 kali selama 5 tahun.

Hampir semua kawasan perkotaan telah memiliki RDTRK. Tingkat penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Purbalingga nol, artinya tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan ruang. Namun demikian, masih banyak bangunan yang belum memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB). Tentunya kedepan perlu ditingkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan optimalisasi perijinan IMB.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah sehat, menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) antara lain adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai minimal 10m2 perkapita. Luasan ini memberikan kenyamanan anggota rumah tangga beraktifitas sehari-hari. Dari hasil Susenas diperoleh informasi persentase rumah yang luas perkapita lantainya ≤ 10m2. Rumah tangga yang menempati bangunan

dengan luas lantai ≤ 10 m² di Kabupaten Purbalingga cenderung menurun. Hal ini menunjukkan kondisi yang semakin baik dalam tata perumahan di Purbalingga.

Indikator lainnya adalah jarak sumber air minum dengan penampungan kotoran minimal 10 m. Semakin jauh jarak sumur dengan tempat penampungan kotoran, semakin kecil peluang air sumur untuk terkontaminasi limbah buangan. Tahun 2016 masih ada sekitar 13,27 persen yang jarak sumber airnya masih di bawah 10 m. Kondisi tersebut didukung oleh semakin banyak rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Dari 69,05 persen rumah tangga yang memiliki jamban sendiri pada tahun 2015, bertambah menjadi 77,25 persen pada tahun 2016.

Kinerja pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari beberapa indikator seperti luas kawasan kumuh, Persentase rumah tidak layak huni; Persentase rumah tangga bersanitasi; Persentase rumah tangga menggunakan air bersih. Secara umum dalam kurun waktu tahun 2013-2017 penataan lingkungan permukiman perlu ditingkatkan. Cakupan sanitasi dan air bersih sudah baik dengan capaian lebih dari 70% pada tahun 2013, dan pada tahun 2016 sebesar 82,78%, dan tahun 2017 sanitasi sebesar 84,7% dan air bersih mencapai 87,60%. Walaupun demikian kedepan perlu ditingkatkan agar akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi semakin baik, menuju universal access 100-0-100.

Tabel 2.37.
Kondisi Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1	Luas kawasan kumuh	%	0	32,39	32,39	23,70	23,45
2	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	13.814	24.315	25.577	27.537	27.498
3	Persentase rumah tidak layak huni	%	4,7	6,5	11,40	11,41	11,35
4	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	74,89	69,8	70,00	78,58	89,73
5	Persentase rumah tangga menggunakan air bersih	%	68,48	77,48	78,55	82,78	87,60

Sumber Data : DPU-PR Kabupaten Purbalingga

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) di Kabupaten Purbalingga dalam jangka waktu 2013 – 2016 mengalami trend meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penyelesaian pelanggaran K3 pada tahun 2013 sebesar 91 persen, selanjutnya pada tahun 2014 meningkat menjadi 92 persen dan kembali meningkat menjadi 93 persen pada tahun 2015. Selanjutnya meningkat pada tahun 2016 sebesar 94,40 persen. Sementara angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Purbalingga juga mengalami trend menurun, dimana angka kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 13 persen, selanjutnya menurun pada tahun 2014 menjadi 3 persen dan kembali menurun pada tahun 2015 menjadi 1 persen.

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat petugas Satpol PP dalam 24 jam sebanyak 3 (tiga) kali sehari selama kurun waktu 2011 – 2015 berjalan secara konsisten yaitu sebesar 162 kali. Dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Satpol PP didukung sejumlah aparat. Sampai dengan tahun 2016 jumlah Satpol PP secara keseluruhan sebanyak 99 orang, dengan rasio per 10.000 penduduk adalah 1.09. Tugas Satpol PP menjaga ketertiban dan keamanan dibantu oleh masyarakat yang bertugas sebagai perlindungan masyarakat (linmas). Sampai dengan tahun 2016, jumlah tenaga linmas sebanyak 5.506 orang. Rasio linmas per 10.000 penduduk saat ini sebanyak 60.97. Sementara untuk mendukung tugas linmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan tersedia sarana berupa Pos Siskamling, tahun 2016 rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan sebesar 6.80.

Kebebasan berorganisasi di masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik, terlihat dari jumlah LSM (Lembaga swadaya masyarakat) dan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun. Perkembangan Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38.
Perkembangan Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	92	92	93	93
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	91	92	93	94,40
3.	Angka kriminalitas	Kasus	392	368	188	NA
4.	Angka kriminalitas yang tertangani	Kasus	274	304	135	NA
		%	69,90	82,61	71,81	NA
5.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Kali	162	162	162	162
6.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	per 10.000 penduduk	1,5	0,75	0,95	1,09
7.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	per 10.000 penduduk	63.15	61.76	60.97	60.97
8.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Poskamling	3.58	3.85	6.80	6.80

Sumber: Satpol PP dan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga

6. Sosial

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa negara menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat bagi rakyatnya sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Untuk memenuhi amanat tersebut pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan sosial yang meliputi kebijakan, perencanaan, kerjasama, pembinaan bidang sosial, identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pelaksanaan, pengawasan, pelaporan bidang sosial, sarana dan prasarana bidang sosial dan pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial.

Persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Purbalingga dalam penanganan masalah sosial adalah jumlah PMKS yang jumlahnya cukup banyak, tahun 2016 jumlah PMKS sebanyak 118.922 orang dan yang sudah menerima bantuan sebanyak 27.764 orang atau sebesar 23,26 persen yang tertangani. Cakupan PMKS yang menerima bantuan sosial belum memenuhi seluruh target. Penyebabnya antara lain adalah besarnya jumlah PMKS yang tidak seimbang dengan ketersediaan anggaran yang tersedia. Meskipun jumlah panti sosial meningkat, namun belum mampu mengatasi seluruh permasalahan PMKS. Dalam rangka peningkatan capaian PMKS yang terlayani, perlu sinergitas lintas sektor berupa kemitraan dengan seluruh stakeholder sehingga mampu memberikan optimalisasi layanan PMKS.

B. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun ke atas dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat seperti pada tahun 2016 ke tahun 2017 dari 68,79% menjadi 71,68%. Secara absolut juga mengalami peningkatan dari 479.808 orang menjadi 489.947 orang. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.44 di bawah ini.

Tabel 2.39.

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Purbalingga, 2012-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1	2012	466.188	641.356	72,69
2	2013	337.714	642.988	52,52
3	2014	443.845	659.371	67,31
4	2015	430.097	664.192	64,76
5	2016	479.808	697.402	68,79
6	2017	463.809	683.554	71,68

Sumber: Purbalingga dalam Angka, 2018

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TingkatPartisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang

tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kabupaten Purbalingga. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut jenis kelamin pada tahun 2015 dan tahun 2016 di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel2.40.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut
Jenis Kelamin Tahun 2015-2017

Jenis Kelamin	Tahun		
	2015	2016	2017
Laki-laki	83,81	85,48	83,52
Perempuan	53,02	55,61	60,39
Total	68,05	70,62	71,68

Sumber : Purbalingga Dalam Angka, 2018

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Menurut Sakernas, pengangguran mencakup mereka yang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa sudah berkali-kali mencari pekerjaan namun belum berhasil. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Purbalingga menurut jenis kelamin pada tahun 2015 - 2017 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.41.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2017

Jenis Kelamin	Tahun		
	2015	2016	2017
Laki-laki	6,86	6,43	6,30
Perempuan	1,79	1,52	4,07
Total	4,84	4,66	5,33

Sumber : Purbalingga dalam Angka, 2018

d. **Pencari Kerja yang Ditempatkan**

Persentase pencari kerja yang ditempatkan terhadap pencari kerja yang terdaftar dalam kurun waktu tahun 2012-2017 mengalami peningkatan dari 10,54% menjadi 47,15%. Namun demikian pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 32,05 % menjadi 32,04 %. Hal tersebut, secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.42.
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2012-2017

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar	Pencari Kerja Ditempatkan	Persentase
2012	4.971	524	10,54
2013	13.959	3.128	22,41
2014	12.012	4.450	37,05
2015	12.913	4.138	32,05
2016	13.558	4.345	32,04
2017	13.048	6.152	47,15

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, dan Purbalingga Dalam Angka 2018

e. **Penduduk yang Bekerja**

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan/keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Indikator yang mengukur tingkat kesempatan kerja penduduk adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yaitu perbandingan penduduk usia kerja yang bekerja dengan angkatan kerja. Indikator ini berkebalikan dengan tingkat pengangguran.

Penduduk Kabupaten Purbalingga yang bekerja dari penduduk yang belum/tidak pernah sekolah sebanyak 8.772 orang, tidak/belum tamat SD sebanyak 72.308 orang, SD sebanyak 170.161 orang, SMP sebanyak 109.572 orang dan Diploma I/II/III/ Akademi sebanyak 9.024 orang. Masih besarnya penduduk bekerja dengan pendidikan SD kebawah menggambarkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga sebagian besar adalah tenaga kerja terampil yang tidak mengharuskan pendidikan tinggi. Jumlah penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 secara lengkap sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.43.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

Pendidikan	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
Tidak/belum sekolah	8.772	-	8.772
Tidak/belum tamat SD	72.308	1.480	73.788
SD/MI	170.161	4.791	174.952
SLTP	109.572	8.930	118.502
SLTA	45.160	3.428	48.588
SMK	26.634	6.292	32.926
DI/DII/DIII/Akademi	9.024	-	9.024
Universitas	22.178	1.217	23.395
Jumlah	463.809	26.138	489.947

Sumber :Purbalingga Dalam Angka, 2018

Sementara itu jika dilihat menurut lapangan usaha utama penduduk usia kerja, sebagian besar penduduk Kabupaten Kabupaten Purbalingga bekerja di lapangan usaha industri yaitu sebanyak 156.316 orang, disusul oleh perdagangan, rumah makan dan perhotelan sebanyak 102.132 orang dan lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebanyak 93.668 orang. Industri merupakan lapangan usaha yang banyak digeluti penduduk Kabupaten Purbalingga dengan banyaknya penduduk yang bekerja di sektor ini terutama disumbang oleh peran serta perempuan sebanyak 105.153 orang dan penduduk laki-laki sebanyak 51.163 orang. Industri yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan adalah industri rambut palsu dan bulu mata palsu.

Untuk lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki sebanyak 70.766 orang, dan penduduk perempuan hanya 22.902 orang. Sementara untuk lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi hampir berimbang dilakukan oleh penduduk laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki sebanyak 56.971 orang dan perempuan 45.161 orang. Secara lebih lengkap Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.44.
Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

Lapangan UsahaUtama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perem- puan	Lk+Pr
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	70.766	22.902	93.668
Pertambangan dan Penggalian	3.560	1.721	5.281
Industri Pengolahan	51.163	105.153	156.316
Listrik, Gas dan Air	-	-	-
Bangunan	37.150	1.396	38.546
Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi	56.971	45.161	102.132
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	11.316	554	11.870
Keuangan, Asuransi, Persewaan, Tanah, Jasa Perusahaan	2.923	1.970	4.893
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	27.229	23.874	51.103
Jumlah	261.078	202.731	463.809

Sumber : Purbalingga Dalam Angka. 2018

Selanjutnya penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama adalah berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai sejumlah 186.870 orang yang terdiri dari laki-laki 92.397 orang dan perempuan 94.473 orang.

Tabel 2.45.
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
dan Jenis Kelamin, Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
Berusaha sendiri	51.372	47.535	98.907
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tdk dibayar	48.014	20.365	68.379
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	11.494	1.891	13.385
Buruh/Karyawan/Pegawai	92.397	94.473	186.870
Pekerja Bebas	47.054	9.877	56.931
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	10.747	28.590	39.337
Jumlah	261.078	202.731	463.809

Sumber : Purbalingga dalam Angka, 2018

2. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

a. **Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Purbalingga tahun 2017 berdasarkan data BPS sebesar 60,39 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah penduduk usia kerja perempuan (15 tahun ke atas) (orang)	349.957
2	Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)	211.324
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	60,39

Sumber: Purbalingga Dalam Angka, 2018

b. **Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian karena pada tahun 2016 angkanya meningkat cukup signifikan, sehingga diperlukan langkah – langkah antisipatif dari segenap pihak yang terkait. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga tahun 2013 sampai dengan 2016 digambarkan dalam grafik di bawah ini.



Sumber: DinsosdaldukKB dan P3A, 2017

Gambar 2.29.
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016

3. **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Perkembangan kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2014-2016 di Kabupaten Purbalingga seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47.
Kondisi Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2016

No	Uraian dan Indikator	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Laju pertumbuhan penduduk	1,06	1,02	1,03
2	Jumlah ketersediaan alat dan obat kontrasepsi	149.915	143.826	148.456
3	Persentase kepesertaan KB	79,47%	76,40%	77,96%
4	Jumlah peserta aktif KB pria	5.233	4.593	2.735
5	Cakupan peserta KB aktif/Contraseptive Prevalence Rate	153.419	143.826	148.456
6	Jumlah penanganan kasus terkait layanan KB	5	1	1
7	Persentase penanganan kasus terkait layanan KB	100%	100%	100%

Sumber: Dinsosdalduk KB dan P3A, 2017

Data Dinsosdalduk KB dan P3A menunjukkan bahwa Jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sebaliknya jumlah keluarga prasejahtera mengalami penurunan yang signifikan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.48.
Perkembangan Jumlah Keluarga sesuai NKKBS
Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016

No	Uraian dan Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera	86.358	86.790	88.005	89.924
2	Jumlah keluarga pra sejahtera	73.935	71.844	71.948	70.439
3	Jumlah keluarga sejahtera I	54.124	58.112	57.910	62.790
4	Jumlah keluarga sejahtera (KS III dan KS III+)	73.774	80.843	81.135	160.996

Sumber: Dinsosdalduk KB dan P3A, 2017

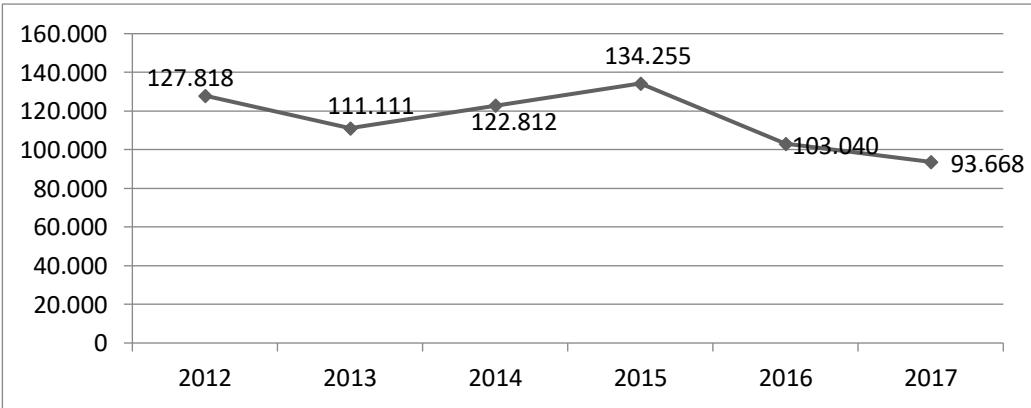
4. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan;(d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Ketahanan pangan di Jawa Tengah secara umum, semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:

- a. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif;
- b. Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Jawa Tengah;
- c. Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan;
- d. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat.

Jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian dalam kurun waktu 6 tahun mengalami penurunan, dari 127.818 orang di tahun 2012 menjadi 93.668 orang pada tahun 2017. Adapun kecenderungan tingkat penurunannya sebagaimana gambar berikut ini.



Sumber : Jawa Tengah dalam Angka 2012-2016 dan Purbalingga Dalam Angka. 2018

Gambar 2.30.
Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2017

5. **Pertanahan**

Pelayanan umum kepada masyarakat urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

Tabel 2.49.
Luas Wilayah dirinci Menurut Penggunaan Tanah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2017

Penggunaan Tanah	2015		2016		2017	
	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)
Sawah	21.845	28,1	21.841	28,1	21.830	28,07
Perkampungan	19.087	24,54	19.091	24,54	19.100	24.56
Kebun Campur	4.532	5,83	4.532	5,83	4.532	5,83
Tegalan	17.344	22,3	17.344	22,3	17.344	22,30
Perkebunan	16	0,02	16	0,02	16	0,02
Perikanan	95	0,12	95	0,12	95	0,12
Hutan	11.328	14,57	11.328	14,57	11.328	14,57
Lain-lain	3.516	4,52	3.516	4,52	3.517	4,52
Jumlah	77.764	100,00	77.764	100,00	77.764	100

Sumber: Purbalingga Dalam Angka 2016-2018

6. **Lingkungan Hidup**

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga dapat ditunjukkan dengan penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Lingkungan Hidup, yaitu informasi status mutu air, informasi status mutu udara dan jumlah pengaduan dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti. Selengkapnya untuk kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga selama tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini.

Tabel 2.50.
Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2016

No	Indikator	2014	2015	2016
1	Informasi status mutu air (SPM) sungai	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu
2	Informasi status mutu udara ambien (SPM)	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu
3	Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) %	100	100	100

Sumber: BLH Kabupaten Purbalingga, 2016

7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya, Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan dan lain sebagainya. Jumlah Kepala Keluarga dan kepemilikan Kartu Keluarga per Kecamatan tahun 2016 di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.51.
Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan
Kartu KeluargaPer Kecamatan 2016

NO	Wilayah	Jumlah Kepala Keluarga			Jumlah Penerbitan Kepala Keluarga (KK)			
		L	P	JML	L	P	JML	%
1	Kemangkon	17,123	3,605	20,728	16,870	3,257	20,127	97.10
2	Bukateja	19,986	4,192	24,178	19,770	3,867	23,637	97.76
3	Kejobong	13,950	2,485	16,435	13,751	2,188	15,939	96.98
4	Kaligondang	17,241	3,870	21,111	17,114	3,652	20,766	98.37
5	Purbalingga	15,680	3,586	19,266	15,519	3,394	18,913	98.17
6	Kalimanah	15,006	2,716	17,722	14,808	2,462	17,270	97.45
7	Kutasari	16,806	2,794	19,600	16,622	2,509	19,131	97.61
8	Mrebet	20,966	3,256	24,222	20,646	2,808	23,454	96.83
9	Bobotsari	14,513	2,758	17,271	14,312	2,512	16,824	97.41
10	Karangreja	12,399	1,142	13,541	12,258	894	13,152	97.13
11	Karanganyar	10,700	2,129	12,829	10,524	1,938	12,462	97.14
12	Karangmoncol	14,791	2,536	17,327	14,514	2,090	16,604	95.83
13	Rembang	17,898	2,768	20,666	17,531	2,180	19,711	95.38
14	Bojongsari	15,516	2,814	18,330	15,339	2,520	17,859	97.43
15	Padamara	11,831	1,946	13,777	11,715	1,804	13,519	98.13
16	Pengadegan	10,888	1,845	12,733	10,790	1,713	12,503	98.19

NO	Wilayah	Jumlah Kepala Keluarga			Jumlah Penerbitan Kepala Keluarga (KK)			
		L	P	JML	L	P	JML	%
17	Karangjambu	6,655	926	7,581	6,565	738	7,303	96.33
18	Kertanegara	9,234	1,857	11,091	9,138	1,700	10,838	97.72
JUMLAH		261,183	47,225	308,408	257,786	42,226	300,012	97.28

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purbalingga, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 308.408 kepala keluarga di Kabupaten Purbalingga yang sudah memiliki Kartu Keluarga Nasional sampai akhir 2015 sebanyak 300.012 kepala keluarga atau 97,28%. Jika menurut wilayah kecamatan, dapat dilihat bahwa wilayah Kecamatan Kaligondang merupakan wilayah dengan persentase kepemilikan KK tertinggi 98,37% yang diikuti wilayah Kecamatan Pengadegan yakni 98,19%. Sedangkan persentase kepemilikan kartu keluarga terendah terdapat di wilayah Kecamatan Rembang sebanyak 95,38%.

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk hampir selalu menjadi persyaratan publik lainnya di Kabupaten Purbalingga sehingga hampir semua Penduduk (legal) memiliki KTP-el. Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang memiliki KTP dan telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 644.488 jiwa (90,62%) dari wajib KTP sebanyak 711.196 jiwa sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Hasil Pelaksanaan Perekaman KTP-el
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

No	Kecamatan	Wajib KTP Kuota	Jumlah Terekam			
			Jml	%	Kurang	%
1	Kemangkon	46,353	41,992	90.59	4,361	9.41
2	Bukateja	55,875	50,965	91.21	4,910	8.79
3	Kejobong	37,127	33,052	89.02	4,075	10.98
4	Kaligondang	46,998	43,450	92.45	3,548	7.55
5	Purbalingga	44,356	40,297	90.85	4,059	9.15
6	Kalimanah	41,739	37,368	89.53	4,371	10.47
7	Kutasari	44,022	39,546	89.83	4,476	10.17
8	Mrebet	56,464	49,458	87.59	7,006	12.41
9	Bobotsari	39,925	36,407	91.19	3,518	8.81

No	Kecamatan	Wajib KTP Kuota	JumlahTerekam			
			Jml	%	Kurang	%
10	Karangreja	32,752	27,793	84.86	4,959	15.14
11	Karanganyar	29,504	26,276	89.06	3,228	10.94
12	Karangmoncol	43,184	37,998	87.99	5,186	12.01
13	Rembang	50,403	44,603	88.49	5,800	11.51
14	Bojongsari	40,868	38,747	94.81	2,121	5.19
15	Padamara	31,001	29,382	94.78	1,619	5.22
16	Pengadegan	27,757	26,478	95.39	1,279	4.61
17	Karangjambu	17,236	16,099	93.40	1,137	6.60
18	Kertanegara	25,632	24,577	95.88	1,055	4.12
Jumlah		711,196	644.488	90,62	66.708	9,38

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purbalingga 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa prosentase hasil perekaman KTP-el tertinggi di Kabupaten Purbalingga tahun 2016 adalah Kecamatan Kertanegara yaitu sebesar 95,88 persen, adapun perekaman terendah adalah Kecamatan Karangreja yaitu sebanyak 84,86 persen. Untuk mengejar capaian perekaman KTP-el di kecamatan perlu ditingkatkan pelayanan KTP-el jemput bola yang waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

c. **Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil**

Akta catatan sipil merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berdampak hukum terhaap status keperdataan seseorang. Oleh karenanya, setiap penduduk yangmengalami peristiwa penting wajib dicatat untukmendapatkan akta pencatatan sipil.

Akta kelahiran menimbulkan hukum keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya. Akta perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara suami dan isteri serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akta kematian merupakan dokumen untuk dapat dibukanya pembagian waris, pensiun, asuransi dan lain-lain. Akta perceraian merupakan dokumen legal yang membuktikan putusnya sebuah perkawinan. Akta pengakuan anak merupakan dokumen legal yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan ayah biologis.

Belum lengkapnya informasi yang diberikan oleh penduduk dalam mengisi Formulir F.1.01 khususnya informasi tentang kepemilikan akta

pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak. Hal ini menyebabkan sulitnya memperoleh informasi tentang kepemilikan akta-akta catatan sipil oleh penduduk dari database kependudukan SIAK.

1) **Kepemilikan Akta Kelahiran**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjamin setiap anak untuk dicatatkan kelahirannya. Untuk meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dimana terdapat 3 (tiga) item penting yang berkaitan dengan percepatan capaian kepemilikan akta pencatatan sipil yaitu:

- a. Pelayanan gratis untuk memperoleh dokumen akta Pencatatan Sipil;
- b. Dihapuskannya denda keterlambatan pembuatan akta pencatatan sipil.

Perubahan azas pencatatan sipil yang semula pada asas peristiwa menjadi azas domisili dimana penduduk dapat membuat akta pencatatan sipil di tempat domisili walaupun tempat terjadinya peristiwa penting berbeda. Adapun kepemilikan akta Kelahiran yang terdapat dalam database SIAK Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.53.
Penerbitan Akta Kelahiran per Kecamatan di
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

No	Wilayah	Jumlah Bayi Lahir (Usia < 1 Th)			Jumlah Penerbitan Akta Lahir				Jumlah Akta Lahir Belum Diterbitkan			
		L	P	Jml	L	P	Jml	%	L	P	Jml	%
1	Kemangkon	246	245	491	230	235	465	94.70	16	10	26	5.30
2	Bukateja	318	309	627	301	296	597	95.22	17	13	30	4.78
3	Kejobong	183	170	353	172	163	335	94.90	11	7	18	5.10
4	Kaligondang	275	245	520	261	236	497	95.58	14	9	23	4.42
5	Purbalingga	234	267	501	223	260	483	96.41	11	7	18	3.59
6	Kalimanah	248	205	453	239	195	434	95.81	9	10	19	4.19
7	Kutasari	247	202	449	241	190	431	95.99	6	12	18	4.01
8	Mrebet	77	101	178	71	97	168	94.38	6	4	10	5.62
9	Bobotsari	64	57	121	61	53	114	94.21	3	4	7	5.79
10	Karangreja	46	37	83	42	34	76	91.57	4	3	7	8.43
11	Karanganyar	40	43	83	37	41	78	93.98	3	2	5	6.02
12	Karangmoncol	53	40	93	49	37	86	92.47	4	3	7	7.53
13	Rembang	75	50	125	71	47	118	94.40	4	3	7	5.60
14	Bojongsari	72	69	141	67	65	132	93.62	5	4	9	6.38

No	Wilayah	Jumlah Bayi Lahir (Usia < 1 Th)			Jumlah Penerbitan Akta Lahir				Jumlah Akta Lahir Belum Diterbitkan			
		L	P	Jml	L	P	Jml	%	L	P	Jml	%
15	Padamara	64	49	113	59	46	105	92.92	5	3	8	7.08
16	Pengadegan	54	61	115	51	57	108	93.91	3	4	7	6.09
17	Karangjambu	21	14	35	19	12	32	91.43	2	2	3	8.57
18	Kertanegara	45	41	86	40	38	78	90.70	5	3	8	9.30
Jumlah		2,362	2,205	4,567	2,234	2,102	4,337	94.96	128	103	230	5.04

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purbalingga, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah akta kelahiran yang diterbitkan sebanyak 4.337 akta lahir atau sebesar 94,96 persen, sedangkan yang belum diterbitkan sebanyak 230 akta (5,04 persen). Persentase kepemilikan akta kelahiran terbesar adalah Kecamatan Purbalingga yaitu sebanyak 96,41 persen, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Kertanegara yaitu sebanyak 90,70 persen.

2) Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Namun perlu digaris bawahi bahwa data kepemilikan akta perkawinan ini dilayani oleh Dindukcapil Kabupaten Purbalingga, hanya bagi penduduk yang beragama non Islam. Sementara bagi penduduk yang beragama Islam data kepemilikan akta perkawinan dalam bentuk surat nikah berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Data kepemilikan akta perkawinan (non muslim) di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.54.
Jumlah Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian
Di Kabupaten Purbalingga, 2016 - 2017

No	Uraian	2016	2017
1	Perkawinan	36	39
2	Perceraian	10	11

Sumber:Purbalingga Dalam Angka. 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk non muslim di Kabupaten Purbalingga yang berstatus menikah dan mengurus akta perkawinan di tahun 2016 sebanyak 36 orang dan di tahun 2017 sebanyak 39 orang, dengan perceraian di tahun 2016 sebanyak 10 orang dan di tahun 2017 sebanyak 11 orang.

8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

9. Perhubungan

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun yang tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas prasarana jalan membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan angkutan darat guna meningkatkan kenyamanan layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas. Penyelenggaraan perhubungan perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis. Adapun fasilitas lalu lintas di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.55.
Fasilitas Lalu Lintas Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

No.	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Jalan	
		Provinsi	Kabupaten
1	Marka Jalan	78,6 km	180,872 km
2	Rambu-rambu jalan	551 bh	623 bh
3	RPPJ	71 bh	94 bh
4	Delinator	105 bh	146 bh
5	Safety Mirror	10 bh	26 bh
6	Guard Raill	1052 m	2844 m
7	Trafficc Light	14 unit	11 unit
8	Warning light	22 unit	25 unit
9	Road Barrier		125 bh
10	Traffic Cone		95 bh
11	Paku Marka	460 buah	

Sumber: Dinas Perhubungan, 2017

Dalam rangka menunjang kegiatan transportasi, di Kabupaten Purbalingga terdapat 2 buah terminal tipe B yaitu Terminal Purbalingga dan Terminal Bobotsari, serta 4 buah terminal tipe C yaitu terminal Bukateja, Kejobong, Kutasari dan Kutabawa. Sedangkan untuk pelayanan angkutan, di Kabupaten Purbalingga terdapat 1.031 kendaraan niaga yag terdiri dari 40 unit angkutan antar kota antar Provinsi (AKAP); 295 unit angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP); 211 unit angkutan kota; 452 unit angkutan perdesaan; 12 unit angkutan pariwisata; dan 21 unit angkutan antar jemput.

10. Komunikasi dan Informasi

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik. Sampai dengan tahun 2015 jumlah SKPD yang memiliki website baru mencapai 25 SKPD dengan intensitas updating informasi rata-rata sebanyak 320 hari per tahun. Sementara itu jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif sebesar 26 unit. Sedangkan jumlah pelayanan publik perangkat daerah yang telah dilaksanakan secara online baru 1 unit.

11. Koperasi dan UKM

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas, perdagangan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, serta koperasi.

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya berfluktuatif, tahun 2014 sebanyak 214 unit turun menjadi 174 unit pada tahun 2015 dan naik kembali menjadi 177 unit di tahun 2016. Pemberdayaan koperasi perlu ditingkatkan karena masih ada koperasi yang tidak aktif sebesar 79 unit di tahun 2016. Sedangkan jumlah KUD di Kabupaten Purbalingga cenderung tetap setiap tahunnya yaitu sebanyak 16 KUD, namun demikian jumlah non KUD cukup besar yaitu sebesar 240 unit pada tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga sangat mendukung terhadap pemberdayaan UKM lokal, beberapa kebijakan guna pengembangan UKM diantaranya subsidi bunga yang disalurkan lewat lembaga keuangan, program *Bela Beli*, penggunaan batik asli Purbalingga untuk pakaian dinas. Adapun capaian Kinerja Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.56.
Perkembangan Capaian Kinerja Koperasi dan UKM,2013-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Jumlah UKM non BPR/LKM	Unit	25.560	127.549	127.433	127.123
2	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UMKM	%	98	99	-	-
3	Prosentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,80	1	1,20	1,70
4	Prosentase omset usaha mikro / rumah tangga terhadap total omset UMKM (%)	%	52	54	54,60	54,92
5	Jumlah Produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI	Jenis	356	368	390	421
6	Prosentase Koperasi Aktif	%	67	67	69	79

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
7	Prosentase Koperasi Sehat	%	54	52	59	60

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM , 2016

12. Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Jumlah ijin yang diterbitkan DPMPTSP selama 4 tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2013 sebanyak 4.219 ijin, turun menjadi 4.181 dan 4.016 ditahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2016 naik cukup signifikan menjadi sebesar 4.618 ijin, dan yang diterbitkan paling banyak adalah ijin usaha perdagangan dan ijin usaha perdagangan. Perkembangan capaian kinerja perijinan Kabupaten Purbalingga dari tahun 2013 sampai dengan 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.57.
Perkembangan Capaian Kinerja Perijinan, 2013-2016

No	Jenis Izin	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan	1	8	19	10
2	Izin Gangguan (HO)	768	788	787	772
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.249	725	572	641
4	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	744	731	755	1.004
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	658	751	708	1.016
6	IUI/TDI	4	18	21	30
7	IUI PHHK	-	8	-	-
8	Izin Reklame	718	966	962	913
9	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	74	145	147	143
10	Izin Mendirikan Perush. Pengangkutan	3	10	15	22
11	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	-	22	9	15
12	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	21	52
	Jumlah	4.219	4.181	4.016	4.618

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Purbalingga. 2017

Adapun perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.58.
Realisasi Investasi Tahun 2011 – 2016

No	Tahun	Realisasi (Rp)
1	2011	339.768.000.000
2	2012	342.500.000.000
3	2013	477.115.287.000
4	2014	314.812.853.495
5	2015	230.003.281.000
6	2016	483.271.457.226

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Purbalingga. 2017

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu pendukung upaya pembangunan manusia. Salah satu tujuan dari pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga adalah memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan, patriotisme, nasionalisme serta mengembangkan jiwa sportifitas disamping juga dalam rangka meningkatkan kualitas jasmani generasi muda. Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga masih perlu untuk ditingkatkan. Dalam tahun 2017, fasilitasi kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 6 (enam) kegiatan, sedangkan fasilitasi kegiatan olahraga sebanyak 26 kegiatan. Adapun jumlah prestasi olahraga Kabupaten Purbalingga di tingkat regional sebanyak 6 (enam) prestasi dan di tingkat nasional sebanyak 60 (enam puluh) prestasi.

Salah satu tantangan dalam upaya pembangunan manusia khususnya dalam pembangunan kepemudaan adalah adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu peningkatan sosialisasi bahaya narkoba khususnya di kalangan generasi muda.

14. Statistik

Statistik memiliki peranan sebagai penyedia bahan maupun keterangan dalam berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Statistik juga sebagai peralatan analisis dan interpretasi data kuantitatif guna memperoleh suatu kesimpulan yang nantinya dijadikan bahan rumusan kebijakan. Dalam tahun 2016 terdapat kegiatan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang berisi 8 kelompok data. Dan juga kegiatan penyediaan data dasar pembangunan daerah dengan output tersedianya publikasi buku Purbalingga Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, evaluasi IPM dan buku evaluasi kinerja pembangunan daerah yang berisi data-data PDRB, IHK dan data-data sosial seperti data susenas dan sakernas. Data statistik dimaksud dimanfaatkan dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah.

15. Persandian

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan persandian meliputi: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah

Daerah kabupaten/kota. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan persandian di Kabupaten Purbalingga secara umum telah berjalan dengan baik. Namun demikian kemampuan petugas dalam penggunaan peralatan santel perlu ditingkatkan guna mengantisipasi kebocoran atau penyadapan informasi pemerintah daerah oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

16. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya merupakan salah satu upaya pembangunan karakter bangsa. Seni budaya, khususnya seni budaya nasional merupakan wahana internalisasi nilai-nilai luhur yang perlu untuk terus ditanamkan dan dikembangkan untuk memperkuat karakter dan integritas bangsa. Disamping itu, seni budaya secara umum dapat menjadi media untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Di tengah kehidupan yang semakin materialistis dan semakin menguatnya gelombang globalisasi, ada kecenderungan semakin menurunnya apresiasi terhadap seni budaya bangsa.

Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan program yang nyata dalam rangka peningkatan apresiasi terhadap seni budaya khususnya yang bersifat tradisional. intensitas kegiatan kajian, fasilitasi, pementasan serta pengiriman duta seni maupun pembinaan organisasi dan kelompok kesenian yang ada perlu terus ditingkatkan. Demikian juga berbagai kekayaan warisan sejarah berupa benda-benda cagar budaya yang sangat banyak di Kabupaten Purbalingga perlu terus dipelihara dan dijaga agar tetap lestari sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui akar budayanya.

17. Perpustakaan

Peningkatan kualitas manusia tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan masyarakat. Ilmu yang dapat diserap oleh peserta didik di bangku pendidikan sangatlah terbatas dan lebih bersifat sebagai bekal dasar dan stimulasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu perlu dikembangkan semangat untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan pengetahuan lainnya dalam masyarakat khususnya bagi anak-anak dan generasi muda antara lain melalui pengembangan budaya membaca. Peran perpustakaan sangat penting dalam rangka mendorong dan mendukung pengembangan budaya

membaca. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Purbalingga pada saat ini sebanyak 1.107 unit yang terdiri dari 2 unit perpustakaan umum, 670 perpustakaan SD/MI, 148 perpustakaan SMP/MTs, 55 perpustakaan SMA/SMK/MA, 223 perpustakaan desa, 5 taman bacaan masyarakat dan 4 perpustakaan tempat ibadah dan pondok pesantren.

18. Kearsipan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah: (a) menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; (b) menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; (c) menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; (e) mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; (f) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (g) menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan (h) meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan.

Cakupan OPD/ormas/BUMD/lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2017 sebanyak 262 unit, dan jumlah arsip daerah yang telah didokumentasikan dalam bentuk elektronik sebanyak 20.000 berkas. SIDOMAS merupakan upaya inovatif untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan kearsipan, dengan Alih Media Sistem Informasi Dokumentasi Masyarakat (SIDOMAS) mampu melayani kearsipan sebanyak 59.659 KK.

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Perikanan

Kinerja pembangunan perikanan salah satunya dapat dilihat dari Produksi perikanan Budidaya. Dalam kurun waktu tahun 2013-2015 terjadi penurunan produksi perikanan kolam dari sebesar 10.896 ton pada tahun 2013 menjadi sebesar 4.872 pada tahun 2015. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan lahan yang dimiliki oleh para pembudidaya ikan. Namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 2,65% dari tahun 2015 atau sebesar 5.001 ton karena adanya kreativitas dalam teknis budidaya .

Tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Purbalingga masih belum optimal. Pada tahun 2015 tingkat konsumsi ikan sebanyak 19,9 per kapita pertahun. Kondisi itu masih jauh dengan tingkat konsumsi ikan nasional yang berada di angka 35 kilogram per kapita pertahun. Masih minimnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat karena ketersediaan ikan di masyarakat belum maksimal. Salah satunya mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan ikan di pasar. Penyebab lainnya yaitu masih belum dikenalnya produk olahan ikan di masyarakat. Selain itu masih ada anggapan olahan ikan masih berbau menyengat (amis). Sehingga masyarakat masih enggan mengonsumsi olahan ikan itu. Produksi ikan, tingkat konsumsi ikan, produksi hasil olahan ikan dan jumlah pasar ikan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.59.

Produksi Ikan, Tingkat Konsumsi Ikan, Produksi Hasil Olahan Ikan DanJumlah Pasar Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2016

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Produksi Ikan di kolam	Ton	10.896	7.219	4.872	5.001
2	Produksi Ikan di Sungai	Ton	249,24	243,17	249,50	254
3	Produksi ikan di UPR	Ekor (ribu)	365.062	305.068	115.442	116.379
4	Tingkat konsumsi ikan penduduk	kg/kapita /tahun	16,6	10,73	8,27	8,73
5	Jumlah produksi hasil olahan ikan	Ton	3.797	2.961	1.590	1.511
6	Jumlah Pasar Ikan	Unit	11	12	12	12

Sumber: DKPPKab. Purbalingga, 2017

2. Pariwisata

Sektor Pariwisata saat ini sangat penting dalam pengembangan perekonomian daerah. Sektor pariwisata dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial. Pariwisata tumbuh dari upaya memanfaatkan potensi alam maupun dengan membuat obyek wisata buatan yang memiliki kekhasan dan keunggulan suatu daerah.

Kabupaten Purbalinggabeberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam bidang pariwisata. Kemajuan di sektor pariwisata antara lain dibangunnya taman wisata air Owabong dan Purbasari, taman reptil (reptile park), museum uang, dll. Pendapatan dari sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar bagi APBD Kabupaten Purbalingga.

Di Kabupaten Purbalingga terdapat 5 (lima) obyek wisata unggulan yaitu Owabong, Gua Lawa, Sanggaluri Park, Pancuran Mas Purbayasa dan Desa Wisata Serang. Perkembangan wisata di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.60.
Perkembangan Pariwisata
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Jumlah obyek wisata unggulan	Unit	5	5	5	5
2	Jumlah wahana baru pada obyek wisata	Unit	8	9	9	9
3	Jumlah kelompok sadar wisata / pemandu wisata	Kelompok	7	9	11	13
4	Jumlah kunjungan wisatawan (Wisman dan Wisnus)	Org	1.392.311	1.457.719	1.318.883	1.343.147
5	Rata-rata tingkat hunian hotel	%	14,00	15,00	17,86	20,97
6	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,5	1,5	2	4
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,735	1,782	1,822	1,753
8	Jumlah restoran	Unit	20	20	20	20
9	Jumlah penginapan/ hotel	Unit	10	11	11	11

Sumber: Purbalingga Dalam Angka, 2016 dan Dinporapar Kabupaten Purbalingga

3. Pertanian

Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan Sarana Pertanian; pengembangan prasarana pertanian; pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; serta pemberian Perizinan Usaha Pertanian. Kewenangan yang dimiliki tersebut menjadi landasan bagi Kabupaten Purbalingga dalam pengelolaan di sektor pertanian.

Sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku yaitu sebesar 29,80%. Potensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Purbalingga meliputi padi sebesar 226.707 ton, jagung 43.095 ton, ubi kayu 62.513 ton, dan kedele hanya 134 ton. Dilihat dari produktivitasnya, baik padi, jagung, ubi kayu maupun kedelai dalam kurun waktu tahun 2012-2016 menunjukkan peningkatan. Hal ini didukung dengan berbagai upaya revitalisasi pertanian serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur pertanian. Namun demikian tingkat penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian masih tinggi. Hal ini tentunya perlu dikurangi agar dapat mengurangi pencemaran dan dapat mempertahankan kesuburan tanah pertanian. Secara rinci perkembangan produksi pertanian tanaman pangan, pupuk dan peternakan sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.61.
Perkembangan Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan dan
Penggunaan Pupuk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Produksi pertanian tanaman pangan (per jenis komoditas)						
	Padi	Ton	209.654	226.819	213.030	219.211	226.707
	Jagung	Ton	51.945	53.248	51.945	35.704	43.095
	Kedele	Ton	823	256	823	201	134
	Ubi kayu	Ton	147.643	149.847	2.556	68.448	62.513
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
	Padi Sawah	Kw/Ha	58.89	58,97	59,23	56,48	55,79
	Jagung	Kw/Ha	54.79	54,53	54,73	56,34	52,64
	Kedele	Kw/Ha	16.67	16,02	16,11	14,15	15,07
	Ubi kayu	Kw/Ha	299.80	281,06	281,19	272,16	280,07
3	Tingkat penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian (Ton)						
	Urea	Ton	15.327	15.237	15.237	14.819	15.425
	ZA	Ton	1.098	1.098	1.098	891	865
	SP36	Ton	1.407	1.407	1.407	1.340	1.402
	Phonska	Ton	2.901	2.901	2.901	5.101	5.998
	Organik (Pabrikan)	Ton	732	732	732	3.172	992

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, 2017

Potensi peternakan di Kabupaten Purbalingga yang utama adalah sapi potong, kambing, ayam ras petelur, ayam buras, dan ayam ras potong. Jumlah ternak sapi potong cenderung mengalami penurunan, tahun 2012 tercatat sebanyak 17.896 ekor turun menjadi sebesar 11.472 ekor di tahun 2016. Sedangkan untuk populasi kambing dan domba mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 populasi ternak kambing berjumlah 295.545 ekor dan pada tahun 2016 naik 33,4% atau menjadi sebanyak menjadi 394.245 ekor. Jumlah populasi ternak dan produksi hasil peternakan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.62.
Jumlah Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah populasi ternak per jenis:						
	Sapi potong	Ekor	17.879	12.904	13.210	13.522	11.472
	Sapi perah	Ekor	83	194	189	116	110
	Kerbau	Ekor	1.537	1.129	1.194	1.152	1.215
	Kambing	Ekor	295.545	296.325	293.362	375.471	394.245
	Domba	Ekor	45.208	45.329	44.876	56.821	59.662
	Ayam buras	Ekor	1.949.465	1.955.465	1.485.104	2.139.738	2.246.725
	Ayam Ras petelur	Ekor	895.480	865.600	725.459	738.009	774.909
	Ayam Ras pedaging	Ekor	4.940.500	6.500.000	3.470.585	4.570.760	4.799.298
	Itik	Ekor	108.846	109.096	99.645	119.326	62.636
	Puyuh	Ekor	243.391	106.202	56.128	57.610	82.894
2.	Jumlah produksi hasil peternakan						
	Daging	Kg	6.817.619	1.182.394	962.493		
	Telur	Ton	3.102	3.003	6.529	5.396	5.835
	Susu	Liter	74.825	285.275	268.888	269.941	157.562

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, 2017

4. Kehutanan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dilihat berdasarkan statusnya terdiri dari dari hutan negara dan hutan hak. Pemerintah telah menetapkan hutan berdasarkan fungsinya, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota relatif terbatas, yaitu hanya pada pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten/kota dalam upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Beberapa peran dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten yaitu melakukan pencegahan kerusakan hutan dan lahan, serta penanganan lahan kritis.

Di Kabupaten Purbalingga terdapat hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Saat ini luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Purbalingga adalah 14.592 ha. Hutan produksi adalah kawasan

hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Produksi beberapa hasil hutan kayu di Kabupaten Purbalingga sampai pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan produksi tahun 2012. Peningkatan khususnya pada jenis kayu jati dan mahoni. Produksi hutan non kayu juga mengalami peningkatan khususnya pada jenis kayu bakar dan kopal. Peningkatan produksi hasil hutan kayu di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2012 sampai dengan 2017 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.63.
Produksi Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2017

No	Uraian	Satu-an	Capaian					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jenis Produksi Hasil Hutan Kayu							
	Jati	m3	875.570	1.166,54	3.280,57	2.478,90	1.922,95	3.338,00
	Mahoni	m3	1.055	1.610,40	5.713,93	2.157,77	1.832,31	9.286,00
	Pinus	m3	1.914,60	2.546,87	4.769,54	18.629		
	Albasia	m3	7.450,32	8.234,52	258.527,25	176.034	159.690,35	35.128,00
	Kayu lain (Rimba campuran)	m3	-	9.069,99	193.807,74	193.707,76	136.116,34	6.040,00
2.	Jumlah Produksi Hasil Hutan Nonkayu							
	Kayu Bakar	Ton	1.517	-	-	-	-	-
	Kopal	Ton	169.394	17,96	2.576	17,96	-	-
	Getah Pinus	Ton	3.982	753,45	18.342	753,45	-	-

Sumber : Dinas Pertanian. 2017 dan Purbalingga Dalam Angka. 2018

5. Energi dan SumberDaya Mineral

Kewenangan pemerintah daerah pada urusan energi dan sumberdaya mineral sangat terbatas, hanya terkait dengan pengembangan energi baru dan terbarukan yaitu Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota. Kinerja pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rasio elektrifikasi, dan Jumlah sumber energi / pembangkit listrik non PLN.

Rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN) selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 166.984 rumah tangga pada tahun 2012 meningkat menjadi 215.046 rumah tangga pada tahun 2016 atau

mengalami peningkatan sebesar 28,8 persen. Meningkatnya kebutuhan listrik diikuti pula dengan peningkatan daya listrik terpasang yang semula sebesar 142.065.896 KVA di tahun 2012 naik menjadi 199.645.416 KVA pada tahun 2016.

Data tahun 2015, rasio elektrifikasi di wilayah Kabupaten Purbalingga sebesar 81,41%, dan tahun 2017 sebesar 92,75% artinya masih ada 7,25% rumah yang belum terjangkau listrik. Keterbatasan pelayanan listrik PLN di Kabupaten Purbalingga di wilayah yang agak terpencil menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan listrik. Untuk meningkatkan ketersediaan listrik pada wilayah yang belum terjangkau PLN, telah dikembangkan pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan. Jumlah sumber energi / pembangkit listrik non PLN pada tahun 2016 sebanyak 3 unit. Tentunya diperlukan penambahan pembangkit listrik non PLN agar rasio elektrifikasi rumah tangga meningkat.

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Purbalingga, diantaranya berasal dari sumber mata air yang dikelola oleh PDAM. Penyalurannya dari tahun ketahun mengalami peningkatan.Di dalam Tabel 2.70 termuat data air PDAM yang telah disalurkan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.64.
Jumlah Air PDAM yang Disalurkan, Debit Mata Air dan Debit Sungai diKabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Indikator	Satu-an	Capaian Kinerja				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Air PDAM disalurkan	m ³	7.711.296	8.092.668	8.713.470	8.748.210	9.607.779
2	Debit mata air	m ³ /dtk	699,74	80-1000	80-1000	75 - 975	75 – 975
3	Debit sungai	m ³ /dtk	0.026-17,33	0.026-17,33	0.026-17,33	0.026-17,33	0.026-17,33

Sumber : DPU-PR Kabupaten Purbalingga.2017

6. Perdagangan

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perdagangan mencakup Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; Sarana Distribusi Perdagangan; Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Pengembangan Ekspor; serta Standardisasi dan Perlindungan

Konsumen. Di Kabupaten Purbalingga, kinerja urusan perdagangan menunjukkan perkembangan yang baik. Penyelenggaraan perizinan dan pendaftaran diselenggarakan oleh DPMPTSP. Berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana, terlihat bahwa Persentase pasar yang memenuhi persyaratan capaiannya hanya sebesar 90%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat pasar yang memerlukan perbaikan sehingga kondisinya menjadi layak. Sementara itu berkaitan dengan PKL kinerjanya sudah baik, dengan capaian persentase PKL yang tertata sebesar 10%.

Total nilai ekspor dalam kurun waktu lima tahun cenderung meningkat dari sebesar Rp 1.351.921.888.100,- pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp 3.334.842.438.610,- pada tahun 2016. Tentunya jumlah ekspor ini perlu ditingkatkan dengan menambah produk yang bisa diterima pasar internasional melalui pemasaran dan perbaikan mutu produk industri. Adapun berkaitan dengan perlindungan konsumen, kinerjanya sudah optimal ditunjukkan dengan indikator tingkat terlindunginya konsumen yang mencapai 100%, artinya dari seluruh pasar tradisional dan pasar modern yang ada telah dilakukan pengawasan. Data perkembangan kondisi perdagangan di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.65.
Perkembangan Kondisi Perdagangan
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Tingkat Terlindunginya konsumen	%	100	100	100	100	100
2	Penanganan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
3	Total nilai ekspor	Rupiah	1.351.921.888.100	1.671.732.496.600	1.877.254.061.453	3.116.675.176.271	3.334.842.438.610
4	Pembangunan promosi perdagangan Internasional	%	10	10	10	10	10
5	Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	Produk	4	4	4	4	4
6	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	10	10	10	10	10
7	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	90	90	90	90	90
8	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga. 2017

7. Perindustrian

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perindustrian mencakup Perencanaan Pembangunan Industri; Perizinan; dan Sistem Informasi Industri Nasional. Jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu empat tahun dari sebesar 41.121 unit pada tahun 2012 menjadi sebanyak 42.929 unit pada tahun 2016. Jumlah sentra industri juga menunjukan peningkatan dari sebanyak 191 pada tahun 2012 menjadi 212 pada 2016.

Berkaitan dengan inovasi iptek, jumlah industri mikro kecil dan menengah menggunakan inovasi teknologi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 609 unit dan meningkat pada tahun 2016 menjadi sebanyak 649 unit. Sementara itu persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi selama 5 tahun menunjukkan peningkatan, dari 18,74% pada tahun 2012 menjadi 28,74% di tahun 2016. Berkaitan dengan penggunaan bahan baku, Jumlah industri berbahan baku lokal meningkat dari sebanyak 23.115 unit pada tahun 2012 menjadi 25.405unit pada tahun 2016. Adapun perkembangan indikator kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66.
Perkembangan Kondisi Perindustrian Kabupaten Purbalingga 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	2,33	2,46	2,83	3,25	3,72
2	Jumlah industri (rumah tangga, kecil, menengah) yang menggunakan inovasi teknologi	Unit	609	632	642	645	649
3	Jumlah penerapan standar-isasi produk industri (SNI)	Unit	5	6	7	7	8
4.	Jumlah industri kecil dan menengah	Unit	41.121	39.236	42.108	42.719	42.929
5.	Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	1-2	2-2	2-3	2-3	2-3
6.	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	18,74	20,96	23,08	26,22	28,74
7.	Persentase klaster industri yang berkembang	%	37,17	38,89	39,42	41,02	42,18
8.	Jumlah sentra industri	Unit	191	195	198	205	212
9.	Jumlah industri berbahan baku lokal	Unit	23.115	24.865	25.120	25.374	25.405

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga. 2017

8. Transmigrasi

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk salah satunya dilakukan dengan transmigrasi penduduk. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari daerah yang kepadatan penduduknya tinggi ke daerah yang kepadatan penduduknya rendah. Tujuan dari transmigrasi yaitu melakukan penempatan penduduk secara merata diseluruh daerah. Realisasi pemberangkatan transmigrasi dari Kabupaten Purbalingga 5 (lima) tahun terakhir seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.67.
Pemberangkatan Transmigrasi
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2017

No	Pemberangkatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Transmigran Umum	15 KK / 66 jiwa	2 KK/ 5 jiwa	2 KK/ 7 jiwa	10 KK/ 33 jiwa	-

Sumber : Purbalingga Dalam Angka.2014- 2018

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Kecenderungan praktik pemerintahan dewasa ini menunjukkan kuatnya semangat untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kecenderungan ini didorong oleh semakin derasnya tuntutan demokrasi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (termasuk hak memperoleh informasi yang benar). Praktik pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus dilakukan secara terbuka dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat. Konsekuensi dari transparansi pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Ada beberapa ukuran untuk menilai tatakelola pemerintahan daerah antara lain kepuasan masyarakat, pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja sebuah pemerintahan. Indeks kepuasan masyarakat yang diukur dari indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai 77,96 dan meningkat dari tahun 2015 yakni sebesar 77,6. Sedangkan opini laporan keuangan baru mencapai opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan yang dikecualikan faktor pengelolaan aset.

Indikator kinerja lain yang menunjukkan pengelolaan pemerintahan yang profesional adalah nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada 2 (dua) tahun terakhir nilai AKIP baru mencapai nilai CC. Selengkapnya nilai akuntabilitas secara rinci tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel2.68.
Nilai Akuntabilitas Kinerja PemerintahKabupaten Purbalingga 2015 – 2016

Komponen		Skor		
		2015	2016	SkorMaksimum
1	Perencanaan Kinerja	18,45	17,84	30
2	Pengukuran Kinerja	7,47	9,55	25
3	Pelaporan Kinerja	9,71	8,96	15
4	Evaluasi Internal	5,25	5,62	10
5	Capaian Kinerja	9,32	8,06	20
Nilai Hasil Evaluasi		50,20	50,03	100
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	AA

Sumber : Kemenpan dan RB, 2017

2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

A. Rata-Rata Pengeluaran Penduduk

Pengeluaran rata-rata penduduk per kapita sebulan hasil Susenas 2016 di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sebesar 652.793 rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 649.147 rupiah per kapita sebulan. Kenaikan ini dimungkinkan karena naiknya harga berbagai jenis kebutuhan penduduk yang ditandai dengan adanya inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2016.

Pada tahun 2016, rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Purbalingga digunakan untuk kebutuhan makanan sebesar Rp. 335.432,- atau sebesar 51,38 persen, sedangkan sisanya sebesar 48,62 persen (Rp. 317.361,-) dikeluarkan untuk kebutuhan bukan makanan.

Tabel 2.69.
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis
Pengeluaran Kabupaten Purbalingga, 2015-2017

Jenis Pengeluaran	2015		2016		2017	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
Makanan	318.784	49,11	335.432	51,38	387.634	52,18
Bukan Makanan	330.363	50,89	317.361	48,62	355.196	47,82
Jumlah	649.147	100,00	652.793	100,00	742.830	100

Sumber : Susenas 2015-2016 dan Purbalingga Dalam Angka. 2018

Persentase pengeluaran untuk kebutuhan makanan selama kurun waktu 2015-2017 mengalami kenaikan dari 49,11 persen pada tahun 2015 menjadi 52,18 persen pada tahun 2017. Sebaliknya persentase pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan menurun dari 50,89 persen menjadi 47,82 persen.

Pola pengeluaran penduduk seharusnya bergeser dari yang sebelumnya sebagian besar untuk pengeluaran makanan menuju pengeluaran untuk non makanan. Perubahan pendapatan seseorang diharapkan akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, diharapkan semakin tinggi pengeluaran bukan makanan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

B. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Jembatan dan Jalan

Kondisi panjang jalan di Kabupaten Purbalingga tahun 2017 sudah mencapai 888,087km. Persentase jalan kondisi baik menunjukkan peningkatan dari sebesar 75,96% pada tahun 2013 menjadi sebesar 84,06 persen pada tahun 2017.

Tabel 2.70.
Perkembangan Panjang Jalan di
Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang jalan	Km	710,204	710,204	710,204	783,933	888,087
2	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	75,96	80,70	86,57	85,27	84,06

Sumber: DPU-PR Kabupaten Purbalingga

2. Drainase

Drainase atau saluran air permukaan dan bawah permukaan merupakan salah satu infrastruktur/prasarana dasar yang dirancang bangun untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam menata lingkungan hidup yang aman, nyaman, bersih, dan sehat serta keberlanjutan. Fungsi utama drainase adalah untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah tanah) dan atau bangunan resapan.

Tabel 2.71.
Kondisi Jaringan Drainase di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%	20	45,45	45,45	45,45	45,45
2	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	2,10	10,02	10,56	10,87	9,56

Sumber: DPU-PR Kabupaten Purbalingga

C. Sumber Daya Manusia

1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun+) dengan penduduk produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Selanjutnya akan semakin besar pula hambatan tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Dari seluruh penduduk Kabupaten Purbalingga hasil Susenas 2016, sebanyak 26,00 persen adalah kelompok umur anak-anak (0-14 tahun);

65,48 persen adalah kelompok umur produktif (15-64 tahun) dan 8,52 persennya adalah kelompok umur tua (65 tahun ke atas).

Tabel 2.72.
Rasio Ketergantungan
Kabupaten Purbalingga, 2015– 2016

Uraian	2015	2016
Rasio ketergantungan muda	41,17	39,38
Rasio ketergantungan tua	12,18	13,01
Rasio ketergantungan	53,35	52,72

Sumber : Susenas 2015-2016

Rasio ketergantungan penduduk pada tahun 2016 sebesar sebesar 52,72 yang artinya diantara 100 orang penduduk produktif harus menanggung sekitar 52 orang penduduk tidak produktif yaitu 39 anak-anak dan 13 orang lansia. Rasio ketergantungan ini mengalami penurunan dibandingtahun 2015 dimana 100 penduduk produktif harus menanggung beban 53 orang penduduk tidak produktif yaitu 41 anak-anak dan 12 orang lansia.

Angka rasio ketergantungan muda lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan tua. Hal ini menunjukkan perlunya program-program pembangunan yang diprioritaskan untuk memperkecil rasio ketergantungan anak misalnya penguatan program Keluarga Berencana (KB) dan program pendidikan untuk penduduk usia muda.

2. Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan penduduk juga dapat dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Penduduk dengan pendidikan hingga SD termasuk mereka yang belum pernah sekolah tercatat sekitar 65,00 persen, dengan rincian; tidak/belum pernah sekolah sebanyak 2,71 persen, tidak/belum menamatkan pendidikannya di bangku Sekolah Dasar sebanyak 24,07 persen, dan yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai Sekolah Dasar sebesar 38,22 persen. Proporsi yang cukup tinggi ini membawa konsekuensi antara lain upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun keterampilan mereka yang cukup minim.

Tabel 2.73.
Persentase Penduduk 10 tahun Ke Atas
Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan
Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+ Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Tidak/belum sekolah	1,69	2,62	3,69	4,60	2,71	3,63
Tidak/belum tamat SD	23,70	20,55	24,43	23,58	24,07	22,10
Tamat SD/MI	37,59	36,46	38,82	31,37	38,22	33,86
Tamat SMP/MTs	16,66	21,90	17,23	23,97	16,95	22,95
Tamat SMA/SMK	16,36	14,22	11,73	11,87	14,00	13,02
Diploma/Universitas	4,00	3,62	4,10	4,61	4,05	4,44
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber : Susenas 2016 dan Purbalingga Dalam Angka. 2018

Secara umum di tahun 2016 maupun di tahun 2017, tingkat pendidikan laki-laki relatif lebih baik dari perempuan. Persentase penduduk laki-laki berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah dan tidak/belum tamat SD lebih kecil dibandingkan perempuan seperti terlihat pada table diatas. Persentase penduduk perempuan 10 tahun ke atas yang tamat hingga tingkat pendidikan SMP/ sederajat sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki.Pada tingkat SMA/SMK persentase laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, sementara penduduk yang tamat hingga tingkat diploma/universitas persentase laki-laki dan perempuan relatif sama.

Di tahun 2016, penduduk laki-laki yang tamat pendidikan SD/ sederajat sebanyak 37,59 persen dan perempuan 38,82 persen, sedangkan di tahun 2017 untuk laki-laki sebanyak 36,46 persen dan perempuan 31,37 persen. Untuk penduduk laki-laki yang berpendidikan hingga tingkat SMP/ sederajat di tahun 2016 sedikit lebih kecil dibanding perempuan yaitu laki-laki 16,66 persen sedangkan perempuan 17,23 persen berbeda untuk jenjang SMA/SMK sederajat sebesar 16,36 persen penduduk laki-laki telah menamatkan pendidikannya lebih tinggi dari perempuan 11,73 persen. Sementara itu, pada tahun 2016 jumlah laki-laki yang menamatkan pendidikannya sampai dengan tingkat perguruan tinggi adalah

4,00 persen dan perempuan yaitu 4,10 persen sedangkan pada tahun 2017 laki-laki sebanyak 3,62 persen dan perempuan sebanyak 4,61 persen.

3. Penduduk Usia Kerja dan Kegiatannya

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas dan diklasifikasikan lagi menjadi penduduk yang masuk sebagai angkatan kerja dan penduduk yang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang ikut berpartisipasi dalam lapangan kerja, baik statusnya sudah bekerja maupun yang pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja aktifitasnya adalah yang tidak terkait dengan bekerja secara produktif misalnya sekolah dan mengurus rumah tangga.

Di Kabupaten Purbalingga jumlah angkatan kerja dari penduduk berumur 15 tahun ke atas sebanyak 489.947 orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 193.607 orang yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74.
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga, 2017

Kegiatan Utama		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Angkatan Kerja	278.623	211.324	489.947
	1.1 Bekerja	261.078	202.731	463.809
	1.2 Pengangguran Terbuka	17.545	8.593	26.138
2.	Bukan Angkatan Kerja	54.974	138.633	193.607
	2.1 Sekolah	21.894	18.905	40.799
	2.2 Mengurus Rumah Tangga	16.585	112.253	128.838
	2.3 Lainnya	16.495	7.475	23.970
	Jumlah	333.597	349.957	683.554

Sumber : Purbalingga Dalam Angka. 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada penduduk yang termasuk angkatan kerja, jumlah terbesar adalah penduduk yang bekerja sebanyak 463.809 orang; sedangkan pada penduduk bukan angkatan kerja yang paling besar adalah penduduk yang mengurus rumah tangga sebanyak 128.838 orang.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 dan Realisasi RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021

2.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Kinerja pembangunan Urusan Pendidikan ditunjukkan dengan 29 indikator kinerja, dengan capaian seperti tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.75.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Purbalingga

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Real-i-sasi	Capai-an (%)		
Program Pendidikan Anak Usia Dini									
1.	APK PAUD	%	67,7	100	82,70	77,03	93,14	28,9	▶
2.	Cakupan Guru PAUD memenuhi kualifikasi	%	34,5	43	36,90	67,31	182,41	386,0	●
Program Wajar Dikdas 9 Tahun									
3.	APK SD/Sederajat	%	108	110	109,12	109,91	100,72	95,5	▶
4.	APM SD/Sederajat	%	91,5	93,5	91,25	95,34	104,48	192	●
5.	APK SMP/Sederajat	%	100,15	100,3	100,20	102,36	102,16	102,05	●
6.	APM SMP/Sederajat	%	69,8	72,5	69,90	73,73	105,48	145,6	●
Program Pendidikan Non Formal									
7	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	%	52	100	64,00	9,38	14,65	9,38	▼
8.	Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	%	22	100	39,00	5,56	14,26	5,56	▼
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
9.	Persentase tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan	%	80,5	100	90,00	94,88	105,42	74	▶
Program Manajemen Pendidikan									
10.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip manajemen berbasis Sekolah	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	●
11.	Cakupan capaian SPM SD/ sederajat	%	84	98,04	84,50	88,40	104,62	31	▶

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
12.	Persentase angka kelulusan SD/ sederajat	%	99,9	100	100,00	100,00	100,00	100,00	●
13.	Persentase angka kelulusan SMP/ sederajat	%	99,96	100	100,00	100,00	100,00	100,00	●
14.	% angka putus sekolah SD/ sederajat	%	0,21	0,17	0,20	0,03	666,67	450	●
15	% angka putus sekolah SMP/ sederajat	%	0,9	0,69	0,87	0,48	181,25	200	●





Keterangan :
 - OPD Pengampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Pendidikan, terlihat bahwa dari 29 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 11 target indikator berstatus telah tercapai, 4 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 14 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2017 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

B. Kesehatan

Kinerja Urusan Kesehatan ditunjukkan dalam 69 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.76.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program pelayanan KIA, remaja dan Usia									
1.	Angka Kematian Ibu	per 100.000	130	110	128	76,76	166,75	167	
2.	Kasus Kematian Bayi	per 1.000	10	9,2	9,6	8,03	119,55	120	
3.	Angka Kematian Balita	per 1.000	11,81	11,65	11,8	9,80	120,41	120	
Program pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Kesehatan									
4.	Persentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai	%	70	100	90	80	88,89	33,3	

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
	standar								
5.	Persentase ketersediaan obat generik dan esensial sesuai standar dan kebutuhan	%	85	95	85	85	100	89	▶
Program peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan kesehatan									
6.	Jumlah Puskesmas perawatan	Unit	11	13	12	11,00	92	85	▶
7.	Jumlah puskesmas mampu bersalin	Unit	12	22	17	14,00	82	20	▶
8.	Jumlah Puskesmas poned	Unit	5	7	7	6,00	85,71	50	▶
9.	Jumlah RS Ponek	Unit	1	2	1	1,00	100	50	▶
10.	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Unit	7	22	15	15,00	100	53	▶
11.	Jumlah RS terakreditasi	Unit	1	3	1	3,00	300	100	●
Program perbaikan gizi masyarakat									
12.	Prevalensi balita gizi kurang	%	3	2,5	3	2,69	111,52	62	▶
13.	Cakupan bayi dengan BBLR	%	5,3	5	5,2	4,9	106,12	133	●
14.	Cakupan kecamatan bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100	100	●
15.	Cakupan desa/kelurahan dengan konsumsi beryodium baik	%	100	100	100	98	98	98	●
Program promosi kesehatan dan Pemeberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta Penyehatan Lingkungan									
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	100	●
17.	Cakupan kepemilikan jamban keluarga	%	80	90	81	71,53	88,31	0	▼
18.	Cakupan akses jamban keluarga	%	80	100	90	84,34	93,71	22	▶
19.	Cakupan desa memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	80	100	90	86,60	96,22	33	▶
20.	Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	70	100	75	75,10	100,13	17	▼
21.	Cakupan desa Open Defecation Free (ODF)	%	32	82	50	78,00	156	68	▶
22.	Cakupan rumah tangga ber PHBS	%	75	93	87	75,60	86,9	3	▼

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
23.	Cakupan Posyandu Mandiri	%	60	75	65	65,00	100	13	▼
24.	Cakupan kepesertaan KB aktif	%	90	95	90	81,30	90	0	▼
25.	Cakupan rumah sehat	%	70	87	75	86,60	115	98	▶
26.	Cakupan desa/kelurahan melakukan STBM	%	80	100	90	92,00	102,22	60	▶
27.	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal	%	91	100	92	65,50	71,2	0	▼
28.	Proporsi Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) yang memenuhi syarat	%	60	85	65	75,30	115,85	61	▶
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta kesehatan matra									
29.	Cakupan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	100	●
30.	Case Fatality Rate (CFR) DBD	ks/10.000	2	2 % (5 kasus)	2	2,00	100	100	●
31.	Cakupan balita diare yang ditangani	%	100	100	100	100,00	100	100	●
32.	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	%	100	100	100	100,00	100	100	●
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan									
33.	Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi	%	100	100	100	100	100	100	●
34.	Cakupan pelatihan tenaga kesehatan	%	100	100	100	2,83	2,83	2,83	▼
35.	Rasio dokter umum per jumlah penduduk	%	10,51	40	10,51	15,72	149,57	18	▼
36.	Rasio dokter spesialis per jumlah penduduk	%	4,92	6	4,92	6,86	139	180	●
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat									
37.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100,00	100	100	●
38.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	%	100	100	100	100,00	100	100	●
39.	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan	%	80	100	90	93,76	104	94	▶

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
	kesehatan								
Program Pengawasan Obat dan Makanan									
40	Cakupan pengawasan peredaran obat	%	100	100	100	100	100	100	●
41.	Cakupan pemeriksaan makanan dan minuman yang diperdagangkan	%	100	100	100	100	100	100	●
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan									
42.	Cakupan BLUD pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah	Unit	1	1	1	1,00	100	100	●
43	Cakupan Puskesmas terakreditasi	%	7	22	15	15,00	100	53	▶
44.	Cakupan Rumah Sakit terakreditasi	%	1	3	1	2,00	200	50	▶
45.	Cakupan pelayanan perijinan/registrasi kesehatan	%	100	100	100	100,00	100	100	●
46.	Cakupan pemanfaatan SIM pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	%	100	100	100	50,00	50	50	▶
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan									
47.	Net Death Rate (NDR)	%	1	10	2	0,5	400	5,556	▶
48.	Gross Death Rate (GDR)	%	1	20	1	1,9	52,63	4,74	▶
49	Length Of Stay (LOS)	%	1	9	2	2,6	130	29	▶
50	Turn Over Interval (TOI)	%	3	3	3	5	167	167	●
51	Bed Turn Over (BTO)	%	50	50	50	2	4	4	▼
52	Net Death Rate (NDR)	%	1	10	2	0,5	400	5,556	▼

Keterangan :
 - OPD Pengampu Dinas Kesehatan
 - ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan kesehatan, terlihat bahwa sebanyak 67 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 23 target indikator berstatus telah tercapai, 19 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnyabahkan ada yang sudah melebihi target

pertahunnya, dan 25 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2017 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan dalam 10 indikator, dengan capaian pada tabel berikut ini.

Tabel 2.77.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Penataan Ruang Daerah									
1.	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah	Doku-men	1	1	1	1	100	100	●
2.	Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	●
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan									
3.	Persentase bangunan cagar budaya yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	100	●
4.	Tersedianya produk hukum penataan bangunan dan lingkungan	Doku-men	1	1	1	1	100	100	●
Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan									
5.	Jumlah taman kota	Bh	10	12	11	10	100,00	90,91	▶
6.	Luas taman	Ha	4,57	5,37	4,57	4,57	100,00	85,10	▶
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Irigasi dan Sumberdaya Air									
7.	Persentase bendung dan irigasi kondisi baik	%	38,7	40,00	38,70	41,56	107,39	103,90	●
8.	Jumlah bendung	Bh	180	184	180	180	100	97,83	▶
9.	Jumlah irigasi	Bh	256	256	256	256	100	100	●
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pemerintahan									
10.	Persentase bangunan pemerintah kondisi baik	%	NA	60	30	30	100	50	▶

Keterangan :
- OPD Pengampu DPUPR
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terlihat bahwa dari 12 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 7 target indikator berstatus telah tercapai dan 5 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditunjukkan dalam 3 indikator, dengan capaian pada tabel bawah ini.

Tabel 2.78.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD di 2017 (%)	Status RKPD
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan									
1	Cakupan rumah layak huni	%	NA	93.9	90.5	91.93	101.58	97.90	
Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Prasarana Permukiman									
2	Cakupan penanganan prasarana air bersih	%	92	100	88.57	82.02	92.60	0.00	
3	Cakupan penanganan prasarana sanitasi	%	85	100	85	83.28	97.98	0.00	

Keterangan :
 - OPD Pengampu Dinperkim
 - ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terlihat bahwa dari 3 target indikator RPJMD 2016-2021, hanya1 target indikator kinerja yang tercapai target tahunannya yaitu cakupan rumah layak huni dan masih ada waktu untuk pencapaian target RPJMD,2 indikator tidak tercapai baik target tahunan maupun RPJMD sehingga perlu upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2017 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan dalam 13 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.79.
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s.d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
OPD Pengampu BPBD									
Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam									
1.	Cakupan pelayanan korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	<div></div>
2.	Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	desa	100	100	100	100	100	100	<div></div>
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	NA	60	40	40	100	67	<div></div>
4.	Tingkat waktu tanggap	%	100	100	100	100	100	100	<div></div>
5.	Presentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	100	100	100	100	100	100	<div></div>
6.	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 - 5000 liter pada WMK	%	NA	17	14	14	100	82	<div></div>
Program Pengembangan Wawasan kebangsaan									
7.	Jumlah kegiatan aksi massa bernuansa SARA	%	0	0	0	0	100	100	<div></div>
Program Pembinaan Kehidupan Beragama									
8.	Tingkat fasilitasi kegiatan keagamaan	kgt	175	215	175	175	100	81,39	<div></div>
OPD Pengampu Pol PP									
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.									
9.	Persentase penanganan pelanggaran K3	%	100	100	100	100	100	100	<div></div>
Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba									
10.	Intensitas sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	NA	NA	NA	10	10	100	NA	<div></div>

Keterangan :
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, terlihat bahwa dari 13 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 6 indikator targetnya tercapai, 7 target indikator akan tercapai (tercapai di target tahun 2017 namun belum tercapai pada target akhir tahun RPJMD).

F. Sosial

Kinerja Urusan Sosial ditunjukkan dalam 6 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.80.
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Real-i-sasi	Capai-an (%)		
Program Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial									
1.	Cakupan PMKS yang terlayani	%	NA	110	40	68,56	171,40	62	
2.	Cakupan penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial									
3.	Cakupan LKS yang dibina	%	NA	100	148	5,00	3	5	
4.	Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	%	NA	100	98	98	100	98	
Program Fasilitas, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Bencana									
5.	Cakupan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	%	NA	100	18	197,00	1094	197	
6.	Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	

Keterangan :
 - OPD Pengampu DinsosdaldukKBP3A
 - ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan sosial, terlihat bahwa dari 6 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 2 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2017 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

2.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Kinerja pembangunan urusan tenaga kerjaditunjukkan dalam 5 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2017 dan capaian target RPJMDsebesar 100% atau lebih), sebanyak 1 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras(capaian target 2017 kurang dari 100%) dan 2 indikator akan tercapai (capaian target 2017 sebesar 100% atau lebih namun capaian target RPJMD belum 100%).Gambaran pencapaian indikator urusan tenagakerjasampai tahun 2016sebagaimana dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.81.
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisi	Capaian (%)		
Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja									
1	Cakupan pencari kerja yang ditempatkan	%	51	75	58	41,40	71	55	▶
2	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	%	2	2	2	4,30	215	23	▶
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial									
3	Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	%	90	95	90	100	111	105	●
4	Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial	%	75	90	77	81,00	105	40	▶
5	Rasio tenaga kerja terhadap upah sesuai UMK	%	80	95	85	93,50	110	90	▶

Keterangan :
- OPD Pengampu Dinaker
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dalam 5 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.82.
Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	Orang	13	4	11	11	100	28,57	
2.	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta	Orang	35.319	44.592	37.084	14.797	40	0	
3.	Tingkat partisipasi perempuan dilembaga politik	Orang	15	15	15	12	80	17	

Keterangan :
- OPD Pengampu DinsosdaldukKBP3A
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terlihat bahwa dari 5 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator kinerja tercapai pada target tahunan namun belum mencapai target RPJMD dan 2 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2017 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

C. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan dalam 18 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.83.
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB									
1.	Cakupan pasangan usia subur yang ingin berKB tidak terpenuhi	%	11,75	9	11,05	10,03	114,66	63	

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
	(unmet need KB)								
2.	Drop Out KB	%	24	15	23	18,18	126,51	65	▶
3.	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	●
4.	Jumlah peserta KB aktif pria	%	5125	5250	5.150	6.418	124,62	1034	●
Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja									
5.	Persentase kelompok PIK Remaja yg dibina	%	100	100	100	100	100	100	●
Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB									
6.	Rasio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) dibanding jumlah desa/kelurahan	%	1:2	1:6	1:2	1:6	94	100	●
7.	Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) dibanding jumlah desa/ kelurahan	%	1:1	1:1	1:1	1:1	100	100	●
8.	Rasio Sub PPKBD dibanding jumlah desa/kelurahan	%	1:1	1:1	1:1	1:1	100	100	●
9.	Persentase kelompok Prio Utomo yg dibina	%	100	100	100	100	100	100	●
Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera									
10.	Cakupan anggota UPPKS yang mengikuti KB	%	77,19	77,2	77,19	78,26	101,39	107	●
11.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	●
12.	- Bina Keluarga Balita	%	34,34	34,70	34,45	34,87	101,22	147	●
13.	- Bina Keluarga Remaja	%	24,6	25	24,65	25,32	102,72	180	●
14.	- Bina Keluarga Lansia	%	25,61	26	25,65	27,55	107,41	497	●
15.	Cakupan anggota BKB ber-KB	%	86,7	87	86,75	87,74	101,	101	●

Keterangan :
- OPD Pengampu DinsosdaldukKBP3A
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terlihat bahwa dari 18 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 14 target indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator kinerja tercapai untuk target tahun 2017 dan diharapkan dapat tercapai di akhir tahun RPJMD dan 2 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2017 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

D. Pangan

Kinerja pembangunan urusan pangan ditunjukkan dalam 11 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai tahun 2017 dan diharapkan dapat tercapai diakhir RPJMD dan, sebanyak 6 indikator berstatus belum tercapai baik untuk target tahun 2017 dan target RPJMD. Sedangkan 4 indikator belum teridentifikasi status capaiannya. Secara rinci kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.84.
Capaian Kinerja Urusan Pangan




No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan									
1	Ketersediaan Pangan	kg/cap /tahun	NA	175	166	174	105	99	▶
2	Angka Konsumsi Energi	kg/cap /tahun	2096,96	2.200	2.155	2.050	95	93	▶
3	Angka Konsumsi Protein	kg/cap /tahun	57,96	71,81	60,73	52,00	86	72	▶
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	angka	86,86	99,51	89,39	85,00	95	85	▶
5	Persentase pangan aman yang beredar di masyarakat	%	89	99,00	91,00	85,00	93	86	▶
Program Penguatan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat									
6	Cakupan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	%	25,94	30	26,78	20,80	78	69	▶
7	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton SB	10	22,50	12,50	12,00	96	53	▶

Keterangan :
- OPD Pengampu DKPP
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

E. Pertanian

Kinerja Urusan Pertanian ditunjukkan dalam 3 indikator, dengan capaian sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.85.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu- an	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-	2017			Capaian RPJMD di 2017	Statu s RKPD
					Tar get	Real isasi	Capaian (%)		
Program Pengelolaan Pertanahan									
1	Rasio tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat	%	50	50	60	63,07	105,12	26,00	
2	Cakupan penandaan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah	%	50	50	70	70	100,00	40,00	
3	Cakupan penyelesaian proses pengadaan tanah pemerintah daerah	%	80	50	80	55	68,75	110,00	

Keterangan :
- OPD Pengampu Dinrumkim
- : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Pertanian, terlihat bahwa semua target indikator RPJMD 2016-2021 sudah tercapai.

F. Lingkungan Hidup

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan dalam 16 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.86.
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	Program Indikator kinerja daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar- get	Real- isasi	Capai- an (%)		
Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem									
1	Jumlah mata air yang dilindungi	Lokasi	8	13	9	9	100	20	
2	Jumlah wilayah/desa yang telah memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Desa	3	8	4	4	100	20	
Program pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup									
3	Cakupan perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL, SPPL)	Perusa- haan	NA	781	781	781	100	100	

No.	Program Indikator kinerja daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Real-isasi	Capai-an (%)		
4	Cakupan Perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran air sesuai persyaratan teknis	Perusa-haan	22	32	24	24	100	120	●
5	Cakupan perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan khusus	Perusa-haan	11	16	12	12	100	120	●
6	Indek Kualitas Udara (minimal 84)	%	81	85	81,5	81,5	100	197	●
7	Indek Kualitas Air (minimal 55)	%	52	56	52,5	52,5	100	82	▶
8	Indek Tutupan Lahan (minimal 62)	%	59	63	59,5	59,5	100	148	●
9	Jumlah kelom[pok masyarakat yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelom-pok	16	21	17	17	100	106	●
10	Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL	Perusa-haan	9	14	10	10	100	111	●
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup									
11	Cakupan aduan kasus lingkungan yang tertangani	%	80	100	90	90	100	90	▶

Keterangan :




- OPD Pengampu Dinas Lingkungan Hidup
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup, terlihat bahwa dari 16 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 9 target indikator akan tercapai (sudah tercapai atau melebihi capaian target tahun 2017 namun belum tercapai di capaian RPJMD) dan 5 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2016 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD. Sedangkan 2 indikator kinerja tercapai pada target tahun 2017 namun belum tercapai pada target akhir tahun RPJMD.

G. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan dalam 4 indikator, dengan capaian sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.87.
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Penataan Administrasi Kependudukan									
1.	Cakupan kepemilikan KK	KK	NA	100%	97	97,94	100,97	97,94	
2.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	Org	NA	100%	79	79,43	100,54	79,43	
3.	Tersedianya profil Kependudukan	Buku	NA	100%	100	100	100,00	100,00	
4	K T P	Org	NA	100%	100	92,13	92,13	92,13	

Keterangan :
- OPD Pengampu Dindukcapil
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, terlihat bahwa dari 4 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai dan 3 target akan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

H. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan dalam 12 indikator, dengan capaian sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.88.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa									
1.	Cakupan desa yang melaksanakan musrenbangdes tepat waktu	%	100	100	100	100	100,00	100,00	<div></div>
2.	Cakupan desa/kelurahan yang menyusun profil desa secara tepat waktu	%	100	100	100	100	100,00	100,00	<div></div>
3.	Cakupan desa yang memiliki BUMDes yang	desa	18	90	18	18	100,00	20,00	<div></div>

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
	sehat								
4.	Rasio lembaga Rukun Tetangga (RT) yang aktif	RT	5081	5.081	5.081	5.081	100,00	100,00	●
5.	Jumlah pasar desa yang dibina	pasar	44	94	54	54	100,00	57,45	▶
6.	Cakupan desa yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100	100,00	100,00	●
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa									
7.	Cakupan Posyandu aktif	Unit	1194	1194	1.194	1.194	1.194	100,00	●
8.	Cakupan lumbung desa sehat	Unit	12	12	12	12	100	100,00	▶
9.	Rasio Karang Taruna aktif	Desa dan kel	224 ds, 15 kel	224 ds, 15 kel	235	235	235	100,00	●
10.	Rasio PKK Desa/Kelurahan aktif	Desa dan kel	224 ds, 15 kel	224 ds, 15 kel	235	235	235	100,00	●
11.	Cakupan BP-SPAM aktif	Klp	10	10	10	10	100	100,00	▶
12.	Cakupan KPP Sanitasi Lingkungan aktif	Klp	60	60	60	60	100	100,00	▶

Keterangan :








- OPD Pengampu Dinpermasdes
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017, terlihat bahwa dari 12 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 7 target indikator berstatus telah tercapai, 5 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target.

I. Perhubungan

Kinerja Urusan Perhubungan ditunjukkan dalam 11 indikator, dengan capaian sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.89.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s.d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas									
1.	Cakupan ruas jalan kolektor primer bermarka	M2	2025	1170	3150	2106	66,86	180,00	
	Cakupan ketersediaan fasilitas lalu lintas :								
2.	Traffic light	Unit	1	2	2	2	100,00	100,00	
3.	Warning light	Unit	6	16	2	2	100,00	100,00	
4.	Rambu penunjuk arah	Buah	6	26	4	8	200,00	200,00	
5.	Rambu standar	Buah	100	600	100	150	150,00	150,00	
6.	Traffic cone	Buah	0	500	100	149	149,00	149,00	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan									
7.	Cakupan kendaraan angkutan umum yang laik operasi (lulus uji KIR)	%	NA	100	100	98,65	98,65	98,65	
8.	Persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal	%	NA	100	100	96,80	96,80	96,80	












Keterangan :
 - OPD Pengampu Dinas Perhubungan
 - ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perhubungan, terlihat bahwa dari 8 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 6 target indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya.

J. Komunikasi dan Informasi

Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi ditunjukkan dalam 12 indikator, dengan capaian sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.90.
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s.d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Reali-sasi	Capai-an (%)		
Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi									
1.	Persentase SKPD yang memiliki website	SKPD	28	43	48	31	64,58	20	
2.	Intensitas updating informasi pada website Pemerintah Daerah	hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	100	100	
3.	Cakupan sistem informasi manajemen (SIM) milik Pemerintahan Daerah yang berfungsi dan aktif	SKPD	28	43	31	32	103,23	27	
4.	Jumlah pelayanan publik secara online	Web	2	15	4	3	75	8	
Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik									
5.	Cakupan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi		600	5100	700	1645	235	23	
6.	Cakupan wilayah yang terjangkau oleh siaran radio Pemerintah Daerah	Strem-ing	18	10	18	18	100,00	180,00	
7.	Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan	KIM	9	18	11	11	100,00	61,11	
8.	Cakupan kegiatan penyebaran informasi dan dialog melalui TV dan radio	kali	12	12	12	11	91,67	0	
9.	Cakupan kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan instansi vertikal	kali	2	2	2	2	100,00	100,00	
10	Cakupan komunikasi dan kerjasama dengan media massa (cetak dan online)	kali	18	30	30	32	106,67	106,67	
11.	Cakupan kegiatan desiminasi informasi ke masyarakat melalui media massa	media	20	20	21	23	109,52	115,00	

Keterangan :
 - OPD Pengampu Dinkominfo
 - ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informasi, terlihat bahwa dari 11 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 5 target indikator berstatus telah tercapai, 4 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 2 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2017 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

K. Koperasi dan UKM

Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditunjukkan dalam 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2017, sejumlah 1 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2017 dan target RPJMD sebesar 100% atau lebih), 1 indikator perlu perhatian/upaya keras (capaian target tahun 2017 dan target RPJMD kurang dari 100%), serta 4 indikator telah tercapai pada target tahun 2017 dan akan tercapai di target RPJMD. Gambaran pencapaian indikator urusan Koperasi dan UMKM sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.91.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s.d 2017 (%)	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Penumbuhan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi									
1	Jumlah Koperasi Sehat	unit	110	135	115	143	124,35	132	
2	Jumlah Anggota Koperasi	orang	52.428	52.928	52.528	52.510	99,97	16	
Program Kemitraan, Promosi dan Pemasaran Produk UMKM									
3	Cakupan UMKM yang difasilitasi promosi pemasaran	unit	125	300	150	185	123,33	61,67	
4	Cakupan UMKM yang difasilitasi melalui internet	unit	0	250	50	119	238,00	47,60	

Keterangan :
- OPD Pengampu Dinkop UKM
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

L. Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Target kinerja pembangunan urusan penanaman modal dalam RPJMD 2016-2021 ditunjukkan dalam 8 indikator, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2017 dan target akhir RPJMD sebesar 100% atau

lebih), dan 3 indikator akan tercapai (capaian target 2017 sebesar 100% atau lebih dan target akhir RPJMD kurang dari 100%), dan 1 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai. Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan penanaman modal dan perizinan terpadu sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.92.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s.d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitas Investasi									
1	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMDN (baru)	unit	550	800	600	808	134,67	103	●
2	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMA (baru)	unit	2	12	2	1	50	50	▶
3	Pertumbuhan nilai investasi PMDN (baru/Rp.000)	Rp. (000)	250.000.000	750.000.000	300.000.000	388.038.414	129	52	▶
4	Pertumbuhan nilai investasi PMA (baru/Rp.000)	Rp. (000)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	159.423.203	797	797	●
5	Realisasi investasi total (baru/Rp.000)	Rp. (000)	270.000.000	770.000.000	270.000.000	483.271.457	179	63	▶
Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu									
6	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan	%	81,35	82,25	81,50	81,90	100	100	▶
7	Rata-rata jangka waktu proses perijinan	hari	5,6	4	5,2	5,2	100	124	●
8	Jumlah ijin yang dilayani di PTSP	jenis	14	24	16	27	169	113	●

Keterangan :
- OPD Pengampu Dinkop DPMPTSP
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

M. Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ditunjukkan dalam 6 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.93.
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga


No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capai-an (%)		
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda									
1.	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	Organi-sasi	NA	69	10	23	230,00	33,33	
2.	Cakupan kegiatan kepemudaan yang difasilitasi	Kelom-pok/Orang	NA	132	20	6	30,00	4,55	
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga									
3.	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional/Provinsi	piagam	NA	450	10	6	60,00	1,33	
4.	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional	piagam	NA	135	15	60	400,00	44,44	
5.	Cakupan kelompok/organisasi olah raga yang difasilitasi	Organisasi	NA	6	1	25	2.500,00	416,67	
6.	Jumlah kegiatan olah raga yang difasilitasi	Kegiatan	NA	195	25	26	104,00	13,33	

Keterangan :
 - OPD Pengampu Dinas Pemuda dan Olah Raga
 - ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pemuda dan Olah Raga, terlihat bahwa dari 6 target indikator RPJMD 2016-2021, 1 indikator telah tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 2 indikator kinerja tidak tercapai targetnya sehingga perlu menjadi perhatian serius.

N. Statistik

Kinerja Urusan Statistik ditunjukkan dalam 1 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.94. Capaian Kinerja Urusan Statistik									
No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah									
1.	Cakupan ketersediaan data dasar pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	


Keterangan :

- OPD Pengampu Dinkominfo
-  : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu perhatian/Upaya Keras




Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Statistik terlihat bahwa target indikator RPJMD 2016-2021 berstatus telah tercapai.

O. Persandian

Kinerja Urusan Persandian ditunjukkan dalam 1 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.95. Capaian Kinerja Urusan Persandian									
No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu- an	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016- 2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2016 (%)	Status
					Tar- get	Real- isasi	Capai- an (%)		
Program Pengelolaan Persandian									
1.	Cakupan informasi pemerintah daerah melalui SANTEL yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100	100	100	100	100	100	

Keterangan :










- OPD Pengampu Dinkop Dinkominfo (Tahun 2016 OPD pengampu Setda)
-  : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Persandian terlihat bahwa target indikator RPJMD 2016-2021 berstatus telah tercapai.

P. Kebudayaan

Kinerja Urusan Kebudayaan ditunjukkan dalam 11 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.96.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah									
1.	Cakupan kajian seni	%	68	68	68	47,06	69,21	69,21	
2.	Cakupan fasilitasi seni	%	143	143	143	47,06	32,91	32,91	
3.	Cakupan gelar seni	%	100	100	100	197,14	197,14	197,14	
4.	Cakupan misi kesenian	%	100	100	100	20,00	20,00	20,00	
5.	Cakupan sumber daya manusia kesenian	%	100	100	100	19,85	19,85	19,85	
6.	Cakupan tempat gelar seni	%	100	100	100	11,00	11,00	11,00	
7.	Cakupan organisasi kesenian yang aktif	%	307	307	307	83,78	27,29	27,29	
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya									
8.	Jumlah kunjungan museum dan monumen	orang	200.807	300.000	220.000,00	16.773,00	7,62	5,59	
9.	Cakupan cagar budaya yang dikonservasi	situs	1	1	1,00	287,00	28.700,00	28.700,00	

Keterangan :
 - OPD Pengampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Kebudayaan, terlihat bahwa dari 11 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, 4 akan tercapai, dan 3 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2017 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

Q. Perpustakaan

Kinerja Urusan Perpustakaan ditunjukkan dalam 26 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.97.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan									
Jumlah Perpustakaan									
1.	Umum	Bh	2	2	2	2	100,00	100,00	●
2.	Desa/kel	Bh	66	239	84	84	100,00	35,15	▶
3.	Sekolah/ Madrasah	Bh	811	811	811	811	100,00	100,00	●
4.	Pondok pesantren	Bh	3	18	6	20	333,33	111,11	●
5.	Rumah Ibadah	Bh	4	50	8	30	375,00	60,00	▶
6.	Khusus	Bh	3	12	4	12	300,00	100,00	●
7.	Rasio perpustakaan per jumlah penduduk	%	0,00111125	0,001415	0,00114375	0,001158113	101,26	81,85	▶
8.	Rasio pengunjung pepustakaan per jumlah penduduk	%	0,05	0,125	0,0625	0,053556726	85,69	42,85	▶
Jumlah perpustakaan yang dibina :									
9.	Umum	Bh	27	108	36		-	-	▼
10.	Desa/kel	Bh	57	518	83	83	100,00	16,02	▼
11.	Sekolah/ Madrasah	Bh	3	8	4	4	100,00	50,00	▶
12.	Pondok pesantren	Bh	4	14	6	6	100,00	42,86	▶
13.	Rumah Ibadah	Bh	3	8	4	4	100,00	50,00	▶
14.	Khusus	Bh	94	656	133	133	100,00	20,27	▶
Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar :									
15.	Umum	Bh	1	1	1	1	100,00	100,00	●
16.	Desa/kel	Bh	60	90	66	66	100,00	73,33	▶
17.	Sekolah/ Madrasah	Bh	442	622	478	478	100,00	76,85	▶
18.	Pondok pesantren	Bh	3	18	6	6	100,00	33,33	▶
19.	Rumah Ibadah	Bh	4	14	6	6	100,00	42,86	▶
20.	Khusus	Bh	3	8	4	4	100,00	50,00	▶
21.	Jumlah koleksi buku perpustakaan	Bh	53.283	98.283	62.283	57.046	91,59	58,04	▶
22.	Jumlah judul buku perpustakaan	Bh	28.057	41.857	29.857	30.281	101,42	72,34	▶

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
23.	Jumlah anggota perpustakaan berkartu	orang	15000	40.000	20.000	20.000	100,00	50,00	▶
24.	Jumlah layanan perpustakaan keliling	Bh	370	520	400	400	100,00	76,92	▶
25.	Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti bintek perpustakaan	orang	500	900	540	540	100,00	60,00	▶
26.	Jumlah pustakawan bersertifikat kompetensi perpustakaan	orang	2	7	3	3	100,00	42,86	▶

Keterangan :



- OPD Pengampu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Urusan Perpustakaan, terlihat bahwa dari 26 target indikator RPJMD 2016-2021, sebanyak 5 target indikator berstatus telah tercapai, 17 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya dan 4 target indikator masih perlu perhatian dan upaya serius agar ketidakcapaian pada target tahun 2017 dapat diupayakan tercapai di tahun berikutnya dan/atau diakhir tahun RPJMD.

R. Kearsipan

Kinerja Urusan Kearsipanditunjukkan dalam 3 indikator, dengan capaian pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.98.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-An	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengelolaan Arsip									
1.	Cakupan SKPD/ormas/BUMD/ lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Unit	242	622	482	262	54,36	42,12	
2.	Jumlah arsip daerah yang telah didokumentasikan dalam bentuk elektronik (berkas)	Berkas	8500	50.000	20.000	20.000	100,00	40,00	

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-An	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
3.	Alih media Sistem Informasi Dokumen Masyarakat (SIDOMAS)	Kk	0	59.659	59.659	59.659	100,00	100,00	●

Keterangan :

- OPD Pengampu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- ● : Telah Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kearsipan, terlihat bahwa dari 3 target indikator RPJMD 2016-2021, sejumlah 1 indikator sudah tercapai, dan 2 indikator berstatus akan tercapai atau sudah sesuai harapan target pertahunnya.

2.2.3. Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Target RPJMD 2016-2021 terhadap indikator kinerja pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan dalam 8 indikator, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2017 dan target akhir RPJMD sebesar 100% atau lebih), dan 4 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai. Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.99.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s.d 2017 (%)	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengembangan Perikanan Budidaya									
1	Produksi Ikan Konsumsi	Ton	4943	5.293	5.013	1.303	25	25	▶
2	Produksi Benih Ikan	ekor	125	137.000	127.500	174.293	137	127	●
3	Produksi Ikan Hias	ekor	739	980	789	2.927	371	299	●
Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan									
4	Produksi Olahan Hasil Perikanan	ton	2850	3.200	2.900	1.511	52	47	▶
Program Pengembangan Perikanan Tangkap									
5	Cakupan pelestarian populasi ikan diperairan umum	%	NA	90	77	63	82	70	▶
6	Tingkat konsumsi ikan	kg/ka p/thn	10,8	12	11,10	13,00	117	108	●

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s.d 2017 (%)	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
7	Produksi ikan sungai	ton	240	230	240	253	105	110	●
8	Nilai PDRB sub sektor perikanan	milyar rp	NA	360,00	308,00	111,52	36	31	▶

Keterangan :

- OPD Pengampu DKPP
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

B. Pariwisata

Target RPJMD 2016-2021 terhadap indikator kinerja pembangunan Urusan Pariwisata ditunjukkan dalam 5 indikator, sebanyak 1 indikator akan tercapai (capaian target 2017 sebesar 100% atau lebih dan target akhir RPJMD kurang dari 100%), dan 4 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai.

Tabel 2.100.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Real-i-sasi	Capai-an (%)		
Program Pengembangan Destinasi Wisata									
1.	Jumlah Destinasi Wisata yang difasilitasi/ dikembangkan	DTW	4	36	6	0	-	0,00	▼
2.	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Desa	NA	27	4	4	100,00	14,81	▼
Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata									
3.	Angka kunjungan wisatawan (orang)	Oran g	1.850.000	15.206.000	2.179.000	2.262.738	14,88	37	▶
4.	Jumlah/event pameran pariwisata yang diikuti	Event	NA	18	3	-	-	0,00	▼
Program Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Wisata									
5.	Jumlah Pokdarwis yang dibina	Kelo m-pok	NA	24	1	1	100,00	4,17	▼

Keterangan :

- OPD Pengampu DKPP
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

C. Pertanian

Target RPJMD 2016-2021 terhadap indikator kinerja pembangunan Urusan Pertanianditunjukkan dalam 51 indikator, sebanyak 14 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2017 dan target akhir RPJMD

sebesar 100% atau lebih), dan 20 indikator akan tercapai (capaian target 2017 sebesar 100% atau lebih dan target akhir RPJMD kurang dari 100%), dan 17 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai. Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan pertanian sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.101.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s.d 2017 (%)	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan									
Produksi pangan									
1	Padi	Ton	252.189	265.053	254.711	237.887	93	90	▶
2	Jagung	Ton	39.732	41.759	40.130	52.151	130	125	●
3	Kedelai	Ton	223	235	225	126	56	54	▶
Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura									
4	Ubi Kayu	Ton	74.901	78.721	75.650	64.303,00	85	82	▶
5	Kentang	Ton	3.893	4.092	3.932	908,40	23	22	▶
6	Kobis	Ton	3.255	3.421	3.288	2.578,40	78	75	▶
7	Wortel	Ton	2.010	2.113	2.030	2.695,40	133	128	●
8	Stroberi	Ton	462	486	467	111,20	24	23	▶
9	Cabai besar	Ton	726	764	734	2.847,80	388	373	●
10	Cabai rawit	Ton	578	607	583	1.983,60	340	327	●
Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan									
11	Duku	Ton	7.643	8.033	7.719	51,50	1	1	▼
12	Durian	Ton	3.809	4.003	3.847	661,00	17	17	▼
13	Pisang	Ton	14.189	14.912	14.331	12.460,80	87	84	▶
14	Nanas	Ton	412	433	416	25.552,19	6142	5901	●
15	Pepaya	Ton	4.825	5.071	4.873	3.220,03	66	63	▶
16	Manggis	Ton	723	760	730	85,50	12	11	▼
17	Kapulaga	Ton	12,28	12,91	12,40	670,60	5408	5194	●

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s.d 2017 (%)	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
18	Kopi	Ton	584	614	590	165,48	28	27	▶
19	Lada	Ton	177	186	179	154,10	86	83	▶
20	Kelapa Dalam	Ton	12.781	13.432	12.908	12.641,00	98	94	▶
21	Kelapa Deres	Ton	53.661	56.399	54.198	55.140,00	102	98	▶
22	Cengkeh	Ton	57	59	57	32,46	57	55	▶
23	Glagah Arjuna	Ton	705	741	712	372,84	52	50	▶
24	Nilam	Ton	717	754	717	574,72	80	76	▶
25	Tebu	Ton	938	986	948	1.490,17	157	151	●
26	Karet	Ton	127	134	129	132,01	102	99	▶
Cakupan Fasilitas Penanganan Pasca Panen Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan									
27	Power Thresher	Unit	1.000	8.033	7.719	51,50	1	1	▼
28	Pemipil Jagung	Unit	64	4.003	3.847	661,00	17	17	▶
29	Rice Mill Unit	Unit	451	14.912	14.331	12.460,80	87	84	●
30	Penggunaan Pupuk Organik	Ton	3.235	433	416	25.552,19	6142	5901	▼
Program Pengembangan Budidaya Peternakan									
31	Sapi	Ton	1.237,25	1.300,35	1.249,50	1.097,80	88	84	▼
32	Kerbau	Ton	1,2	1,26	1,20	1,50	125	119	●
33	Kambing	Ton	280,11	294,4	282,90	724,74	256	246	●
34	Domba	Ton	81,94	86,12	82,80	132,56	160	154	●
35	Kelinci	Ton	0,78	0,82	0,80	1,46	183	178	●
36	Babi	Ton	0	0	-	0,00	0	0	▼
37	Ayam Layer	Ton	47.240	49.694	47.709,00	52,19	0	0	▼
38	Ayam Broiler	Ton	4.659.376	4.897.006	4.705.678,00	9.848,43	0	0	▼
39	Ayam Buras	Ton	8.318.504	8.742.751	8.401.168,00	2.465,13	0	0	▼

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s.d 2017 (%)	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
40	Itik	Ton	19.028	19.998	19.217,00	49,28	0	0	▼
41	Burung Puyuh	Ton	9.654	10.146	9.749,00	3,72	0	0	▼
42	Angsa	Ton	73	77	74,00	0,58	1	1	▼
43	Entog	Ton	5.141	5.403	5.192,00	29,57	1	1	▼
44	Merpati	Ton	1543	1.622	1.558,00	0,73	0	0	▼
45	Produksi Hasil Peternakan (Susu)	Liter	291.131	305.982	294.043	87.700,00	30	29	▶
46	Produksi Hasil Peternakan (Telur)	Ton	12.437	13.071	12.561	12.892,08	103	99	▶
Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian									
47	Produksi Olahan Daging	Ton	434	456	438	248,30	57	54	▶
48	Produksi Olahan Telur	Ton	92.209	97.963	94.141	94,10	0	0	▼
49	Produksi Olahan Susu	Liter	96.807	101.746	97.776	116.800,00	119	115	●
Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair									
50	Prevalensi Penyakit	%	30,29	17,89	27,26	75,96	279	425	●
51	Penyakit Zoonosis	%	7,7	4,54	7,7	0,00	0	0	▼

Keterangan :
- OPD Pengampu Dinas Pertanian
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

D. Perdagangan

Target RPJMD 2016-2021 terhadap indikator kinerja pembangunan Urusan Perdaganganditunjukkan dalam 11 indikator, sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2017 dan target akhir RPJMD sebesar 100% atau lebih), dan 2 indikator akan tercapai (capaian target 2017 sebesar 100% atau lebih dan target akhir RPJMD kurang dari 100%), dan 3 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai. Secara rinci gambaran

pencapaian indikator urusan perdagangan sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.102.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJM D 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s.d 2017 (%)	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan									
1	Jumlah pasar tradisional yang memenuhi standar SNI	Pasar	0	3	1	0	-	0	▼
2	Cakupan Pedagang Kaki Lima yang ditata dan diberdayakan	PKL	6	16	8	0	-	0	▼
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan									
3	Cakupan pemantauan terhadap distribusi barang penting dan strategis	Lokasi	NA	3	3	3	100	100	●
Program Standarisasi, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan									
4	Cakupan pengawasan terhadap komoditas barang yang peredarannya diawasi	Komoditi	NA	3	3	3	100	100	●
5	Cakupan pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus	Lokasi	NA	44	44	44	100	100	●
6	Cakupan jumlah sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK	Kasus	3	25	5	7	140	28	▶
7	Cakupan jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	UTTP	NA	32	320	250	300	120	●
8	Cakupan pasar tertib ukur	Pasar	1	2	2	1	0	-	▼
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor									
9	Jumlah eksportir	Perusahaan	NA	29	29	29	100,00	100	●
10	Jumlah/jenis barang yang diekspor	Produk	40	80	50	40	80,00	50	▶
11	Nilai ekspor (Milyar)	Rp.	NA	3.800.000.000.000	0	7.203.988.699.390	-	190	●




Keterangan :
- OPD Pengampu Dinperindag
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

E. Perindustrian

Target RPJMD 2016-2021 terhadap indikator kinerja pembangunan Urusan Perindustrianditunjukkan dalam 3 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2017 dan target akhir RPJMD

sebesar 100% atau lebih), dan 2 indikator perlu perhatian/upaya keras untuk dicapai target akhir RPJMD. Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan perindustriansampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.103.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian



No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-An	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s.d 2017 (%)	Status
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Rakyat									
1	Cakupan fasilitasi HKI	%	100	100	100	100	100,00	100	
2	Cakupan penerapan standarisasi produk industri	%	100	100	100	0	100,00	0	
3	Cakupan fasilitasi sertifikasi halal	%	100	100	100	0	100,00	0	

Keterangan :
 - OPD Pengampu Dinperindag
 - ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

2.2.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan




Target RPJMD 2016-2021 terhadap kinerja pembangunan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ditunjukkan dalam 45 indikator, sebanyak 27 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2017 dan target akhir RPJMD sebesar 100% atau lebih), 14 indikator akan tercapai (targer tahun 2017 sudah tercapai 100% bahkan lebih) dan 4 indikator perlu perhatian agar dapat dicapai pada akhir RPJMD. Secara rinci gambaran pencapaian indikator Urusan Pemerintahan sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.104.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJM D 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian		
Bappelitbangda									
Program Perencanaan Pembangunan Daerah									
1	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	100	100	93,9	93,88	94	
2	Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	%	100	100	100	100	100,00	100	

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Target	Realisasi	Capaian		
3	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran	%	65	40	35	24,70	70,6	176	●
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
4	Tingkat Pencapaian Target Kinerja sasaran Pembangunan	%	100	100	100	94,7	94,7	95	▶
Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi									
5	Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek	Lembaga	7	7	4	11	275,0	157,14	●
6	Frekuensi diseminasi hasil litbang	Desiminasi	4	4	4	4	100,0	100	●
Inspektorat									
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah									
7	Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa	Unit	108	108	110	113	103	105	●
8	Persentase penanganan kasus/khusus	%	100	100	100	100	100	100	●
9	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	85	75	75	77	103	103	●
10	Level kapabilitas APIP	Tingkat	2	5	2	2	100	40	▶
Sekretariat DPRD									
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									
11	Persentase usulan Raperda yang disetujui	%	100	100	100	75,86	75,86	75,86	▶
Sekretariat Daerah									
Program Pembinaan Kehidupan Beragama									
12	Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan per tahun	%	175	215	105	105	100,00	48,83	▶
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah									
13	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Angka		80,5	78	77,96	99,95	96,84	▶
Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan / Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah/Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah/Program Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Pelayanan Hukum									
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Angka	NA	80,5	78,5	78,51	100	98	▶
15	Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	OPD	6	45	15	19	127	42	▶
16	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Angka	52	60	52	57,75	111	96	▶

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Target	Realisasi	Capaian		
17	Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	%	80	100	485	519	107	519	●
18	Tingkat capaian bantuan hukum dan penyuluhan hukum	%	NA	100	100	100	100	100	●
19	Tingkat capaian Informasi Peraturan Perundang-undangan	%	NA	100	100	100	100	100	●
20	Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	%	100	100	100	98,87	167	98,87	▶
21	Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	●
22	Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	%	3	3	3	5,01	167	167	●
23	Tingkat capaian target laba Perusda (ribu rupiah)	Rp. 000	28.073.848	45.213.213	30.881.233	0	-	-	▼
24	Tingkat capaian target deviden perusda (ribu rupiah)	Rp. 000	13.868.136	22.334.772	15.254.950	0	-	-	▼
25	Jumlah LKM berbadan hukum (unit)	Unit	7	224	14		-	-	▼
26	Tingkat kesesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	%	90	90	90	100	111	111	●
27	Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	%	100	100	100		-	-	▼
28	Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	%	100	100	100	100	100	100	●
29	Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	%	100	100	215	147	68	147	●
Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah									
30	Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	%	100	100	100	100	100	100	●
31	Persentase SKPD yang melaksanakan penatausahaan aset sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	●
32	Ketepatan waktu pengiriman Laporan Keuangan sesuai ketentuan	%	92	100	100	100	100	100	●
33	Ketepatan waktu pengiriman Laporan Aset sesuai ketentuan	%	92	100	100	100	100	100	●
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah									
34	Persentase PBB yang terbayar oleh wajib pajak	%	100	100	100	105	105	105	●
35	Capaian PAD	%	NA	100	100	108,00	108	108	●

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satu-an	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJM D 2016-2021	2017			Capaian RPJMD s/d 2017 (%)	Status
					Tar-get	Realisasi	Capaian		
Program Fasilitas dan Pengembangan Kepegawaian Daerah									
36.	Persentase ASN yang mengikuti Diklat sesuai standar	%	NA	100	100	80	80	80	
37.	Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	NA	100	100	75	75	75	
38.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan								
	a. Struktural	hari	99	99	99	99	100	100	
	b. Teknis/Fungsional/Pelaks.	hari	15	15	15	15	100	100	
39	Persentase penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	
40	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	
41	Persentase administrasi file kepegawaian yang terupdate	%	100	100	100	100	100	100	
42	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	%	NA	24	27	31	115	129	
43	Jumlah jabatan administrator/esl III pada instansi pemerintah	%	143	143	143	152	106	106	
44	Jumlah jabatan administrasi/Pengawas EsI IV	%	NA	701	701	559	80	80	
45	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	%	NA	6.100	5.113	4.950	97	81	

Keterangan :

- OPD Pengampu Bappelitbangda, Inspektorat, Bakeuda, BKD , Setda dan Setwan
- ● : Telah Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu perhatian/Upaya Keras

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam suatu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan analisis gambaran umum dan evaluasi pelaksanaan program RKPD Tahun 2017, maka permasalahan pembangunan Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Meskipun setiap tahun mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, namun pada tahun 2017 angkanya masih terkatagorikan tinggi yaitu sebesar 18,80 persen atau sebanyak 171,88 ribu orang, dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 313.343,- perkapita perbulan;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih relatif tinggi, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja, khususnya bagi laki-laki;
3. Belum optimalnya upaya pemenuhan kesejahteraan pekerja terkait dengan pemenuhan standar kebutuhan hidup layak (KHL), jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja;
4. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baik dari sisi kapasitas maupun kualitasnya serta masih rendahnya pemerataan akses layanan pendidikan khususnya bagi keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus;
5. Relatif rendahnya derajat kesehatan masyarakat, diantaranya ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta masih rendahnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;

6. Relatif rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi serta masih adanya budaya buang air besar di tempat terbuka. Cakupan desa *Open Defecation Free* (ODF) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 baru mencapai 11 desa (4,6 persen);
7. Adanya prevalensi HIV-AIDS di tingkat nasional dan khususnya di Kabupaten Purbalingga yang cukup tinggi;
8. Masih cukup tingginya pertumbuhan penduduk. Di tahun 2016, pertumbuhan penduduknya mencapai sebesar 1,02 persen. Sedangkan, angka *drop out* KB sebesar 30 persen;
9. Belum optimalnya upaya peningkatan investasi terkait dengan masih terbatasnya informasi dan promosi investasi serta belum tersedianya pelayanan investasi dan perijinan secara online;
10. Belum optimalnya upaya pemenuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, tingkat konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih di bawah standar pola pangan harapan yaitu sebesar 87,90;
11. Belum optimalnya peran koperasi dan UMKM dalam penggerak perekonomian daerah terutama dalam kelembagaan, SDM, akses pasar dan modal serta kualitas produk;
12. Pengembangan pariwisata belum optimal baik dari sisi kelembagaan dan SDM pengelola terkait dengan daya saing obyek wisata daerah;
13. Belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur khususnya jalan, jembatan, prasarana irigasi serta fasilitas umum;
14. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun yang tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas prasarana jalan membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan angkutan darat guna meningkatkan kenyamanan layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas;
15. Masih cukup rendahnya kapasitas dan kualitas prasarana wilayah dan prasarana permukiman. Data tahun 2015, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga sebanyak 27.533 rumah, dan 3.526 (12,8 persen) diantaranya menyatu dengan kandang ternak, serta 13.894 (37,3 persen) diantaranya tidak memiliki jamban yang layak;
16. Penanganan persampahan belum optimal, dengan rasio sampah yang ditangani baru sebesar 10 persen;

17. Masih dirasakan adanya penurunan kesetiakawanan sosial serta semangat patriotisme dan nasionalisme yang ditandai dengan menurunnya semangat gotong royong serta menurunnya kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan Negara;
18. Masih perlunya peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah;
19. Belum optimalnya upaya penanggulangan bencana;
20. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum optimal dan perlu dilakukan kebijakan intervensi yang bersifat afirmatif;
21. Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta masih adanya pekerja di bawah umur;
22. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dan belum semua terpetakan khususnya tanah pmdasehingga seringkali menjadi penghambat dalam proses pembangunan;
23. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka ancaman degradasi lahan khususnya lahan pertanian tak terelakan;
24. Belum optimalnya efektivitas fungsi lembaga pemerintahan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
25. Perlunya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik;
26. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga berprestasi, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga;
27. Kecenderungan semakin menurunnya apresiasi terhadap seni budaya daerah serta memudarnya nilai adat ketimuran sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian dan dalam kehidupan sehari-hari;
28. Semakin menurunnya minat baca masyarakat;
29. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi;
30. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu masih dibawah 80 persen, hal ini diantaranya disebabkan oleh belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Kabupaten Purbalingga diidentifikasi dari berbagai sumber, meliputi : 1) Isu strategis dari dinamika internasional, nasional maupun regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga; 2) Isu strategis daerah lainnya yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga; 3) Isu strategis dari kebijakan pembangunan berupa RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, dan 4) Isu strategis dengan melihat kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, sarana prasarana dan pemerintahan umum pada masa kini serta melihat kemungkinan yang akan terjadi masa mendatang.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan pembangunan Kabupaten Purbalingga yang menjadi Isu Strategis dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 meliputi:

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Manusia

Berdasarkan data Susenas BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 sebesar 18,80 persen. Sedangkan pada tahun 2010 angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga sebesar 24,58 persen. Meskipun mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga masih menempati peringkat ke-4 di Provinsi Jawa Tengah. Relatif tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga menyebabkan relatif rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya.

Upaya penanggulangan kemiskinan tentunya perlu ditingkatkan melalui berbagai program yang mengarah pada pemenuhan hak dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi, dan pangan; perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Diharapkan dengan adanya program-program yang *pro poor* dapat mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin secara signifikan.

Permasalahan utama penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga adalah pemenuhan kebutuhan pangan. Kondisi musim yang tidak menentu akan mempengaruhi produksi dan ketersediaan pangan, serta sering terjadinya fluktuasi harga bahan pangan pokok menjadi bagian dari penyebab rendahnya daya beli masyarakat kurang mampu. Disamping

permasalahan pangan, persoalan yang perlu mendapatkan penanganan adalah masih banyaknya rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh. Pada tahun 2013 tercatat ada sekitar 13.814 RTLH, kemudian pada tahun 2017 justru ada sebanyak 27.498 RTLH di Kabupaten Purbalingga.

Secara umum dalam kurun waktu tahun 2013-2017 penataan lingkungan permukiman perlu ditingkatkan. Cakupan air bersih sudah baik dengan capaian lebih dari 65% pada tahun 2013, dan pada tahun 2016 sebesar 82,78%, dan tahun 2017 sanitasi sebesar 89,73 dan air bersih mencapai 87,60%. Walaupun demikian kedepan perlu ditingkatkan agar akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi semakin baik, menuju universal access 100-0-100.

Tabel 2.105
Kondisi Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1	Luas kawasan kumuh	%	0	32,39	32,39	23,70	23,45
2	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	13.814	24.315	25.577	27.537	27.498
3	Persentase rumah tidak layak huni	%	4,7	6,5	11,40	11,41	11,35
4	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	74,89	69,8	70,00	78,58	89,73
5	Persentase rumah tangga menggunakan air bersih	%	68,48	77,48	78,55	82,78	87,60

Sumber Data : DPU-PR Kabupaten Purbalingga

b. Pembangunan Manusia

Pada hakekatnya tujuan utama pembangunan adalah membangun manusia melalui upaya peningkatan kualitas manusia baik dari aspek lahiriah maupun dalam dimensi yang lebih luas termasuk aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pembangunan fisik prasarana, ekonomi, sosial dan sebagainya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat.

Pembangunan manusia juga menjadi isu strategis karena menyangkut pemenuhan hak dasar rakyat yang dijamin konstitusi. Pemenuhan hak dasar ini antara lain meliputi hak untuk mendapatkan

identitas/ legalitas, akses layanan kesehatan, akses layanan pendidikan, pangan, perumahan sehat dan layak, serta fasilitas sanitasi dan akses terhadap air minum. Pembangunan manusia dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia.

Nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Metode lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan, khususnya terkait pembangunan manusia di suatu daerah dengan menggunakan tolok ukur *Physical Quality of Life Index* (PQLI) atau yang lebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit yang di bentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui Pengeluaran Rill per Kapita. Capaian IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 sebesar 67,03 mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 67,48 dan tahun 2017 menjadi 67,72. Meskipun mengalami kenaikan, namun masih di bawah rata – rata capaian Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2017 sebesar 70,52.

Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung. Variabel pertama adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan rata-rata perkiraan lama kehidupan yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Oleh karena itu AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup diharapkan mencerminkan lama hidup dan hidup sehat. Lama hidup seseorang tidak terlepas dari kesehatan orang tersebut. Usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, usia harapan hidup tidak terlepas dari upaya peningkatan taraf kesehatan. Angka Harapan Hidup tinggi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang tinggi, asupan gizi yang baik dan kepedulian terhadap kesehatan melalui pemeliharaan bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan

pemerintah yaitu program wajib belajar. Capaian indikator IPM Kabupaten Purbalingg tahun 2015 dan 2016 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.106
Capaian Komponen IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2017

Komponen IPM	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,81	72,86	72,91
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,78	11,93	11,94
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,85	6,86	6,87
Pengeluaran perkapita disesuaikan : 96 komoditas (ribu rupiah PPP)	8.938	9.159	9.340

Indikator pembangunan pendidikan selanjutnya adalah Rata – rata Lama Sekolah (RLS). RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP. Awal perhitungan RLS dilakukan dengan menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas, baru selanjutnya menghitung lamanya sekolah. Apabila dalam partisipasi sekolah seseorang tidak/belum pernah bersekolah, maka skor lama sekolahnya 0 (nol). Jika partisipasi sekolah yaitu masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka perhitungan lama sekolah disesuaikan dengan cara konversi ijazah ke dalam tahun lama sekolah.

Untuk yang tidak mempunyai ijazah, maka skor konversi tahun lama sekolahnya 0 tahun, SD sederajat 6 tahun, SMP sederajat 9 tahun, SMA sederajat 9 tahun, D1/D2 sederajat 14 tahun, D3 sederajat 15 tahun, D4/S1 sederajat 16 tahun, dan S2/S3 sederajat 18 tahun. Adapun capaian RLS Kabupaten Purbalingga sebesar 6.85 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 6.87 pada tahun 2017. Capaian RLS ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2014 saja sudah mencapai 6.93 dan meningkat menjadi 7.03 pada tahun 2015. Capaian RLS Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi ke – 19 se Jawa Tengah, dan pada tahun 2015 berada pada urutan ke – 21.

Sementara itu, kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Rata-rata pengeluaran per kapita konstan kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Capaian paritas daya beli Kabupaten Purbalingga sebesar 8.539 ribu pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 8.838 ribu pada tahun 2015. Capaian paritas daya beli ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 9.640 ribu pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 9.930 ribu pada tahun 2015. Capaian paritas daya beli Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi ke-27 se Jawa Tengah, dan pada tahun 2015 berada pada peringkat ke-25.

Mengingat bahwa pembangunan manusia mencakup begitu banyak aspek dan menjadi komitmen global, maka pembangunan manusia ditetapkan sebagai isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga. Pembangunan manusia sangat berkaitan erat dengan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, dan peningkatan apresiasi terhadap seni budaya daerah dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Berdasarkan data hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, diketahui bahwa jumlah anak usia sekolah setingkat SD sampai dengan SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu (tingkat kesejahteraan 40 persen terendah) di

Kabupaten Purbalingga sebanyak 87.492 anak. Dari jumlah tersebut terdapat 1.970 anak usia sekolah setingkat SD (usia 7 – 12 tahun) yang tidak sekolah (4.46 persen), dan 5.450 anak usia sekolah setingkat SMP (usia 13 – 15 tahun) yang tidak sekolah (22,75 persen). Sedangkan pada usia sekolah SM (usia 16 – 18 tahun) yang tidak sekolah sebanyak 13.265 anak (68.45 persen). Tetapi berdasarkan hasil pendataan inisiatif pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), jumlah anak usia sekolah SD yang tidak sekolah sebanyak 1.159 anak, dan anak usia sekolah SMP yang tidak sekolah sebanyak 2.167 anak.

Berbagai hal yang harus diprioritaskan dalam pembangunan pendidikan antara lain memperluas dan pemerataan akses pendidikan dalam rangka mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah terutama bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, proses pendidikan harus menjadi sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang melalui internalisasi dan pengintegrasian dalam pendidikan.

Dalam pembangunan kesehatan, hal yang perlu mendapatkan perhatian kesehatan ibu anak, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular maupun tidak b menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu, perlu untuk terus ditingkatkan upaya pemenuhan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan serta pemberian fasilitas layanan jaminan kesehatan untuk seluruh warga masyarakat terutama bagi warga miskin. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Disamping capaian AHH yang masih rendah, berdasarkan hasil PBDT 2015 masih terdapat 16.150 orang yang menderita penyakit kronis. Selanjutnya, dari 98.371 rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah hasil PBDT 2015, masih terdapat 34.245 rumah tangga atau 34.81 persen yang tidak memiliki akses jamban baik jamban sendiri maupun jamban bersama.

Selanjutnya dalam rangka memperkuat karakter dan jatidiri warga masyarakat perlu adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menangkal penetrasi budaya global yang kurang konstruktif serta meningkatkan apresiasi terhadap bahasa nasional dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.

c. Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016 PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 15,99 juta, masih jauh lebih rendah dibanding PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 27,61 juta, dan PDB per kapita Nasional sebesar Rp. 41, 81 juta

Dalam struktur PDRB Kabupaten Purbalingga, Sektor Pertanian masih memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 30 persen disusul Sektor Industri Pengolahan (23,50 persen), serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (14,21 persen). Meskipun angka PDRB per kapita relatif kecil tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun cukup baik yaitu rata-rata 5,7 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan Sektor Pertanian cenderung mengalami penurunan (lebih rendah dibanding pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Jasa). Menurunnya pertumbuhan Sektor Pertanian adalah wajar dan menunjukkan dinamika perekonomian yang positif. Dengan terbatasnya ketersediaan lahan pertanian, maka meskipun terus dilakukan upaya peningkatan produktivitas melalui intensifikasi pertanian, pada saatnya akan sampai pada titik maksimal sehingga produktivitasnya sulit untuk ditingkatkan lagi. Di sisi lain sektor sekunder dan tersier terus bertumbuh dengan lebih cepat seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan produk-produk manufaktur dan jasa.

Meskipun pertumbuhan ekonomi perlu untuk terus lebih didorong tetapi apabila tidak diiringi dengan peningkatan pemerataan pendapatan maka tidak banyak memberi pengaruh terhadap peningkatan daya beli

masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas, perdagangan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, serta koperasi. Dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup, pengembangan investasi harus diarahkan pada pengembangan industri padat karya dan ramah lingkungan. Pada tahun 2016 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Purbalingga sebesar 5,33 persen, lebih tinggi dibanding TPT tahun 2015 yaitu sebesar 4,84 persen. Tingkat pemerataan pendapatan masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 berada pada tingkat ketimpangan sedang dengan angka Indeks Gini sebesar 0,32.

Salah satu aktivitas ekonomi yang dipandang memberi efek multiplier yang luas dan dapat menjadi prime mover perekonomian daerah adalah pariwisata. Berkembangnya kepariwisataan akan dapat mengungkit pertumbuhan berbagai sektor ekonomi seperti sektor perhotelan dan restoran, sektor angkutan, sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertanian, dan sebagainya termasuk sektor-sektor informal. Besarnya potensi kepariwisataan Kabupaten Purbalingga terutama potensi alam yang tersebar di seluruh wilayah perlu untuk didayagunakan secara optimal untuk pengembangan kepariwisataan baik melalui pengembangan obyek-obyek wisata baru oleh pemerintah kabupaten maupun melalui pengembangan desa wisata.

d. Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, prasarana irigasi, prasarana perkotaan, prasarana permukiman, serta prasarana pelayanan sosial dan ekonomi dengan kapasitas dan kualitas yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan sangat dibutuhkan untuk kelancaran distribusi barang dan jasa. Kondisi jalan dan jembatan yang tidak memadai akan menyebabkan terhambatnya angkutan barang dan

orang sehingga akan menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sampai dengan saat ini, meskipun seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga telah dapat diakses melalui angkutan kendaraan bermotor roda empat, tetapi masih perlu peningkatan kapasitas jalan untuk meningkatkan akses ke beberapa wilayah tertentu. Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi transportasi, juga perlu dilakukan pembangunan beberapa jalan dan jembatan baru untuk menghubungkan beberapa wilayah tertentu agar diperoleh jarak tempuh yang lebih pendek. Untuk meningkatkan umur ekonomi jalan juga diperlukan pembuatan saluran drainase dan talud pengaman jalan pada titik-titik tertentu di seluruh wilayah.

Posisi geografis wilayah Kabupaten Purbalingga yang jauh dari dua jalur utama lalu lintas di Pulau Jawa baik jalur utara maupun jalur selatan dengan akses jalan yang relatif sempit dan naik-turun serta berkelok menyebabkan akses angkutan barang dan jasa dari dan menuju wilayah Kabupaten Purbalingga menjadi kurang efisien. Pada era globalisasi di mana segala aktivitas ekonomi menuntut untuk diselenggarakan secara cepat dan tepat waktu, maka kendala akses wilayah menjadi hambatan bagi pertumbuhan wilayah. Permasalahan ini menyebabkan wilayah kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan pada umumnya relatif tertinggal dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah Kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan secara umum agar tidak tertinggal dibanding dengan wilayah lain, dibutuhkan adanya moda transportasi cepat yaitu transportasi udara. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Purbalingga akan terus berupaya dan berpartisipasi aktif untuk melakukan koordinasi dan memberikan dukungan bersama-sama dengan daerah lain di wilayah Jawa Tengah bagian Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan, dan TNI Angkatan Udara untuk terwujudnya pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Wirasaba menjadi Bandar Udara.

Pembangunan serta peningkatan kapasitas dan kualitas bendung dan saluran irigasi juga masih perlu untuk dilaksanakan guna meningkatkan kelancaran penyediaan air bagi kepentingan budidaya pertanian dalam arti luas. Ketersediaan air sangat vital bagi budidaya pertanian sehingga produksi pertanian tidak mungkin dapat ditingkatkan atau setidaknya

dipertahankan apabila tidak tersedia jaringan irigasi yang mampu mengalirkan air pada seluruh lahan pertanian.

Sementara itu, untuk meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan keindahan serta meningkatkan kelancaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat di perkotaan diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perkotaan serta penataan kawasan perkotaan. Dengan terwujudnya kawasan perkotaan yang tertib, indah, nyaman, dan aman, dengan sendirinya juga akan menciptakan daya tarik wilayah bagi kunjungan pariwisata maupun peningkatan daya tarik investasi.

e. Pelestarian Lingkungan Hidup

Eksplorasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia seperti pencemaran air dan udara, meningkatnya angka kesakitan penyakit degeneratif, meningkatnya kerusakan lahan, menurunnya populasi ikan di perairan umum, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna, terjadinya banjir dan tanah longsor, serta meningkatnya pemanasan global yang semakin terasa.

Peningkatan pemanasan global dipicu meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang bersumber dari kegiatan manusia dalam menggunakan energi fosil, pengelolaan lahan dan pertanian, serta pengelolaan limbah. Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada peningkatan intensitas hujan dan kemarau serta terjadi pergeseran musim. Dampak perubahan iklim berakibat terjadinya gagal panen pada sektor pertanian dan meningkatnya intensitas bencana seperti banjir, angin ribut, dan kemarau berkepanjangan. Diperlukan upaya mengurangi perubahan iklim tersebut melalui aksi-aksi mitigasi (pengurangan) emisi gas rumah kaca di sektor transportasi, peningkatan tutupan lahan, pertanian rendah emisi, dan pengelolaan limbah.

Sementara itu pesatnya peningkatan jumlah penduduk bersamaan dengan menurunnya daya dukung lingkungan menyebabkan semakin cepatnya penurunan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan populasi manusia bersamaan dengan peningkatan aktivitasnya serta peningkatan pemanfaatan bahan-bahan hasil sintesa kimiawi mengakibatkan

meningkatnya dengan pesat produksi bahan pencemar lingkungan hidup (polutan) seperti sampah plastik, asap kendaraan bermotor, limbah kimia dan sebagainya. Di sisi lain peningkatan populasi penduduk menyebabkan peningkatan desakan terhadap sumberdaya lahan yang ditandai dengan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian maupun lahan yang memiliki fungsi lindung. Memburuknya kondisi hutan lindung dan kawasan lindung lainnya seperti kawasan tangkapan air, kawasan sekitar mata air, sempadan sungai, lahan dengan kelerengan tinggi telah mengakibatkan berbagai permasalahan dan ancaman bagi kehidupan manusia seperti mengeringnya beberapa mata air akibat menurunnya keseimbangan tata air, terjadinya tanah longsor, terjadinya banjir yang besar ketika musim penghujan dan kekeringan yang ekstrim ketika musim kemarau dan sebagainya.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan fungsi lingkungan hidup yang lebih cepat perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan fungsi lingkungan hidup serta rehabilitasi terhadap lingkungan hidup yang telah mengalami kerusakan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

f. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Visi Pemerintah Daerah akan dapat dicapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip-prinsip good governance antara lain efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki visi strategis (*strategic vision*). Luasnya cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipikul pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus menghasilkan output secara optimal agar seluruh elemen organisasi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif dengan mendayagunakan sumberdaya secara efisien. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga harus dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui serta dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga harus

dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tata kelola keuangan dan aset Kabupaten Purbalingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diharapkan pada masa yang akan datang kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah akan semakin meningkat sehingga dapat terus mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu sesuai hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) untuk menilai Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam tiga tahun berturut-turut masuk dalam peringkat 10 besar nasional, dengan mendapat skor dengan kategori sangat tinggi sehingga mendapatkan tropi Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha dari kementerian Dalam Negeri. Sedangkan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setiap tahun oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga baru berada pada kategori CC (cukup baik).

Aktivitas seluruh elemen pemerintah daerah harus mengarah kepada visi yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Elemen organisasi dan struktur jabatan yang bersifat koordinatif harus berperan optimal dalam mengarahkan dan menggerakkan lini organisasi dalam rumpun koordinasinya agar masing-masing dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan visi daerah. Untuk itu seluruh elemen pemerintah daerah harus memahami visi daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap elemen organisasi pemerintah daerah harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga secara efektif akan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan maka pada gilirannya akan dapat diwujudkan visi pemerintah daerah.

Agar setiap elemen pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat melaksanakan program-program dan kegiatan pembangunan yang secara efektif mampu mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah, harus didukung dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional. Profesionalitas aparatur pemerintah daerah mensyaratkan adanya integritas, kapasitas dan kompetensi. Oleh karena itu sistem karir aparatur harus benar-benar dilaksanakan berdasarkan merit system. Organisasi perangkat daerah harus disusun dengan struktur yang ramping tetapi mampu melaksanakan seluruh fungsi secara optimal dengan sistem tata kelola yang efektif.

g. Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum

Salah satu permasalahan penting pembangunan pada saat ini adalah adanya kecenderungan menurunnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Kebanggaan terhadap jatidiri bangsa semakin terkikis oleh nilai-nilai budaya asing yang dianggap lebih superior. Identitas nasional meluntur akibat cepatnya penyerapan budaya global, sementara nilai-nilai positif budaya bangsa yang lebih relevan bagi pembangunan karakter bangsa justru diabaikan. Berkembangnya budaya materialisme, konsumerisme dan hedonisme menjadi salah satu penyebab menurunnya semangat patriotisme.

Berkembangnya semangat materialisme dan hedonisme juga menyebabkan berkembangnya mentalitas menerabas dan kurangnya penghargaan terhadap kerja keras, inovasi, dan pencapaian prestasi yang pada tahap berikutnya berdampak terhadap meningkatnya tindak kekerasan, premanisme dan kriminalitas. Kesemarakkan kehidupan beragama yang nampak pada saat ini ternyata belum sejalan dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama terbukti dengan banyaknya perilaku asusila, pornografi dan pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, meningkatnya kriminalitas serta praktik-praktik lain yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Disisi lain kecenderungan meningkatnya radikalisme dalam pemahaman agama juga menjadi ancaman tersendiri bagi tegaknya integritas nasional. Sementara itu kecenderungan berkembangnya sektarianisme agama dan fanatisme golongan yang berlebihan menjadi ancaman tersendiri bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Oleh

karena itu pengembangan wawasan kebangsaan serta penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme perlu terus ditingkatkan pada saat ini dan yang akan datang. Demikian juga perlu dilakukan upaya pengembangan dan penanaman nilai-nilai moral yang positif baik yang berpijak pada nilai agama maupun nilai budaya bangsa. Internalisasi nilai-nilai moral yang positif dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal, non formal, informal maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan beragama perlu terus didorong guna meningkatkan pengamalan dan penghayatan nilai-nilai agama bersamaan dengan upaya mewujudkan kerukunan inter dan antar umat beragama.